

ARSIP

MEDIA KEARSIPAN NASIONAL



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Melestarikan Identitas dan Jati Diri

INDONESIA

Melalui Program **MEMORI KOLEKTIF BANGSA**



EDISI 80 | TAHUN 2021

*Terima kasih
atas kerja sama semua pihak*

ARSIP NASIONAL RI

Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik

INFORMATIF

oleh **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



RUBRIK

04 DARI REDAKSI

10 ARTIKEL LAPORAN UTAMA

DARI MEMORI KOLEKTIF BANGSA
MENUJU INGATAN KOLEKTIF DUNIA

PENYELAMATAN ARSIP COVID-19
SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

15 KHAZANAH

MENGULIK ARSIP TENTANG BENDUNGAN,
WADUK, DAN BENDUNG YANG TERSIMPAN DI
ARSIP NASIONAL RI

MENEROPONG ARSIP-ARSIP *GENDER*
BERNILAI *MEMORY OF THE WORLD*

23 PROFIL

PROF. DR. KUWAT TRIYANA, M.SI.
SOSOK INOVATOR PENEMU GENOSE
ALAT PENDETEKSI COVID-19

37 MANCANEGARA

PENYELENGGARAAN PROGRAM
MEMORY OF THE WORLD DI AUSTRALIA

40 DAERAH

KEPALA ANRI LAKSANAKAN KUNJUNGAN
KERJA KEARSIPAN DI CILACAP

45 HUKUM

REVITALISASI LEMBAGA KEARSIPAN
DI PEMERINTAHAN DAERAH

50 VARIA

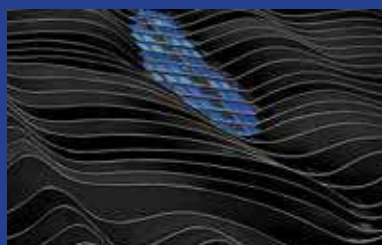
SELAMAT DATANG DI PUSAT STUDI ARSIP
PEMBERANTASAN KORUPSI ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

56 LIPUTAN



LAPORAN UTAMA 05

MELESTARIKAN IDENTITAS DAN JATI DIRI
INDONESIA MELALUI PROGRAM MEMORI
KOLEKTIF BANGSA



PRESERVASI 26

BELAJAR PRESERVASI ARSIP KEPRESIDENAN
DARI NEGARA KABEL



TEKNOLOGI 42

KEMAJUAN TEKNOLOGI KEARSIPAN
DALAM *SOCIETY 5.0*



Desain Sampul : Aswin Budiarto

Pembina :
Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab :
Widarno

Pemimpin Redaksi :
Suminarsih

Dewan Redaksi :
Hilman Rosmana
Azmi
Bambang Parjono Widodo
M. Ihwan

Redaktur :
Susanti
Aria Maulana
Isanto
Intan Lidwina
Tiara Kharisma
Mudanto Pamungkas
Jajang Nurjaman
Erika Nurlidya Utami

Editor :
Rayi Darmagara
Dimas Pratama Yuda
Bobby A. Dwiputra N.
Sitty Annisaa
Sari Agustin W.
Yosa Wisnu W.
Yuanita Utami

Desain Grafis :
Hendri E. Zulkarnain
Aswin Budiarto
Wahyu Setyo Budi
Rani Rizki Amalia

Fotografer :
Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Sekretariat :
Krestiana Evelyn
Putri Iswayanti
Ridha Sari Maulida Pratiwi

 www.anri.go.id

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilendak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id

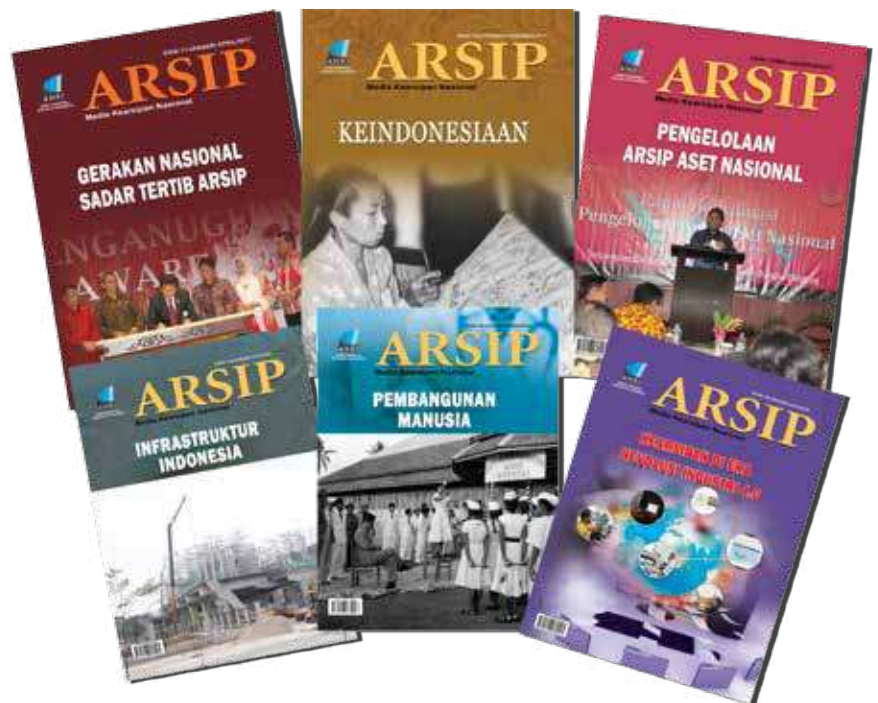
DARI REDAKSI

Kebudayaan arsip negara tidak terlepas dari fungsi sebagai memori kolektif bangsa. Memori kolektif bangsa yang merupakan rekaman dari sejarah perjalanan bangsa, adalah aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya. Sebagai lembaga kearsipan, ANRI memiliki program memori kolektif bangsa yang merupakan program kolaborasi antar pemerintah, pemerintah dengan lembaga swasta, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan masyarakat/ perseorangan.

Pentingnya arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa yang kuat, Majalah ARSIP edisi kali ini mengangkat tema "Memori Kolektif Bangsa". Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Teknologi, dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Semoga sajian informasi pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi



Melestarikan Identitas dan Jati Diri

INDONESIA

Melalui Program Memori Kolektif Bangsa

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Hampir penduduk di setiap pulau di Indonesia dihuni oleh suku dan ras yang berbeda-beda, dengan berbagai latarbelakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. Hal ini tentunya menjadi anugerah yang patut disyukuri dan terus dilestarikan agar generasi mendatang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, di tengah masifnya perkembangan global. Dengan berbagai ragam kebudayaan yang dimiliki Indonesia ini kiranya perlu diarsipkan dengan baik agar menjadi pembelajaran generasi mendatang. Bahwa arsip sejarah perjalanan bangsa merupakan memori kolektif bangsa yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga diperlukan kehadiran negara sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia.

Identitas dan jati diri yang melekat pada negara yakni ciri-ciri khas yang ada pada negara karena dilatarbelakangi sejarah dan budaya sebuah negara sebagai contoh batik, wayang, angklung, keris, tari saman yang merupakan budaya khas Indonesia. Beragamnya budaya khas Indonesia tentu saja menarik orang asing untuk menyukai kebudayaan Indonesia yang unik tersebut. Batik, wayang, angklung, keris, tari saman hanyalah sebagian kecil ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Masih banyak lagi keunikan-keunikan ataupun kekhasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya negara wajib hadir

untuk menentukan langkah strategis dalam pendokumentasian warisan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia. Pendokumentasian tersebut dibutuhkan sebagai upaya perlindungan dari ancaman faktor alamiah dan manusia, optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Lika-liku perjalanan sebuah negara dapat tercatat dengan baik dalam arsip sebagai informasi aktual atas peristiwa penting yang telah dilalui. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa arsip negara merupakan memori kolektif

yang berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

“Sebagai memori kolektif, arsip merupakan endapan informasi bangsa yang mengandung nilai-nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme,” jelas Menteri Tjahjo saat membuka Pekan Memori Kolektif Dunia dan Webinar Internasional “Soekarno Mengguncang Dunia: To Build the World a New” yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara virtual, Senin (11/10).

Arsip, sebagai warisan dokumenter perjalanan sebuah bangsa dan negara juga berfungsi sebagai ingatan dunia yang perlu dilestarikan. Sebagai khazanah sejarah bangsa, arsip memainkan peran yang strategis untuk terus dapat menjaga identitas bangsa Indonesia bagi generasi yang akan datang.

Bahwa dalam upaya perlindungan dari ancaman faktor alamiah dan manusia, optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai



FOTO HUMAS MENPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

memori kolektif bangsa, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di bawah kepemimpinan Imam Gunarto selaku Kepala ANRI meluncurkan program Memori Kolektif Bangsa (MKB). Program MKB, merupakan salah satu program unggulan ANRI, yang meliputi rangkaian proses mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan pelayanan serta registrasi arsip sebagai MKB. Program ini merupakan program kolaborasi yang bersifat nasional dan internasional, baik antar pemerintah (G to G), pemerintah dengan lembaga swasta (G to P), pemerintah dengan dunia usaha (G to B), dan pemerintah dengan masyarakat/perseorangan (G to Z). Out come dari program ini

adalah terwujudnya arsip sebagai identitas dan jatidiri bangsa yang kuat.

Hal ini tentunya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 bahwa kita harus mengarsipkan/mendokumentasikan kekayaan seni dan budaya untuk dikemas menjadi produk-produk kreatif baru dalam rangka memupuk rasa cinta tanah air dan bangga pada budaya sendiri serta untuk memperkuat jati diri serta identitas bangsa.

Imam Gunarto menyampaikan bahwa program MKB sebagai rangkaian proses mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan

pelayanan serta registrasi arsip sebagai MKB, merupakan program kolaborasi yang bersifat nasional dan internasional, baik antar pemerintah, pemerintah dengan lembaga swasta, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan masyarakat atau perseorangan. "Out come dari program ini adalah terwujudnya arsip sebagai identitas dan jatidiri bangsa yang kuat. Oleh karena itu arsip sebagai MKB ini harus diinterpretasikan dalam pemaknaan yang dinamis, bukan statis. Arsip itu tidak dilihat sebagai entitas kebendaan yang dikeramatkan, tetapi harus dikelola sebagai data informasi yang membentuk pengetahuan yang terus dinamis

memenuhi kebutuhan kekinian dan masa depan. Program MKB haruslah mampu memasadepankan masa silam. Arsip harus menjadi penerang, menjadi inspirasi, mencerahkan dan mencerdaskan,” terang Imam Gunarto.

Lebih lanjut Imam Gunarto menambahkan bahwa dalam konteks warisan dokumenter atau arsip sebagai memori kolektif bangsa, ANRI merupakan representasi negara yang harus hadir dan mempersiapkan ekosistem agar praktik dan produk kearsipan sebagai bagian dari kebudayaan dapat dipandang sebagai produk yang dinamis, yang terus menerus dapat diaktualisasi dalam konteks jaman yang berkesesuaian.

Sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia, serta optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa, maka ANRI beserta para pemangku kepentingan memiliki program registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Makna dari registrasi Arsip di sini adalah pencatatan arsip yang telah memenuhi kriteria ke dalam register memori kolektif bangsa yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai MKB bertujuan untuk, pertama membangun basis data Arsip MKB yang memiliki nilai nasional dan universal. Kedua, mendorong upaya



Kepala ANRI, Imam Gunarto

peningkatan akses universal terhadap Arsip. Kemudian tujuan dari program registrasi arsip ini yakni sebagai upaya menyelamatkan dan melestarikan Arsip dari risiko musnah atau hilang yang disebabkan oleh faktor alamiah atau faktor manusia. Selain itu, program registrasi arsip dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip yang awalnya hanya diketahui secara terbatas menjadi pengetahuan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Kriteria Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB terdiri atas kriteria utama dan kriteria pelengkap. Kriteria utama terhadap Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB terdiri atas signifikansi sejarah, bentuk dan corak; serta signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas.

Signifikansi sejarah yakni meliputi : pergerakan politik, ekonomi, sosial atau spiritual, tokoh terkemuka dalam

sejarah bangsa Indonesia, peristiwa penting yang mengubah bangsa Indonesia. Kemudian tempat spesifik yang memiliki nilai penting, adat istiadat tradisional, hubungan dengan negara lain, komunitas lain, antar daerah, antarprovinsi, antarsuku, atau antardesa. Selain itu, yang termasuk bagian signifikansi sejarah yakni mencakup perubahan struktur kehidupan dan budaya, titik balik dalam sejarah, atau inovasi penting serta memiliki keunggulan dalam seni, sastra, sains, teknologi, olahraga, atau bagian lain dari kehidupan dan budaya.

Arsip dapat dikategorikan sebagai MKB apabila memiliki bentuk dan corak. Bentuk dan corak yang dimaksud meliputi memiliki nilai unggul dalam hal estetis, corak, atau bahasa tertentu. Kemudian, cara penyampaian melalui kebiasaan atau khas daerah tertentu atau dapat menjadi contoh

LAPORAN UTAMA

format atau media rekam arsip yang terancam atau sudah tidak ada lagi keberadaannya.

Kriteria utama bahwa arsip dapat masuk ke dalam kategori MKB apabila memiliki signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas di mana arsip ini merupakan Arsip pada periode masa lalu yang fisik atau informasinya memiliki hubungan secara emosional dan spiritual terhadap kehidupan manusia pada periode masa kini yang berhubungan dengan tokoh, komunitas dan/atau peristiwa penting tertentu. Hubungan secara emosional dan spiritual dimaksud merupakan hal yang sifatnya disucikan, memiliki nilai mistik, atau dipuja oleh golongan atau komunitas tertentu.

Kriteria pelengkap terhadap Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB meliputi: keunikan dan kelangkaan, integritas; dan/atau kondisi. Keunikan dan kelangkaan yang dimaksud merupakan jenis atau corak Arsip dengan media tertentu yang selamat dari kemusnahan atau contoh unik dan/ atau langka ketika mewakili jenis dan periodenya secara fisik dan informasi, atau penanda pada zaman tersebut. Kemudian integritas yakni meliputi Arsip yang harus terjaga kelengkapan dan keutuhannya dari upaya pengurangan, penambahan, dan/atau perubahan informasi maupun fisiknya. Selanjutnya kondisi yang dimaksud meliputi kondisi fisik dan informasi arsip masih dapat diakses.

Sementara itu, DR. Dudi Hidayat, M.SC mantan Ketua Komite MOW



DR. Dudi Hidayat, M.SC
mantan Ketua Komite MOW

Indonesia menyampaikan bahwa untuk membantu akses warisan dokumenter perlu dilakukan registrasi terhadap kekayaan warisan dokumenter tersebut termasuk arsip naskah kuno yang pada umumnya terancam punah yang ada di seluruh tanah air Indonesia ini menjadi suatu memori kolektif bangsa atau MKB yang mempunyai nilai-nilai universal yang dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk generasi mendatang registrasi warisan dokumenter yang berbentuk arsip yang akan diusulkan menjadi memori kolektif bangsa ini tentu saja harus memenuhi beberapa kriteria yang mempunyai dampak secara nasional, terlebih memiliki dampak regional dan internasional. “Hasil registrasi arsip yang memenuhi kriteria ini sebagai memori kolektif bangsa dan mempunyai nilai-nilai universal yang berdampak secara regional dan atau internasional dapat diusulkan lebih lanjut sebagai memori of the world melalui komite nasional MOW

Indonesia, tentunya setelah melalui proses seleksi”, ungkap Dudi Hidayat dalam peluncuran program registrasi arsip sebagai MKB (Tanggal/bulan).

Dudi Hidayat menambahkan bahwa melalui MKB banyak dihasilkan daftar warisan dokumenter berupa arsip seluruh penjuru tanah air yang mempunyai dampak secara nasional dan bahkan sampai berdampak global internasional sehingga nanti layak untuk diusulkan sebagai ingatan kolektif dunia, Memori of The World. “Yang terpenting kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai registrasi MKB saja, tetapi bagaimana tindak lanjut setelah arsip diakui sebagai memori kolektif bangsa apa yang akan kita lakukan dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa dan generasi mendatang”, tambahnya.

Sementara itu menurut sejarawan sekaligus Dewan Pakar Memory of the World Indonesia, Mukhlis PaEni menyampaikan bahwa Arsip memegang peranan penting sebagai wadah penyimpanan ingatan. Arsip juga sebagai deposit ingatan masyarakat karena itu melestarikan arsip sama halnya memelihara memori kolektif bangsa. “Nah seperti saya katakan tentu hanya arsip-arsip yang penting yang memegang peranan penting karena itu perlu pula dilakukan seleksi terhadap arsip mana yang mempunyai bobot sebagai arsip yang bisa diajukan predikat memori kolektif bangsa. Saya katakan begitu karena bahwa tidaklah semua dokumen dapat disebut bernilai tinggi, ada juga arsip yang mencakup aktivitas

yang terbatas, lingkup kegiatan terkandung di dalamnya menyangkut scope special yang terbatas. Ada juga yang memiliki informasi yang berdampak jauh melampaui wilayah dan teritorialnya. Dan di pihak lain ada arsip yang informasinya tidak hanya mencakup zona wilayah tapi juga berdampak luas melampaui batas-batas Negara”, terang Mukhlis PaEni.

Mukhlis PaEni menambahkan bahwa MKB sesungguhnya adalah sebuah deposit arsip yang memuat informasi yang beraneka rupa tentang sebuah peristiwa, tentang masa lampau, yang bukan dimiliki individu, tapi milik orang banyak, milik warga dari sebuah negara. Arsip semacam itu mutunya sangat tinggi, itulah sebabnya arsip semacam ini perlu dijaga kelestariaanya.

“Kepada saya diberikan highlight dari hasil survey yang sudah masuk di Arsip Nasional. Ini sekian banyak yang diberikan kepada saya dan isinya sangat menarik. Tetapi, saya lihat maaf tidaklah semua yang tercatat disini sesungguhnya memiliki arti penting untuk diajukan sebagai memori kolektif bangsa. Ada yang sebenarnya kita simpan saja di daerah sebagai memori kolektif dari orang-orang yang di daerah itu. Atau institusi tempat menyimpannya. Dan ini menarik yang saya katakan di sini misalnya saja, arsip mengenai perjuangan rakyat Pati pada masa itu ada 50 berkas belum diketahui isinya. Tetapi, ini sudah berpotensi untuk diajukan sebagai calon MKB”, tambahnya.

PaEni menyampaikan bahwa



Mukhlis PaEni
Dewan Pakar Memory of the World
Indonesia

Sejarah-sejarah desa menjadi sangat penting. “Jangan menganggap bahwa sejarah Indonesia itu adalah informasi tentang desa itu saja. Tetapi, sejarah desa itu bisa dihubungkan dengan sejarah desa lain yang ada di seluruh Indonesia. Dan ada benang merah antara desa satu dengan desan lainnya. Tidak hanya menjadi sumber informasi dari desa itu sendiri tetapi juga menjadi informasi yang menghubungkan dengan kegiatan antar satu desa dengan desa lainnya”, ujarnya. Kemudian PaEni menambahkan bahwa ada surat-surat keputusan pembebasan Irian Jaya yang berpotensi menjadi MKB. “Nah ini arsip sangat berharga, karena satu momentum sejarah dalam pembebasan Irian jaya seringkali tidak kita ingat pada tahun 56 itu pemerintah Indonesia mendirikan atau membentuk satu provinsi baru yang namanya provinsi perjuangan Irian

Barat. Dokumen ini sangat penting untuk MKB sebagai satu arsip yang bernilai sejarah”, tambahnya.

“Highlight dari hasil survey ini saya pikir perlu seleksi yang sangat baik. Banyak arsip yang memiliki potensi MKB. Nah saya pikir itu yang saya sampaikan. Seleksi terhadap arsip yang mempunyai bobot tinggi dan menjadi MKB sudah terlihat semua”, jelas Mukhlis PaEni.

Begitu banyak arsip-arsip berpotensi menjadi MKB. Negara wajib hadir untuk mendokumentasikan memori kolektif bangsa sebagai identitas dan jati diri bangsa yang nantinya dapat diwariskan bagi generasi mendatang. Program MKB yang diusung oleh ANRI ini bersifat inklusif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, arsip sebagai memori kolektif bangsa ini harus diinterpretasikan dalam pemahaman yang dinamis bukan statis. Arsip itu tidak dilihat sebagai entitas kebendaan yang dikeramatkan, tetapi harus dikelola sebagai data informasi untuk pengetahuan yang terus dinamis memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa depan. Program MKB harus mampu memasa depankan masa silam. Arsip harus menjadi penerang, menjadi inspirasi, mencerahkan dan mencerdaskan. **(is)**

DARI MEMORI KOLEKTIF BANGSA MENUJU INGATAN KOLEKTIF DUNIA

*.....Lembaga kearsipan Republik Indonesia
Junjung tinggi identitas bangsa
Jaga warisan nasional dan budaya
Demi kejayaan Indonesia.....*

Kalimat di atas tentu tak asing lagi bagi segenap penggiat kearsipan di Indonesia. Pada setiap acara/agenda bidang kearsipan, kalimat ini menjadi bagian yang digaungkan dalam syair Mars Kearsipan Indonesia. Tak hanya sebatas syair, kalimat tersebut memiliki makna mendalam yang sejatinya harus diinternalisasi oleh komunitas kearsipan di Indonesia. Sebuah kalimat yang kerap mengingatkan bahwa pada setiap program dan kegiatan penyelenggaraan kearsipan nasional, salah satunya bermuara untuk menjunjung identitas bangsa serta menjaga warisan nasional dan budaya.

Effendhie (2015) menjelaskan bahwa warisan budaya menjadi

sumber informasi yang dapat membawa pesan masa lampau untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Arsip menjadi salah satu contoh warisan budaya terdokumentasi yang merekam dan menginformasikan bentuk-bentuk tinggalkan budaya. Ketika suatu arsip tercipta, dapat merefleksikan muatan budaya, khususnya budaya di lingkungan tempat arsip tersebut diciptakan.

Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dapat menggambarkan kegiatan atau peristiwa tertentu yang telah terjadi. Begitu pun rekam memori atau ingatan suatu bangsa, dapat tersuguhkan melalui nilai informasi yang terkandung dalam arsip yang

diciptakannya. Catatan informasi yang terekam dalam arsip selanjutnya dapat menjadi ingatan atau memori kolektif tentang apa yang telah dialami dan dihadapi suatu bangsa dari masa ke masa.

Mengutip Seil (2010), berbicara memori kolektif bukan hanya sekadar rekaman catatan sejarah masa lalu, tapi cerita atau catatan tersebut dapat turut mempengaruhi identitas dan memberi makna kehidupan sehari-hari. Hal ini semakin menjelaskan bahwa terhadap arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional, turut merekam identitas dan jati diri bangsa yang dapat menjadi warisan budaya tertulis atau warisan dokumenter bagi generasi penerus bangsa.

Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa arsip yang merupakan warisan dokumenter bangsa Indonesia yang memiliki nilai sejarah, nilai artistik dan telah dinilai memiliki signifikansi internasional, sehingga Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Persatuan Bangsa-

Bangsa atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah mengakui arsip tersebut sebagai ingatan kolektif dunia atau Memory of the World (MoW). Khazanah arsip yang telah diakui ini antara lain, arsip Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang diakui tahun 2003, arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diakui tahun 2015, arsip konservasi Candi Borobudur dan arsip tsunami Samudera Hindia tahun 2004 yang diakui tahun 2017.

Menjadikan arsip untuk memiliki nilai signifikansi dunia tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Pengakuan dunia atas warisan budaya tertulis tersebut membutuhkan proses, upaya-upaya dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga dapat memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan oleh UNESCO. Contohnya saja pada saat penominasian arsip KAA menjadi MoW, kala itu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional), Kementerian Luar Negeri, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO dan negara-negara sponsor mencakup India, Srilanka, Myanmar dan Pakistan yang secara bersama-sama mengajukan arsip KAA untuk dinominasikan sebagai MoW.

Pada tahun 2021, ANRI mulai menginisiasi program register memori kolektif bangsa yang diharapkan nantinya akan menjadi salah satu cara yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak dalam pelestarian arsip sebagai jati diri, memori kolektif bangsa, dan warisan budaya. Program tersebut akan direalisasikan pada registrasi nasional terhadap arsip yang memiliki nilai signifikansi nasional yang kepemilikannya berada di luar ANRI. Kendati demikian, pengakuan nasional atas warisan

dokumenter dalam program memori kolektif bangsa bukan menjadi satu-satunya tujuan utama. Di balik itu terdapat makna, standar dan kriteria yang harus menjadi kesepahaman bersama, sehingga tujuan pelestarian arsip sebagai jati diri, memori kolektif bangsa dan warisan bangsa dapat dicapai dengan utuh dan menyeluruh.

Registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa terdiri dari berbagai rangkaian. Pada pelaksanaan Pekan Memori Kolektif Bangsa yang digelar ANRI pada Agustus 2021, Kepala ANRI, Imam Gunarto menerangkan bahwa program memori kolektif bangsa terdiri dari rangkaian proses, antara lain mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan pelayanan serta registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu arsip berhasil teregistrasi sebagai memori kolektif bangsa, maka terdapat berbagai serangkaian proses yang terdiri dari persyaratan, standar dan kriteria yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemangku kepentingan yang terlibat.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang dapat dipedomani bersama agar pelestarian arsip sebagai jati diri, memori kolektif bangsa dan warisan bangsa melalui program memori kolektif bangsa dapat dicapai secara komprehensif. Saat ini, ANRI sebagai lembaga yang menginisiasi program memori kolektif bangsa, tengah menyusun kebijakan tersebut untuk menjadi “batu pijakan” bersama bagi para pemangku kepentingan yang terlibat. Prosedur, standar dan kriteria penominasian warisan dokumenter sebagai MoW yang ditetapkan UNESCO dapat menjadi acuan untuk diadaptasi dalam program memori kolektif bangsa, dengan menyesuaikan pada wilayah yuridiksi (dalam skala nasional) dan keunikan atau ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia.

Hadirnya program memori kolektif bangsa diharapkan menjadi salah satu jawaban dalam menghadirkan informasi dan pengetahuan yang bernilai guna nasional bagi masyarakat Indonesia. Program ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap arsip yang awalnya hanya diketahui secara terbatas menjadi pengetahuan bersama dengan nilai signifikansi nasional. Apalagi ditambah dengan penyediaan kemudahan akses arsip yang juga turut memanfaatkan dan menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, jaminan aksesibilitas publik diharapkan semakin mudah untuk mengakses arsip yang telah teregistrasi atau menjadi bagian dalam basis data memori kolektif bangsa. Portal Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang saat ini dikelola ANRI, bisa menjadi salah satu medium yang dapat dioptimalkan untuk aksesibilitas arsip yang nantinya telah teregistrasi menjadi memori kolektif bangsa.

Kendati demikian, terdapat hal yang harus menjadi perhatian agar jalan menuju keberhasilan pelestarian arsip sebagai jati diri, memori kolektif bangsa, dan warisan budaya menjadi memori kolektif bangsa dapat dicapai. Kesadaran terhadap arsip dan implementasi tertib arsip di setiap pencipta arsip termasuk komunitas turut menjadi salah satu kunci. Sebagai contoh sederhana, jika suatu arsip yang disinyalir memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional, tetapi masih belum memiliki daftar arsip, maka tidak menutup kemungkinan, ketika dilakukan pencarian kembali atau akses terhadap arsip akan menjadi sulit. Oleh karenanya, komitmen dan kebijakan pimpinan lembaga atau organisasi; penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip serta ketersediaan



sumber daya kearsipan turut menjadi keberhasilan penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Selain itu, teregistrasinya suatu arsip sebagai memori kolektif bangsa, juga tak lepas atas usaha strategi preservasi terhadap arsip yang dilakukan oleh para pemilik arsip (seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan). Program ini pun berpotensi menjadi salah satu cara penyediaan “ruang” keterlibatan publik, termasuk komunitas untuk berpartisipasi aktif menyediakan informasi dan pengetahuan berbasis arsip berdasarkan tema tertentu, seperti misalnya tema tentang suatu inovasi strategis, keunggulan dalam seni, sastra, sains, teknologi, budaya atau olahraga dengan signifikansi nasional. Tema-tema tersebut dapat menjadi tema-tema publik yang dapat diminati masyarakat dan memiliki kebermanfaatan seperti

dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air.

Pencapaian nilai kebermanfaatan dalam arsip sebagai bentuk memori yang diwariskan juga dapat disertai dengan penggunaan cara-cara baru dan menarik serta pemanfaatan platform media digital dalam sosialisasi dan penyajian arsip yang teregistrasi sebagai memori kolektif bangsa. Dengan demikian, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam arsip atau warisan dokumenter dapat menguatkan kecintaan dan kebanggaan bagi berbagai kalangan, khususnya generasi muda terhadap bangsanya.

Seiring perkembangan waktu, warisan dokumenter milik bangsa Indonesia terus akan bertambah. Warisan dokumenter tersebut pun mungkin tidak hanya memiliki nilai guna nasional, namun juga berpotensi

mengandung signifikansi internasional. Dengan adanya program memori kolektif bangsa pun diharapkan dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi warisan dokumenter bangsa Indonesia yang dinilai memiliki signifikansi internasional, sehingga dapat dinominasikan sebagai ingatan kolektif dunia (MoW). Dengan demikian, warisan dokumenter atau budaya tertulis bangsa Indonesia yang dinilai memiliki nilai-nilai universal berskala internasional dapat memberikan mafaat bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Di mana pelestarian arsip dan penominasiannya pun membuka kolaborasi semua entitas, termasuk peran serta masyarakat yang bermula dari registrasi sebagai memori kolektif bangsa menuju pengakuan UNESCO sebagai ingatan kolektif dunia. (TK)

PENYELAMATAN ARSIP COVID-19 SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

C COVID-19 bukanlah kasus pandemi pertama di Indonesia. Salah satu pandemi terbesar dunia yang pernah terjadi adalah Flu Spanyol pada tahun 1918. Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia Belanda tidak terlepas dari wabah mematikan tersebut. Dilansir dari www.covid19.go.id, para peneliti dan sejarawan meyakini wabah Flu Spanyol menewaskan 20 sampai 100 juta orang dalam dua tahun, yakni antara tahun 1918 dan 1920. Bahkan disebutkan dalam riset jurnalis BBC World Service Fernando Duarte, Flu Spanyol menewaskan lebih banyak orang daripada korban Perang Dunia I.

Kini, masyarakat dunia termasuk Indonesia dihadapkan kembali oleh pandemi dahsyat yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu Coronavirus disease 2019 (COVID-19). COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan

2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia.

Penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah serta lintas negara ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Sejak ditetapkan kedaruratan kesehatan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Pusat

sendiri telah mengeluarkan berbagai regulasi yang terkait penanganan pandemi COVID-19, di antaranya dari aspek Anggaran dan Pengadaan Barang dan jasa, Aparatur Sipil Negara, Imigrasi, Jasa Keuangan, Keamanan dan Pertahanan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pasar Modal, Transportasi, Tata Kelola Lembaga Pemerintahan, Perpajakan dan Bea Cukai, Perdagangan dan Perindustrian, Peradilan, Pendidikan, serta Penanaman Modal.

Banyaknya regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 perlu direkam dan diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran dunia. Rekaman dari instansi pemerintah dalam penanganan COVID-19 tersebut menjadi warisan dokumenter dalam konteks pengurangan dan manajemen risiko bencana. Warisan dokumenter

juga merupakan sumber daya penting untuk memberikan perspektif historis mengenai upaya pemerintah maupun warga negara dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai bagian dari pelestarian dan aksesibilitas arsip termasuk arsip dalam bentuk digital. Atas latar belakang tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada SE tersebut disampaikan bahwa pencipta arsip dalam hal ini instansi pemerintah melakukan penyelamatan arsip penanganan covid-19 dengan beberapa tahapan, dimulai dari persiapan, pendataan dan identifikasi arsip, penataan dan pendaftaran arsip, verifikasi atau penilaian arsip, dan penyerahan arsip statis.

Dalam pelaksanaannya, pencipta arsip diminta untuk berkoordinasi dengan ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional. Dalam hal ini, ANRI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan daftar arsip dan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 yang nantinya hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri PANRB.

Tidak hanya arsip terkait dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19, dalam SE Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 juga disebutkan kriteria arsip penanganan COVID-19 yang perlu diselamatkan, di antaranya arsip yang tercipta dalam rangka

pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengawasan, penerahan sumber daya, pelaporan, arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, serta arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana atau infrastruktur, pengobatan atau vaksin, perawatan pasien, serta penggunaan teknologi dan hasil riset.

Pernyataan untuk mendokumentasikan rekaman kegiatan dalam penanganan COVID-19 juga dikeluarkan oleh *International Council of Archives* (ICA) bersama *International Conference of Information Commissioners, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), ARMA, *Committee on Data of the International Science Council, Digital Preservation Coalition, Research Data Alliance*, dan *World Data System*. Mereka mengeluarkan pernyataan dan menyerukan kepada pemerintah, bisnis, dan lembaga penelitian di seluruh dunia untuk mendokumentasikan keputusan serta transaksi mereka di waktu sekarang dan untuk masa depan. Terdapat tiga tindakan yang diserukan, yakni keputusan-keputusan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, arsip dan data harus diamankan dan dilestarikan di semua sektor, serta kemananan, pelestarian, dan akses ke konten digital harus difasilitasi selama penutupan (*shutdown*).

Penyelamatan Arsip Penanganan

COVID-19 menjadi perhatian pada pertemuan tahunan lembaga kearsipan se-Asia Tenggara tahun 2021. Pada kegiatan Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives (SARBICA) International Seminar 22nd General Conference dan 23rd Executive Board Meeting "*Safeguarding the Archives: Memory, Pandemic, and Technology*" di ANRI, disampaikan bahwa informasi tentang pandemi COVID-19 ke depan akan menjadi memori kolektif dunia yang dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi mendatang.

Arsip penanganan COVID-19 merupakan sebuah warisan dokumenter yang layak dijadikan sebuah memori kolektif bangsa (MKB) pentingnya rekaman peristiwa dan semua yang telah dilakukan instansi pemerintah dalam menangani pandemi. Selanjutnya, arsip penanganan COVID-19 sebagai MKB tersebut tidak terpisahkan dari memori dunia.

Banyaknya aspek yang terdampak oleh pandemi COVID-19, menjadi tantangan sendiri bagi lembaga kearsipan untuk mendokumentasikan arsip-arsip yang dihasilkan dari setiap kegiatan. Identifikasi pencipta arsip juga tidak hanya dalam lingkup pemerintah, tetapi juga sampai pada komunitas-komunitas kearsipan. Peran serta masyarakat juga perlu diberikan ruang memori melalui pembangunan sistem informasi yang menunjang skema sumber informasi (*crowdsourcing*) yang dikelola oleh pemerintah. (sa)

Gayatri Kusumawardani

MENGULIK ARSIP TENTANG BENDUNGAN, WADUK, DAN BENDUNG YANG TERSIMPAN DI ARSIP NASIONAL RI

Masih lekat dalam ingatan, jebolnya Bendungan Situ Gintung di daerah Ciputat., Tangerang Selatan. Kejadian 12 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Maret 2009 masih melekat di ingatanaku karena ketika itu rumahku masih di daerah Rempoa yang dekat dengan daerah dimana Bendungan Situ Gintung berada. Efek dari kejadian tersebut sangat dahsyat karena menimbulkan kemacetan yang sangat parah di daerah Ciputat selama hampir 1 bulan dan menyebabkan aku dan suamiku harus berjalan kaki sejauh hampir 5 km selama 1 minggu.

Membicarakan tentang bendungan, bangunan infrastruktur tersebut seperti dianggap bangunan yang biasa saja. Namun sebenarnya, bendungan sangat dibutuhkan sebagai pengendali pengairan yang berfungsi untuk irigasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pencegah banjir, bahkan untuk rekreasi atau tempat wisata. Bendungan memang termasuk dalam salah satu bangunan infrastruktur yang di era pemerintahan Jokowi sedang digalakkan pembangunannya terutama untuk

irigasi. Sebenarnya, selain bendungan orang juga mengenal waduk. Waduk adalah bagian dalam atau kolam dari bendungan. Sayangnya tidak banyak yang tahu tentang bendung. Aku pun tidak akan tahu istilah itu kalau tidak menyusun Guide Arsip Infrastruktur: Bendungan, Waduk, dan Bendung 1856-1999 tahun anggaran 2021 ini.

Ya, aku jadi banyak belajar tentang istilah-istilah bendungan, waduk, dan bendung. Aku dan tim banyak berdiskusi dengan pakar bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Definisi bendungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan besar yang pertama kali dibangun di Indonesia adalah Bendungan Nglangon di Jawa Tengah (1910-1916), disusul Bendungan Prijetan di

Jawa Timur (1911-1917), Bendungan Tempuran di Jawa Tengah (1914-1916) serta Bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Cileunca di Jawa Barat (1922). Sebelum dibangunnya bendungan ini, yang ada hanya waduk-waduk kecil, waduk lapangan, embung (embung adalah cekungan yang dibangun untuk menampung air hujan yang mempunyai fungsi menjaga kualitas air tanah dan mencegah banjir), dan bendung.

Definisi Bendung menurut **Standar Perencanaan Irigasi: Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama KP 02 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi dan Rawa Tahun 2013**, adalah bangunan air yang kelengkapannya dibangun melintang sungai atau sudetan, dan sengaja dibuat untuk meninggikan muka air dengan ambang tetap sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke jaringan irigasi. Kelebihan airnya dilimpahkan ke hilir dengan terjunan yang dilengkapi dengan kolam olak

KHAZANAH

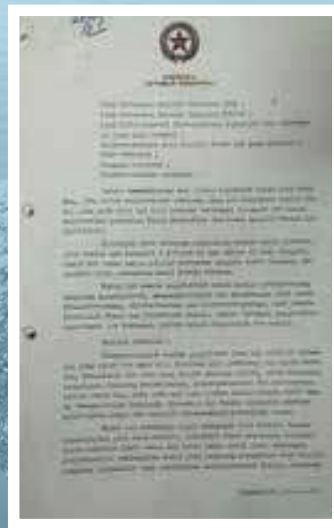
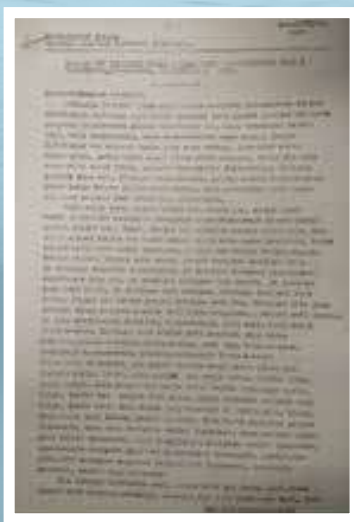
dengan maksud untuk meredam energi. Bendung yang dibangun pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda adalah bendung di delta Sampean di Situbondo, Jawa Timur.

Intinya, bendungan lebih besar dan kokoh daripada bendung, dan fungsi bendungan lebih banyak dan kompleks dibanding bendung. Katulampa di Bogor adalah salah

satu contoh dari bendung bukan bendungan. Fungsi bendung hanyalah untuk menahan banjir dan biasanya sungai atau kali dibendung untuk menahan banjir dengan bendung. Bendungan dan bendung sama-sama mempunyai pintu air, tetapi pintu air bendungan lebih besar dibanding bendung.

Arsip-arsip tentang bendungan,

waduk dan bendung yang ada dalam khazanah Arsip Nasional RI yang sudah diolah menjadi sarana bantu penemuan kembali, jumlahnya lumayan banyak. Dalam guide tentang bendungan, waduk dan bendung terdapat lebih dari 600 nomor arsip yang terdiri dari arsip tekstual, foto, film dan kearsitekturan. Dimulai dari periode Hindia Belanda



Naskah pidato atau sambutan dari Presiden Sukarno pada kunjungan Proyek Jatiluhur, Purwakarta, 19 September 1959 (foto sebelah kiri) dan Pejabat Presiden Suharto pada upacara peresmian Waduk Serba Guna dan Pusat Listrik Tenaga Air Jatiluhur, 26 Agustus 1967 (foto tengah dan sebelah kanan). Kedua naskah pidato ini merupakan bagian dari Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara.

sampai dengan Republik. Untuk Periode Hindia Belanda, arsip tentang bendungan, waduk, dan bendung paling banyak bisa ditemukan di Inventaris Arsip Tekstual Departement van Burgelijke Openbare Werken Series Grote Bundel 1854-1933 dan Inventaris Arsip Departement van Verkeer en Waterstaat untuk arsip tekstual dan Daftar Arsip Foto KIT (Koninklijke Instituut voor de Tropen) untuk arsip foto. Sementara untuk Periode Republik, arsip

tekstual tentang bendungan, waduk, dan bendung dapat ditemukan di Inventaris Arsip Departemen Pekerjaan Umum RI 1950-2004 dan Inventaris Arsip Perusahaan Umum Jasa Tirta I. Untuk arsip foto Masa Republik bisa ditemukan di Daftar Arsip Foto Kementerian/ Departemen Penerangan.

Dari data yang dihasilkan dari pengumpulan data dan informasi arsip, dapat disimpulkan bahwa bendungan, waduk, dan bendung

dari tahun 1856 sampai dengan tahun 1999 paling banyak terdapat di Pulau Jawa, meskipun di luar Jawa pun ada tetapi jumlahnya tidak sebanyak di Pulau Jawa. Sehingga aroma Jawa Centris pun sangat kental. Namun seperti diketahui bahwa salah satu program unggulan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur secara besar-besaran terutama pembangunan bendungan, waduk, dan bendung dengan tujuan untuk ketahanan pangan Indonesia



Foto Bagian dari Bendungan Jatiluhur
(Sumber: Inventaris Arsip Foto Deppen RI 1966-1967)

sehingga aroma Java Centris dalam pembangunan bendungan, waduk, dan bendung ini dapat dihilangkan.

Di dalam bundel arsip yang tersimpan di Arsip Nasional, terdapat cetak biru bendungan, waduk, dan bendung serta peta, bahkan ada foto pembangunan bendungan, waduk atau bendung tersebut. Mengulik dan mempelajari tentang bendungan, waduk, dan bendung sangatlah menarik terutama ketika membaca dan melihat arsip-arsipnya, karena dibalik dibangunnya sebuah bendungan, waduk, dan bendung tentunya ada banyak cerita. Seperti misalnya manfaat dari dibangunnya bendungan, waduk, dan bendung

diantaranya menanggulangi masalah banjir, mengalir persawahan dan perkebunan dan adanya PLTA. Di dalam arsip tentang bendungan, waduk, dan bendung, terdapat catatan bahwa beberapa bendung dibangun di dekat pabrik gula yang berfungsi sebagai irigasi bagi perkebunan tebu, ada juga pemanfaatan PLTA sebagai pembangkit listrik untuk pemancar dan peralatan radio di daerah Malabar, Jawa Barat. Ternyata manfaat bendungan, waduk, dan bendung banyak dan bisa dibuktikan dengan arsip.

Sayangnya, belum semua arsip-arsip tentang bendungan,

waduk, dan bendung terkumpul di ANRI. Seperti misalkan arsip tentang laporan musibah yang ditimbulkan akibat jebolnya bendungan, waduk, dan bendung seperti kejadian di Situ Gintung dan arsip tentang permasalahan di balik persiapan pembangunan sebuah bendungan, waduk, dan bendung. Seandainya arsip tentang bendungan, waduk, dan bendung dapat terkumpul lengkap di ANRI, pasti akan lebih menarik minat peneliti untuk memanfaatkan arsip-arsip tersebut, terutama peneliti tentang bendungan, waduk, dan bendung. Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan



Bangunan Bendung (luasnya lebih kecil daripada bendungan). Gambar di atas adalah Bendung Simongan di Semarang, Jawa Tengah untuk mencegah banjir di Sungai Semarang. (Sumber: Daftar Arsip Foto KIT Jawa Tengah -Yogyakarta)



Presiden Soeharto didampingi Ibu Tien Soeharto beserta rombongan sedang meninjau kawasan proyek PLTA Saguling di Saguling, Jawa Barat, 24 Juli 1986. (Sumber: Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1966-1989)

Perumahan Rakyat perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal pembinaan arsip-arsip tentang infrastruktur (dalam hal ini bendungan, waduk, dan bendung), juga akuisisi atau penarikan arsip-arsipnya.

Kembali lagi ke ingatanku tentang Bendungan Situ Gintung, setelah aku banyak membaca arsip tentang bendungan, waduk, dan bendungan, aku pun mendapatkan pengetahuan baru kalau ternyata Bendungan Situ Gintung itu walaupun bentuknya lebih kecil dibanding Bendungan Jatiluhur, tetapi dia termasuk dalam bangunan bendungan dan sudah dibangun dari masa Hindia Belanda. Jelas saja di tahun 2009 kemarin jebol karena memang belum pernah mengalami

perbaikan ataupun renovasi yang menyeluruh. Semoga dengan tersedianya arsip tentang bendungan, waduk, dan bendung dalam khazanah ANRI dapat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk terus memperhatikan dan melakukan pemeliharaan serta perbaikan bagi bangunan-bangunan bendungan, waduk, dan bendung yang ada di seluruh Indonesia. Semoga dapat terwujud. Aamiin.



Contoh kliping koran di arsip Kementerian Penerangan 1945-49, nomor 275

Jajang Nurjaman

MENEROPONG ARSIP-ARSIP GENDER BERNILAI MEMORY OF THE WORLD

“Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong...It is time that we all perceive gender on a spectrum not as two opposing sets of ideas.”
— Emma Watson

Program Memory of the World UNESCO

Perang, pergolakan sosial, kurangnya sumber daya, penjarahan, perdagangan ilegal, perusakan dan penyimpanan yang tidak memadai adalah beberapa tantangan yang terus berdampak pada pelestarian, dan akses ke, warisan dokumenter. Seiring waktu, koleksi yang signifikan telah lenyap dan hilang dari ingatan dunia. Koleksi lainnya yang masih ada, akan ikut hilang jika tidak diambil langkah untuk melestarikannya.

Pada tahun 1992, UNESCO membentuk Program *Memory of the World* untuk melestarikan warisan dokumenter dunia, membantu akses universal, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan dokumenter. *Memory of the world register* adalah cara yang paling nyata dan terlihat untuk mencapai tujuan Program MoW dan alat yang ampuh untuk mempromosikan pentingnya pelestarian dan akses terhadap dokumen yang dijadikan

MoW. Pedoman Umum Program MoW, diterbitkan pada tahun 1995 dan diperbarui pada tahun 2002, mencakup kriteria dan proses untuk pencantuman pada daftar internasional. Register regional dan nasional didasarkan pada proses dan kriteria yang sama tetapi disesuaikan dengan keadaan regional dan nasional. Hingga Januari 2020, terdapat 426 koleksi warisan dokumenter yang tercatat dalam register internasional, termasuk 109 prasasti dari kawasan Asia-Pasifik.

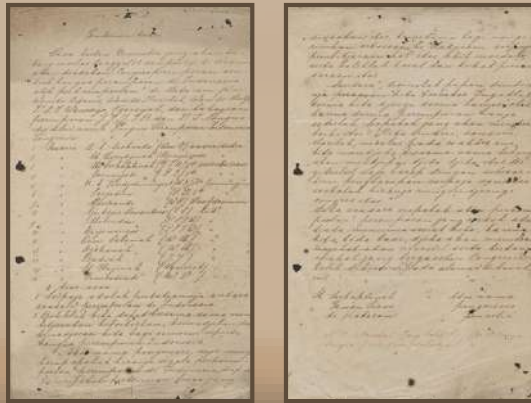
Di kawasan Asia-Pasifik, banyak lembaga memori menghadapi tantangan termasuk peristiwa iklim yang merugikan, isolasi geografis, dan kurangnya dana. The Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) didirikan pada tahun 1998 sebagai forum regional untuk mendukung Negara-negara Anggota untuk mengatasi tantangan-tantangan ini terhadap kelangsungan warisan dokumenter. Koleksi warisan dokumenter pertama tercatat dalam

register MOWCAP pada tahun 2008. Hingga Januari 2020, ada 56 inskripsi di register Asia-Pasifik. Daftar tersebut telah berhasil menyoroti pentingnya melestarikan dan menyediakan akses ke warisan dokumenter bagi para pembuat keputusan, profesional, dan publik di kawasan Asia-Pasifik.

Studi Dasar Kesetaraan Gender dari MoW di Asia-Pasifik

Kesetaraan gender adalah salah satu prioritas global UNESCO. Ini mengacu pada persamaan hak, tanggapan dan kesempatan perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kepentingan, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki harus dipertimbangkan, dengan mengakui keragaman kelompok yang berbeda. UNESCO menyerukan tindakan spesifik dan, yang sama pentingnya, integrasi perspektif gender ke dalam semua program dan kegiatan UNESCO.

Dalam konteks ini, UNESCO



Arsip Sonobudoyo No. 418

meluncurkan ‘*Gender Equality Baseline Study of Memory of the World in Asia-Pacific*’ pada 8 Maret 2020. Studi ini meninjau semua inskripsi MoW internasional dan regional dari kawasan Asia-Pasifik dengan lensa gender. *Gender Equality Marker* (GEM) atau Penanda Kesetaraan Gender yang disesuaikan dengan konteks tertentu dari inskripsi MoW diterapkan pada setiap inskripsi yang dipilih dan tingkat sensitivitas gender dari warisan dokumenter dinilai. Hanya empat item di antara total 155 prasasti dari Asia-Pasifik, ditemukan menyoroti dimensi gender atau mempromosikan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat dan sejarah. Namun dicatat bahwa lebih banyak prasasti akan memenuhi syarat untuk GEM yang lebih tinggi jika dimensi gender telah dijelaskan secara memadai dalam formulir nominasi. Salah satu rekomendasi dari studi ini adalah menerapkan strategi untuk “menginterogasi dokumen terpilih untuk kualitas GEM mereka dan menyorotinya dalam deskripsi nominasi”. GEM ini sendiri dibagi menjadi GEM 0 (tidak berkaitan dengan gender), GEM 1 (gender sensitif), GEM 2 (gender responsif), dan GEM 3 (gender transformatif).

Khazanah Arsip Gender di ANRI

ANRI yang menyimpan banyak khazanah arsip dari berbagai bentuk dan media, tentu memiliki arsip berkategori arsip gender. Dari banyak arsip berkategori gender, ada dua jenis peristiwa yang dinilai memenuhi kategori GEM dan juga memiliki nilai lebih untuk diajukan sebagai *memory of the world*, yaitu peristiwa kongres perempuan dan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirimkan ke beberapa orang sahabatnya di Belanda. Kedua peristiwa ini tercatat dalam arsip yang dilestarikan di ANRI.

1. Kongres Perempuan Indonesia

Sebagai cikal bakal dari diperingatinya Hari Ibu di Indonesia, peristiwa Kongres Perempuan Indonesia pertama menjadi sebuah loncatan sejarah bagi perempuan Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh beberapa organisasi perempuan pada abad 20, antara lain Wanito Oetomo, Wanita Katholiek, Aisah, Islamiyah, Sarekat Islam, Putri Budi Sejati dan *Mesijeskring van Jong-Java*. Kongres Perempuan Indonesia diadakan di Yogyakarta, yang diawali dari sebuah rapat di rumah Nyonya

Soewardi (Istri dari Ki Hajar Dewantara). Kongresnya sendiri diadakan di kediaman R.M. Djodipoero. Kongres ini bertujuan untuk meningkatkan posisi dan martabat para wanita bumiputra di Hindia Belanda. Kongres dipimpin oleh R.Ng. Soekonto dari Wanita-Oetomo. Diskusi yang berlangsung selama kongres berkisar tentang topik-topik aksi nyata untuk mengangkat kaum wanita bumiputra. Usulan-usulan mengenai membentuk sebuah komite yang mengurus masalah wanita bumiputra juga menjadi perbincangan.

Kongres Perempuan Indonesia pertama berhasil merumuskan beberapa keputusan. Sebuah organisasi perempuan didirikan dengan nama “Periketan Perempoean Indonesia” yang disingkat menjadi P.P.I. Anggota dari organisasi ini adalah seluruh wanita bumiputra. P.P.I berkedudukan di Yogyakarta karena banyak organisasi perempuan yang juga lokasinya di kota ini. Nyonya R.Ng. Soekonto terpilih menjadi ketua organisasi sementara R.R. Soekaptinah menjadi sekretaris. P.P.I menjalankan kongresnya setiap satu kali setahun, dan juga menerbitkan terbitannya secara berkala. Tujuan utama P.P.I adalah menggalang dana pendidikan untuk wanita bumiputra yang tidak mampu. P.P.I juga melakukan propaganda melawan pernikahan anak di bawah umur di desa-desa dan mendorong pemerintah

untuk menerbitkan aturan pelarangan pernikahan di bawah umur.

ANRI memiliki arsip yang berisi informasi mengenai kongres perempuan Indonesia, tepatnya kongres pertama dan ketiga. Arsip ini tergolong menjadi GEM 2 yaitu GEM responsif. Khazanah arsip tentang kongres perempuan meliputi:

a. Inventaris Museum Sonobudoyo/Java Institut 1909-1977 No. 418

Surat “Pemberian Tahoe” tentang Kongres Perempoean di Jogjakarta pada tanggal 24 Desember 1928 (pengumuman tentang Kongres Perempuan, organisasi peserta dan para tokoh yang berpartisipasi)

b. Ministerie van Kolonien-Mailrapporten 62x/1929, No. D49

L a p o r a n penyelenggaraan dan hasil Kongres Perempuan I (m e r u p a k a n laporan dari Hindia Belanda[terutama hasil analisis Penasihat Urusan Pribumi van der Plas] kepada pemerintah pusat di Belanda tentang Kongres Perempuan 1928). 12 Januari 1929, copy dari Nationaal Archief Belanda.

c. Inventaris Museum Sonobudoyo/Java Institut 1909-1977

No. 2220

Maklumat Pengurus Besar Kongres Perempoean Indonesia II, 15 Maret dan 12 April 1935 (berisi pengumuman dan aturan yang mengatur jalannya kongres).

2. Surat-surat Raden Ajeng Kartini

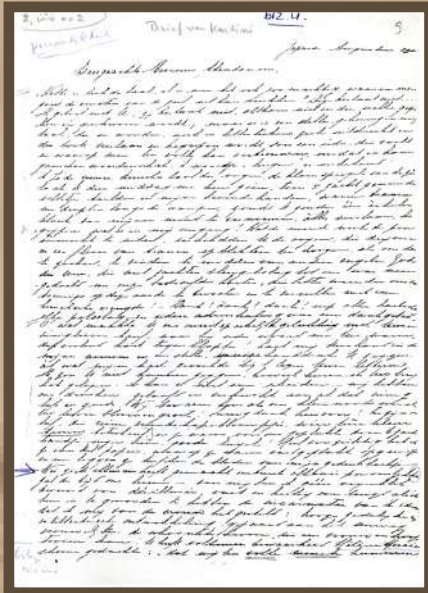
Sosok Kartini dikenal sebagai tokoh pembaharu pembawa pemikiran modern untuk wanita Indonesia. Semasa hidupnya, Kartini menjadi sentral perhatian pemerintah Hindia Belanda pada masa awal abad 20. Kemunculan sosok Raden Ajeng Kartini ditengarai menjadi agen perubahan pada sektor pendidikan dan politik perempuan. Kartini telah membuka jalan untuk membawa kaum perempuan menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda. Dalam buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”, oleh R.A. Kartini terjemahan Armin Pane yang berbunyi: “Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan didikan karena inilah yang akan membawa bahagia baginya”, menunjukkan bahwa Kartini sudah membawa isu pendidikan menjadi fondasi kokoh untuk kemajuan perempuan. Keadaan perempuan yang terkekang dengan budaya setempat,

digambarkan dengan begitu apik dalam surat-surat Kartini.

Sebut saja salah satu contohnya, Kartini dalam suratnya kepada R.A. Abendanon pada 11 Oktober 1901, Kartini menggambarkan kehidupan para perempuan di sekitarnya seperti: pingitan pada gadis-gadis yang telah dojodohkan sejak kecil, kehidupan para perempuan rumah tangga yang hanya bermalas malasan, dan dibiarkan menjadi bodoh tidak mengenyam pendidikan, sehingga Kartini bercita-cita untuk menjadi guru. Selain isu pendidikan, Kartini juga pernah menulis kepada Abendanon tentang isu sosial, misalnya surat tanggal 9 Juni 1904. Kartini dalam suratnya tersebut menyinggung pemberontakan petani di daerah Gedangan, Sidoarjo yang dipimpin K.H. Hasan Moekmin.

“Bagaimana kabarmu selama ini? Kami sering omong tentangmu setelah Anda pergi yang kebetulan disusul kabar tentang pemberontakan di Gedangan. Bagaimana perasaanmu di hari-hari itu. Menurut saya, orang itu bertingkah gila-gilaan. Sekarang Gedangan dan itu tak punya akhir.”

Surat-surat Kartini arsipnya sebanyak 28 nomor (±555 lembar kertas, 1 jilid buku, dan 8 amplop foto negatif) dilestarikan di ANRI dalam bentuk kopi dari *Koninklijk Instituut voor Taal – , Land – en Volkenkunde (KITLV)* . Khazanah ini berisi surat-surat



Arsip Sonobudoyo No. 418

Kartini periode 1901-1914 (termasuk beberapa dalam bentuk transkripsi), surat yang ditulis saudara-saudara Kartini, dan berbagai artikel tentang Kartini.

3. Khazanah Arsip Selain Kongres Perempuan Indonesia dan Surat-surat Kartini

Selain dua khazanah yang menonjol dan masuk ke dalam kategori GEM 2 dan 3, ada beberapa khazanah arsip juga yang masuk ke kategori arsip gender. Arsip-arsip yang bisa dimasukkan ke kategori arsip gender antara lain adalah arsip-arsip foto sekolah Kartini, arsip rekaman suara wawancara dengan Maria Ulfah, arsip kertas tentang pembangunan sekolah perempuan bumiputra, arsip kertas tentang pertentangan pernikahan dini, arsip-arsip tentang organisasi perempuan dari era Hindia Belanda hingga era Republik.

Salah satu contohnya adalah dari khazanah Inventaris Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949 No. 275 yang memuat kumpulan klipng koran berita dalam rangka kongres Persatuan Wanita Indonesia tanggal 14 Juni 1946 – 16 Juni 1946 di Madioen (artikel-artikel ini banyak ditulis oleh S.K. Trimoerti):

- a) Boeroeh Wanita tidak mau tinggal (6 April 1946)
- b) Poesat Pimpinan Perwari terhadap P e r s a t o e a n Perdjoengan (dalam rangka pelaksanaan konferensi Perwari tanggal 4-5 maret 1946 di Yogyakarta)
- c) Antjaman Moesoeh memperkokoh Kita, K e m e r d e k a a n , Sjarat Moethlak K e s e d j a h t e r a a n : Wedjangan Presiden dan Perdana Menteri pada Kaoem Wanita (15 April 1946)
- d) Poesat Tenaga Perdjoengan Wanita Indonesia (dalam rangka konferensi Perwari Mataram tanggal 20-21 Maret 1946)
- e) B a r i s a n Pemberontakan Rakjat Indonesia : Bagian Wanita Bergerak
- f) Sikap Kaoem Wanita Daerah Djawa Timoer
- g) Wanita didjaman Genting
- h) BPRI Wanita Malang siap

- i) Perdjoengan Wanita
- j) UNO Haroes Mengakoei Hak Kaoem Wanita
- k) Kemerdekaan dan Kedoedoekan Kaoem Wanita
- l) Poetoesan Kongres Wanita Indonesia Madioen tanggal 14-16 Juni 1946 (ada beberapa artikel yang berisi materi dan laporan jalannya acara kongres)
- m) Wedjangan Menteri Sosial (Nyonya Maria Ulfah Santoso) kepada Wanita Djokja tanggal 22 Mei 1946
- n) Kumpulan artikel yang menceritakan gerakan wanita di luar negeri tahun 1946.

Kesimpulan

Sebagai salah satu lembaga memori di Indonesia, ANRI tentu melestarikan arsip-arsip sejak Indonesia belum berdiri hingga masa Indonesia sekarang. Kekayaan khazanah ANRI yang menjadi memori bangsa Indonesia, tidak terbatas pada arsip-arsip yang menceritakan peristiwa-peristiwa heroik atau peristiwa-peristiwa kolonialisme di masa lampau. Walaupun isu-isu dan debat kesetaraan gender baru muncul di tahun 1970-an dan 1980-an, khazanah arsip di ANRI dapat melukiskan bagaimana para pelaku sejarah dari berbagai periode sudah menyuarakan kesetaraan gender dalam berbagai bentuk.



Mudanto Pamungkas
PROF. DR. KUWAT TRIYANA, M.SI.
SOSOK INOVATOR PENEMU GENOSE
ALAT PENDETEKSI COVID-19

Wabah Covid-19 telah melanda dunia sejak akhir tahun 2019. Wabah tersebut bermula di kota Wuhan, Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Tanpa diprediksi sebelumnya ternyata penyebaran Covid-19 berlangsung sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia. Covid-19 terdeteksi telah sampai di Indonesia pada bulan Maret 2020 dengan ditemukannya satu keluarga di Depok yang terjangkiti virus tersebut.

Karena penyebaran begitu cepat dan masif maka tidak ada satu negara pun yang siap untuk menghadapi virus tersebut, demikian pula dengan Indonesia. Pada kondisi serba kekurangan dan minim informasi

mengenai virus Corona pemerintah dan seluruh komponen bangsa bahu membahu untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Kondisi darurat itu yang turut memanggil Prof. Dr. Kuwat Triyana, M.Si. selaku peneliti dan akademisi dari UGM untuk turut andil mengatasi penyebaran Covid-19.

Pria yang dilahirkan di Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Februari 1967 ini sejak masa sekolah menyukai ilmu pengetahuan alam dan matematika. Oleh karena itu, begitu lulus SMA langsung mendaftarkan diri di Jurusan Fisika Fakultas MIPA UGM. Begitu lulus kuliah beliau sempat bekerja di sebuah perusahaan perminyakan asing di Jakarta. Namun

panggilan untuk menjadi pendidik dan kembali ke dunia penelitian lebih kuat. Beliau kemudian menjadi dosen di Universitas Dian Nuswantoro di Semarang sambil meneruskan pendidikan S2 di ITB. Setelah menyelesaikan pendidikan S2, bergabung menjadi dosen di Jurusan Fisika Fakultas MIPA UGM dan diberi kesempatan mengambil S3 di Jepang.

Sejak tahun 2008 Kuwat Triyana lebih memfokuskan risetnya pada penciptaan *electronic nose* alias hidung buatan. Hingga pada tahun 2016 menerima permintaan dari Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang untuk membuat alat pendeteksi halal dengan

PROFIL

menggunakan *electronic nose*. Alat tersebut hingga sekarang masih beroperasi dengan baik. Selain itu *electronic nose* buatan Prof. Kuat juga digunakan untuk mendeteksi penyakit resepsi pada bayi dengan membaui fesesnya. Cara ini lebih aman dari metode deteksi sebelumnya yang menggunakan CT scan karena organ bayi masih rapuh. Namun sayangnya program yang dikerjakan bersama RSUP Sardjito dan Fakultas Kedokteran UGM terkendala masalah dana.

Masuknya Covid-19 ke Indonesia pada awal tahun 2020 menyadarkan pemerintah dan seluruh komponen bangsa bahwa selama ini negara kita belum mempunyai mitigasi untuk menghadapi bencana pandemi. Hal itu ditandai dengan sangat kurangnya alat pendeteksi berikutan laboratorium untuk pemeriksaan *sample* penyakit. Oleh karena itu Prof. Kuat dan dr. Dian K. Nurputra dari Fakultas Kedokteran UGM sebagai peneliti terpanggil untuk andil memberikan solusi. Dalam rapat kilat pada bulan April 2020 disepakati bahwa *electronic nose* yang telah ada dikonversi menjadi pendeteksi Covid-19. Dalam pemikiran Prof. Kuat alat tersebut haruslah alat yang kompak dalam arti bentuknya ringkas, mudah dioperasikan, hasilnya cepat diketahui (tidak memerlukan pengujian laboratorium), tidak menyakitkan bagi orang yang diperiksa, dan berbiaya murah. Kombinasi kriteria di atas adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia melalui testing massal.

Proses pembuatan alat pendeteksi Covid-19 sempat terkendala karena kampus UGM memberlakukan *lockdown*, akibatnya proses pengerjaan tidak dapat dilakukan di kampus. Prof. Kuat

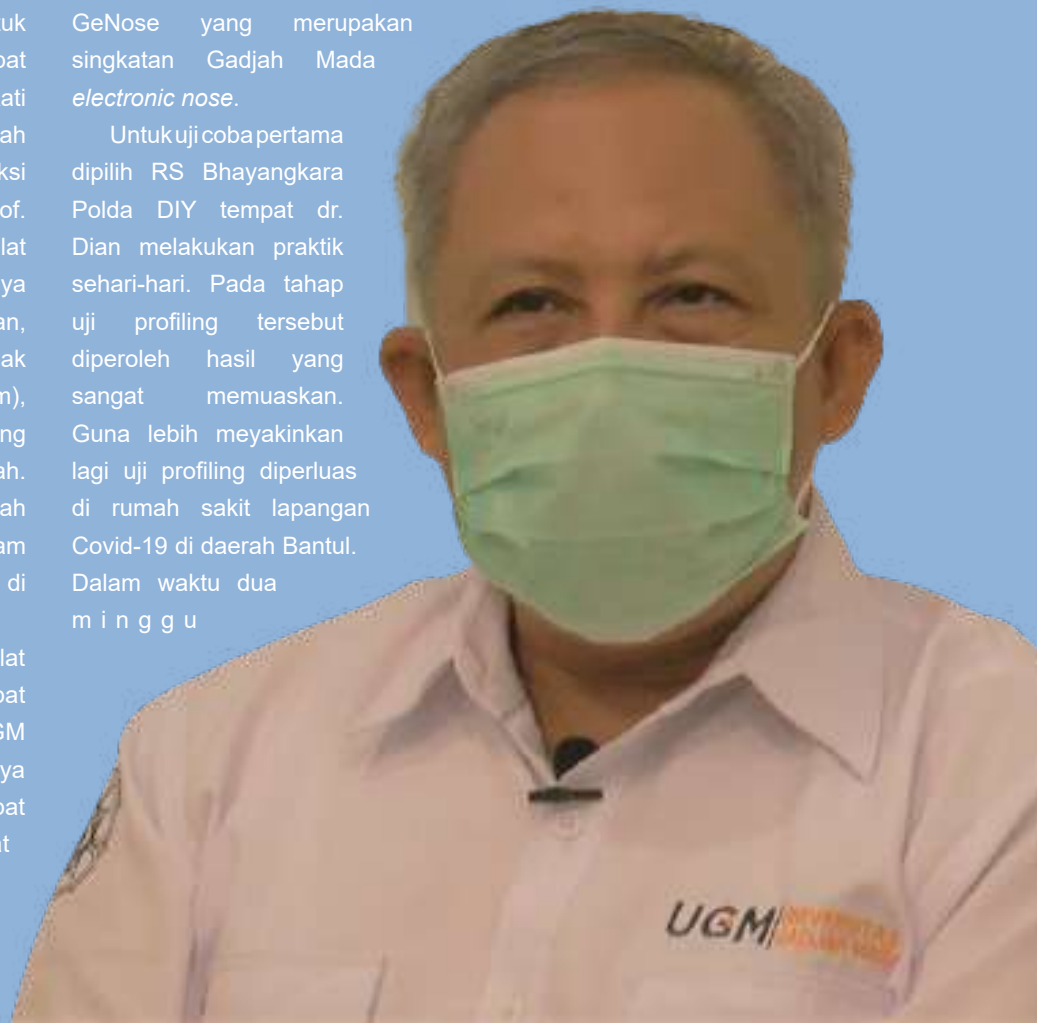
terpaksa membagi-bagi perangkat kerja kepada mahasiswanya dengan mengantar alat-alat laboratorium ke kos-kosan tim peneliti. Selain itu, minimnya dukungan dana dari pihak kampus membuat Prof. Kuat dan dr. Dian menggunakan dana pribadi untuk membiayai penelitian itu. Dalam waktu beberapa minggu alat tersebut telah selesai dirakit dan siap diuji coba.

Cara kerja dari GeNose C19 yakni pertama kita menghembuskan nafas kedalam kit sampling GeNose C19 dengan cara menarik udara dari hidung dan menghembuskannya melalui mulut. Kemudian yang kedua, sampel nafas dianalisis oleh unit GeNose C19. Selanjutnya unit GeNose C19 akan memberikan respon dalam bentuk data dari sensor yang dapat dibaca dan dianalisis oleh GeNose Ai C19 (kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*). Alat tersebut kemudian diberi nama GeNose yang merupakan singkatan Gajah Mada *electronic nose*.

Untuk uji coba pertama dipilih RS Bhayangkara Polda DIY tempat dr. Dian melakukan praktik sehari-hari. Pada tahap uji profiling tersebut diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Guna lebih meyakinkan lagi uji profiling diperluas di rumah sakit lapangan Covid-19 di daerah Bantul. Dalam waktu dua m i n g g u

telah dilakukan testing sebanyak 623 sample. Hasil dari uji profiling tersebut kemudian dilaporkan ke Kemenkes.

Guna memperoleh izin kelayakan maka alat tersebut kemudian diuji di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kemenkes di Surabaya. Pada tahap ini yang diuji antara lain mengenai kelistrikkannya, ada tidaknya arus listrik yang bocor, akurasi sensor, dan seterusnya. Fokusnya adalah pengujian pada kinerja dari alat pendeteksi Covid-19 tersebut. Setelah dinyatakan lulus, alat tersebut kemudian digunakan untuk melakukan uji diagnostik. Salah satu syarat dari uji diagnostik adalah bersifat *multi center*. Artinya pengujian dilakukan pada berbagai rumah sakit di beberapa provinsi dan pada tingkatan yang berbeda-beda. Pengujian juga dilakukan secara *triple blinded* artinya orang yang mengoperasikan GeNose dan orang yang





mengoperasikan alat pembanding (dalam hal ini PCR), dengan orang yang mengolah data itu tidak saling kenal. Kemudian hasilnya dicocokkan apakah sesuai antara hasil tes PCR dan GeNose. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh gambaran akurasi GeNose mencapai 96%, sensitivitas di kisaran 92% - 93%, sedangkan spesifisitas mencapai 98%. Setelah semua tahapan pengujian dilakukan dan dinyatakan lulus, GeNose memperoleh izin edar dari Kemenkes pada tanggal 24 Desember 2020. Dengan demikian GeNose telah dapat digunakan secara luas sebagai sarana untuk *screening* Covid-19.

GeNose di-*launching* oleh Menristek Prof. Bambang Brodjonegoro pada tanggal 20 Februari 2021. Pembeli pertama GeNose adalah BIN yang memesan sebanyak 70 unit. Guna mewadahi proses produksi GeNose maka didirikanlah PT Nano Sense Instrument Indonesia yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan yang dijalankan para mahasiswa UGM ini, selain menjual juga melayani perbaikan terhadap

GeNose yang telah digunakan para pembeli.

Prof. Kuwat menegaskan GeNose dapat bekerja secara efektif dan akurat apabila SOP diikuti secara benar. SOP tersebut menyatakan bahwa GeNose baru dapat digunakan untuk pemeriksaan 30 menit setelah diaktifkan. GeNose harus ditempatkan pada ruang yang sirkulasi udaranya baik (tidak ber-AC) dan di ruang tersebut tidak terdapat pengharum ruangan. Sang operator selama mengoperasikan GeNose juga dilarang menggunakan *hand sanitizer*. Sebab GeNose sangat sensitif terhadap bau yang ada di sekitarnya. Meski GeNose dapat membaca dalam 40 detik, namun disarankan dalam *screening* massal jeda antara pasien satu dengan pasien selanjutnya 5 menit dengan tujuan agar ruangan penampung *sample* napas pada unit GeNose19 telah bersih setelah *flushing*. Dengan demikian GeNose kurang cocok dipakai pada fasilitas umum yang mobilitas orangnya cepat dan terburu-buru. Selain itu guna hasil tes yang akurat seorang pasien sebaiknya tidak makan atau merokok 1 jam

sebelum dites.

Menurut Prof. Kuwat adanya keraguan di masyarakat terhadap efektivitas GeNose salah satu sebabnya karena adanya *hoax* yang beredar di media sosial. *Hoax* sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang menganggap GeNose sebagai kompetitor untuk produk alat kesehatan mereka. Selain itu, banyak pihak yang ingin mendanai produksi GeNose dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semata.

Sebagai ilmuwan Prof. Kuwat dan timnya selalu berinovasi. Melihat *trend* penurunan pasien Covid-19 di Indonesia. Prof. Kuwat tengah mengadakan penelitian untuk mengonversi GeNose menjadi alat pendeteksi diabetes. Dengan demikian GeNose yang telah tersebar di seluruh Indonesia tetap dapat dimanfaatkan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Institusi yang mengoperasikan GeNose bisa menyumbangkan alatnya kepada rumah sakit terdekat untuk digunakan sebagai pendeteksi diabetes.

Achmad Dedi Faozi

BELAJAR PRESERVASI ARSIP KEPRESIDENAN DARI NEGARA KABEL

Pada tanggal 26 Oktober s.d 3 November 2021, KOICA (*The Korea International Cooperation Agency*) dan NAK (*National Archives of Korea*) menyelenggarakan pelatihan kearsipan yang berlangsung selama 8 hari secara daring (dalam jaringan/*online*). *Training* yang diberi judul “*Online Training Strengthening Strategy Policy Framework and Human Resources Capacity Development for the Presidential Archive Management of the Republic of Indonesia (Indonesia)*” ini diikuti oleh 22 peserta yang diantaranya terdiri dari sepuluh (10) Arsiparis dari Kementerian Sekretariat Negara dan 12 Arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Program

ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pengambil kebijakan, pengelola arsip dan administratur dalam tata kelola pemerintahan yang berkenaan dengan arsip Kepresidenan Indonesia. *Training* ini dirancang sebagai program linier selama 3 tahun (dari tahun 2019 dan 2020) maka tahun 2021 adalah tahun ketiga program tersebut berjalan. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang penyelenggaraanya dilakukan di Korea Selatan secara *offline*. Tahun ini, *training* berjalan secara *virtual* atau *online* karena kondisi pandemi COVID-19. *Training* yang berlangsung selama 31 jam (8 hari) mulai pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB dengan tujuh belas sesi kuliah oleh para pemateri ahli dari NAK,

tiga diskusi selama perkuliahan, presentasi berupa laporan dari setiap peserta dan pembuatan rencana aksi (*Action Plan*) selama enam sesi. Pembelajaran dalam *training* ini berfokus pada metode serta keterampilan praktis dalam pengelolaan arsip statis kepresidenan secara efisien melalui proses *transferring* (akuisisi), *arranging* (pengolahan), *storing* (penyimpanan) sampai *servicing* (layanan dan pemanfaatan) terutama mempelajari fungsi utama dan desain sistem manajemen arsip digital di Korea. Selama mengikuti *training* peserta mempelajari pengelolaan arsip kepresidenan yang akan diakuisisi, cara menata arsip dalam hal penyimpanan dan kontrol

lingkungan arsip serta restorasi arsip kertas melalui beberapa video yang ditampilkan disetiap mata kuliah. Melalui kegiatan *training* ini juga para peserta dapat berbagi pengetahuan pengelolaan arsip statis serta dapat merumuskan rencana pembangunan jangka pendek/menengah/panjang proses pengelolaan Arsip Kepresidenan dengan meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan arsip kepresidenan yang mengacu pada pengalaman dari Korea.

Dalam sejarahnya pengelolaan Arsip Kepresidenan di Korea Selatan mengalami perkembangan dan pasang surut dalam pengelolaan arsip yang berbeda setiap periode yang disebabkan oleh struktur politik dan penataan arsip publiknya. Perkembangan tersebut terbagi menjadi tiga periode, antara lain : Era tidak adanya catatan publik di bawah rezim otoriter (*The era of the absence of public records under authoritarian regimes*) (1948-1993), Era penetapan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola arsip kepresidenan dibawah dua Administrasi Sipil (*The era of the establishment of the basic principle for managing presidential records under two civilian administrations*) (1993-2003), dan Era baru arsip publik di bawah pemerintahan baru (*The era of new prospects for public archives under a new government*) (2003-sekarang). Titik balik pengelolaan arsip kepresidenan di Korea ditandai dengan dibentuknya GARS (*The Government Archives & Record Service*) pada tahun 1969.

Perkembangan pengelolaan arsip kepresidenan di Korea menunjukkan hubungan yang erat dengan demokrasi politik di negaranya. Pada awalnya peraturan untuk klasifikasi dan preservasi arsip diberlakukan semata-mata untuk efisiensi bukan sebagai prinsip kearsipan dalam menjaga keutuhan arsip yang memiliki nilai sejarah. Adanya tuntutan demokratisasi dari masyarakat pada akhir tahun 1980-an, mengakibatkan pergeseran cepat dalam pengelolaan arsip publik di Korea.

Pada tahun 1997, sebuah organisasi hak-hak sipil di Korea bernama *the People's Solidarity for Participatory Democracy* (PSPD), telah meluncurkan upaya untuk memberlakukan undang-undang tentang *presidential records management*. Pada 14 April 1998, perwakilan PSPD mengajukan rencana petisi: *Act for the Preservation of Presidential Records* ke Parlemen. Melalui proses tersebut, Undang-Undang Manajemen Arsip Publik/*The Public Records Management Act* (PRMA) disahkan pada Januari 1999, diikuti dengan peraturan penegakan hukumnya pada bulan Desember di tahun yang sama. Undang-undang dan peraturan tersebut memastikan bahwa pengelolaan arsip publik didukung oleh peraturan perundang-undangan, bukan hanya peraturan administratif. PRMA tetapi juga ditujukan untuk preservasi properti arsip secara aman dan penggunaan arsip lembaga publik secara efektif. Dapat dikatakan bahwa PRMA

menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan arsip kepresidenan yang sistematis dengan mengatur definisi, ruang lingkup, pengelolaan, dan penyimpanan arsip di Korea. Hal ini juga mengharuskan GARS untuk mengumpulkan dan memelihara arsip kepresidenan yang dimulai enam bulan sebelum akhir masa jabatan presiden. Selanjutnya, PRMA mensyaratkan bahwa arsip presiden yang dihasilkan di semua tingkat badan atau lembaga publik disimpan di GARS. (Kyong Rae Lee. *Political Democracy and Archival Development in the Management of Presidential Records in the Republic of Korea*. The American Archivist).

Kebangkitan pengelolaan arsip di Korea Selatan pada pemerintahan modern diawali dengan kunjungan Presiden ke-9 Korea Selatan, Roh Moo Hyun, pada tanggal 22 Januari 2008 ke NAK. Hal tersebut merupakan kunjungan pertama setelah 60 tahun sejak tahun 1948, sehingga beliau dikenal sebagai "*President of Records*". Dalam pidatonya beliau menyatakan bahwa manajemen arsip sebagai suatu keharusan bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Presiden Roh menekankan pentingnya pengelolaan arsip statis nasional dari sudut pandang demokrasi, yang menyiratkan transformasi sistem kearsipan pemerintahan menjadi model yang lebih terbuka serta menjadi faktor katalis dalam mempercepat pengelolaan arsip kepresidenan di Korea. Presiden Roh juga membuat

¹ Julukan terbaru Negara Korea Selatan yaitu "Negara Kabel (Wired Country)", karena negara ini menempati urutan pertama untuk kecepatan jaringan internetnya di dunia yang memiliki perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dengan kecepatan ultra akses dan system download internetnya yang luar biasa. (<http://www.serbaserbikorea.com/fakta-unik-sebutan-negara-korea-selatan/>).

inovasi dengan pengelolaan arsip kepresidenan secara digital. Hal tersebut ditandai dengan PRMA yang mulai direvisi, disahkannya *Presidential Records Act* (PRA) dan meningkatkan jumlah staf NAK sebanyak tiga kali lipat. Di akhir masa jabatannya, Presiden Roh menyalin semua arsip kepresidenannya dalam bentuk elektronik dan mengautentikasi arsipnya ke NAK. (Sangmin Lee. *Presidential records issues and records innovation reversed Records and archives principles not upheld in the Republic of Korea*. RIM Research Centre, Fawoo Technology, Bucheon, South Korea). Kebijakan publikasi, preservasi, dan akses arsip diatur juga oleh PRMA. Undang-undang ini diubah sepenuhnya dengan Undang-Undang No. 8025 pada tanggal 4 Oktober 2006 dengan perubahan terakhir terjadi pada bulan November 2014. (Jungwon Yang. *Preservation and Access Policies*. Korean Government Publications: Publishing, University of Michigan Library). Selain itu, adanya badan pengawas dalam proses pengelolaan arsip kepresidenan di Korea yaitu komite yang dibentuk secara khusus (*Committee for the Presidential Records Management*)

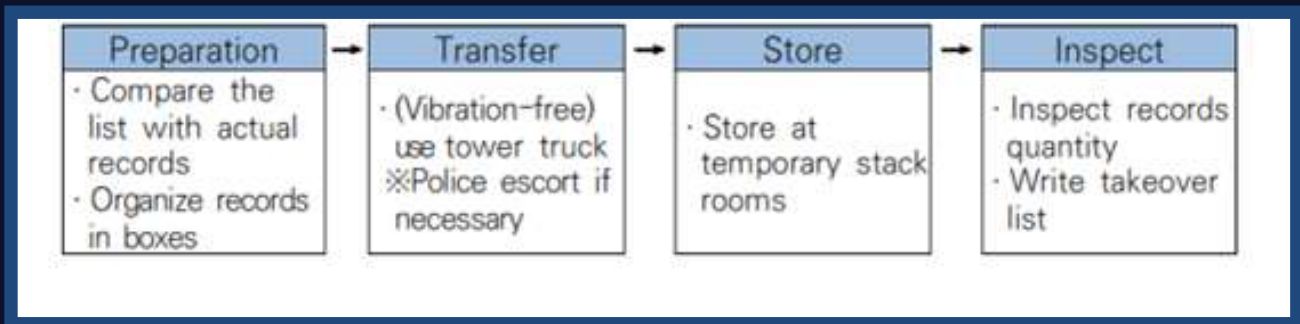
dengan sebagian anggotanya adalah warga sipil yang ahli di bidang kearsipan. Arsip Kepresidenan yang sudah diserahkan pada dasarnya terbuka untuk akses publik, namun untuk yang bersifat rahasia atau menyangkut urusan personal, dapat ditutup aksesnya selama 15 sampai 30 tahun. Arsip Kepresidenan yang sudah diserahkan akan disimpan di *NARA Repository* dan untuk keperluan edukasi sudah dibangun gedung khusus untuk menampilkan arsip kepresidenan berupa *Memorial Presidential Archives* sebagai tempat penyimpanan arsip kepresidenan sekaligus sebagai pusat edukasi dan pameran.

Adapun penjelasan mengenai sesi pelatihan Preservasi Arsip Kepresidenan yang peserta dapat dari *training* tersebut, antara lain:

Sesi *Practical methods and skills of archives management by process (transfer and arrangement)*

Sesi yang dipresentasikan oleh pemateri Im Jeong Ko menjelaskan bahwa proses pemindahan atau *transfer* arsip kepresidenan Korea dilakukan selama 6 bulan sebelum akhir masa jabatan

presiden. Landasan pembentukan arsip kepresidenan di NAK, yaitu: Lembaga Sekunder/*Assisting institution* (Sekretariat Presiden/*Presidential secretariat*), Institusi Penjaga/*Guard institution* (Dinas Keamanan Presiden/*Presidential security service*), Dewan Penasihat/*Advising institution* (Dewan Penasihat Ilmu Kepresidenan dan Teknologi, Komite Pendidikan Nasional, Konsul Sosial Ekonomi dan Ketenagakerjaan Dewan/*Presidential Advisory Council on Science & Technology, National Education Committee, Economic, Social and Labor Council*). Selain itu pada tahapan persiapan dilakukan konfirmasi jenis dan jumlah target arsip, daftar arsip dan penataannya. Adapun prosedur pemindahan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan diskusi mengenai jadwal pemindahan arsip setelah melakukan identifikasi tipe, ukuran arsip dan status organisasi. Selanjutnya adalah proses pendaftaran atau *register* pemindahan arsipnya dalam hal ini adalah arsip elektronik di PAMS (*Presidential Archives Management System*) setelah melakukan pengecekan. Bagi arsip non elektronik pendataan atau *register* di PAMS dilakukan setelah melakukan



Prosedur pemindahan dan penataan arsip di NAK
Sumber: Buku *Presidential Records and Archives Management* (Indonesia), 2021, p.111

◆ Condition Assessment - Act. & Policies

◆ ENFORCEMENT REGULATION OF THE PUBLIC RECORDS MANAGEMENT ACT

Article 31 (Examination of records preserved)
 (1) **Re-examination cycle** for archived records is as shown in **Table 14**.
 (2) The head of the records management institution shall prepare the records inspection form in **Attachment No. 7** so that the records can be inspected regularly in accordance with Paragraph 1, and inspect the records accordingly.
 (3) The head of the records management agency shall take necessary follow-up measures for the preservation of records, such as restoration and deoxidation, according to the results of the records inspection under paragraph (2).

[Table 14] Examination period(Article 31, No. 1)

Grade 1	30 years	Grade 2	15 years	Grade 3	10 years
---------	----------	---------	----------	---------	----------

Attachmet No. 7 form

Damage type	Level before & after	Damage type	Level before & after
Physical damage of paper		Brittleness of paper	
Ink fading (readability)		Contamination	
Discoloration of paper		Acidity of paper	

Tindakan dan Kebijakan penilaian kondisi Arsip di NAK
 Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021, p.128

pengecekan, penataan arsip tekstual, *audio visual*, periode arsip dan proses administratif.

Pada preservasi arsipnya, lembaga pencipta arsip dan lembaga arsip kepresidenan harus menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan arsip kepresidenan dari bencana serta akses arsip yang harus terbuka bagi publik. Pada saat lembaga pencipta arsip akan *men-transfer* ke repositori arsip kepresidenan harus ditetapkan apakah arsip yang bersangkutan terbuka bagi publik atau tidak. Pada dasarnya arsip kepresidenan yang tertutup bagi publik harus dapat diakses setelah 30 tahun dihitung sejak akhir tahun penciptaannya. Jika pembukaan tersebut dapat membahayakan keamanan negara, negara dapat menutupnya berdasarkan keputusan Komisi Khusus Arsip Kepresidenan. Begitu juga pada kegiatan preservasi

terhadap *Presidentially Designated Records* (arsip kepresidenan yang bersifat rahasia). Terdapat sejumlah arsip yang bersifat *confidential* atau rahasia yang harus ditutup dengan retensi perlindungan hingga 15 tahun, dan jika menyangkut rahasia pribadi hingga 30 tahun. Periode preservasi untuk arsip kepresidenan yang dilindungi adalah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, Semi permanen, dan permanen. Pengecualian akses dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari setidaknya 2/3 anggota DPR atau atas dasar keputusan mahkamah agung. Disamping itu terdapat juga jaminan bagi presiden sebelumnya untuk menggunakan dengan kemudahan arsip yang diciptakan selama masa jabatannya. Adapun sanksi bagi orang yang membocorkan arsip kepresidenan yang dilindungi dapat dikenakan sanksi kurungan paling lama tiga tahun.

Sesi Practice to examine the

physical state of records and the conservation process

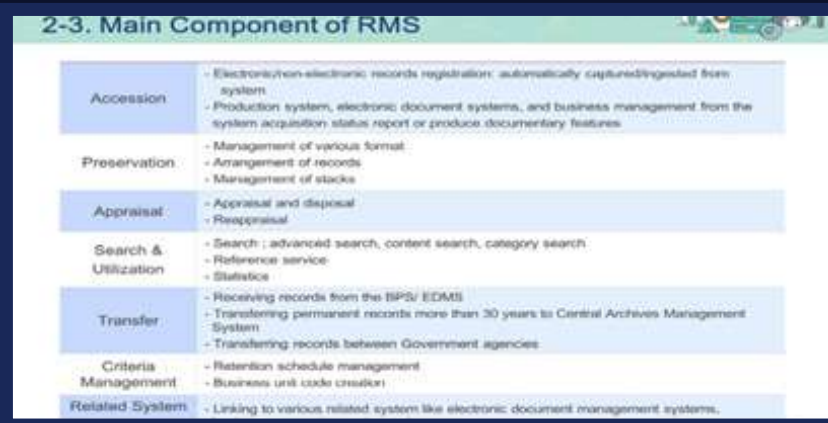
Sesi yang dipresentasikan oleh pemateri Kyu Jin Ahn menjelaskan bahwa dalam memeriksa keadaan fisik dan proses konservasi arsipnya, hal pertama yang dilakukan adalah melihat regulasi atau undang-undang pengelolaan arsip publik atau PRMA dalam pasal 31 (pemeriksaan arsip yang dipreservasi) adalah pimpinan lembaga pengelola arsip dalam menyiapkan formulir pemeriksaan arsip dalam lampiran nomor 7 agar arsip dapat diperiksa secara berkala sesuai dengan pemeriksaan ulang untuk catatan yang diarsipkan. Kepala badan pengelola arsip harus mengambil tindakan tindak lanjut yang diperlukan untuk pelestarian arsip, seperti restorasi dan deoksidasi, sesuai dengan hasil pemeriksaan arsip. Kelas 1 yaitu 30 tahun, Kelas 2 yaitu 15 tahun dan Kelas 3 yaitu 10 tahun.

Sesi Main function and design of several records/archives management system (RMS)

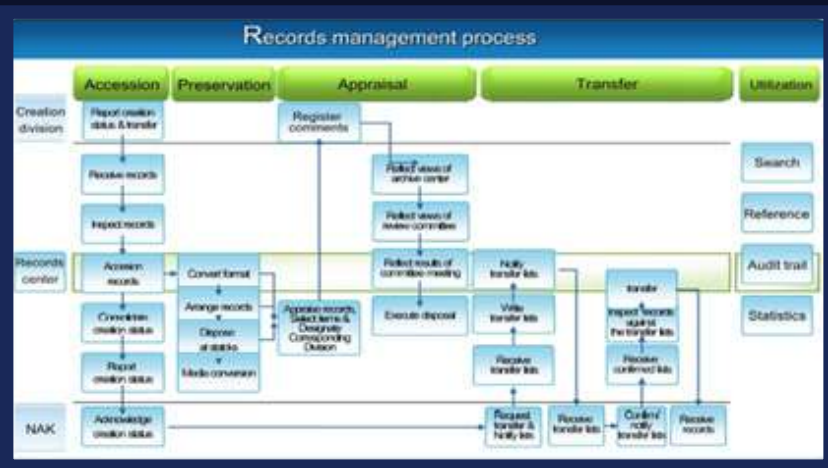
Sesi yang dipresentasikan oleh pemateri Jae Pyeong Kim menjelaskan bahwa fungsi utama dan desain sistem manajemen arsip (*records/archives management system*) (RMS) pada proses pengelolaan arsip elektronik dalam preservasi adalah pada jadwal retensi arsipnya selama 30 tahun dan permanen. Dalam sistem arsip pusat (*Central Archives System*) (CAMS) fungsinya adalah pada proses preservasinya sejalan dengan *accessioning, acquisition, preservation, search/utilization, contents management, search support* dan *appraisal*. Pada Preservasi komponen pengelolaan arsipnya adalah pada manajemen berbagai format arsip, penataan arsip, dan manajemen penyimpanan arsip. Format arsip untuk preservasi jangka panjang dari berbagai format dokumen elektronik yang sesuai dengan ISO 19005 hingga metadata file arsip elektronik/arsip metadata yang sudah tersertifikasi dengan tanda tangan penguncian (*signature of locking*).

Pada tahun 2016-2019 RMS telah dikembangkan menggunakan teknologi *cloud*. Adapun manfaat menggunakan *Cloud* adalah pada faktor sumber daya manusia menjadi lebih efisien. Dalam hal pemanfaatan sumber daya IT dengan cakupan yang lebih fleksibel. Selain itu, pada faktor pembiayaan menjadi berkurang dalam sistem dan manajemen operasinya. Hal ini menjadikan efisiensi bisnis yang meningkat dalam hal pencarian arsip di antara lembaga negara baik secara komunikasi, kolaborasi, maupun berbagi informasi menjadi terintegrasi secara lebih baik.

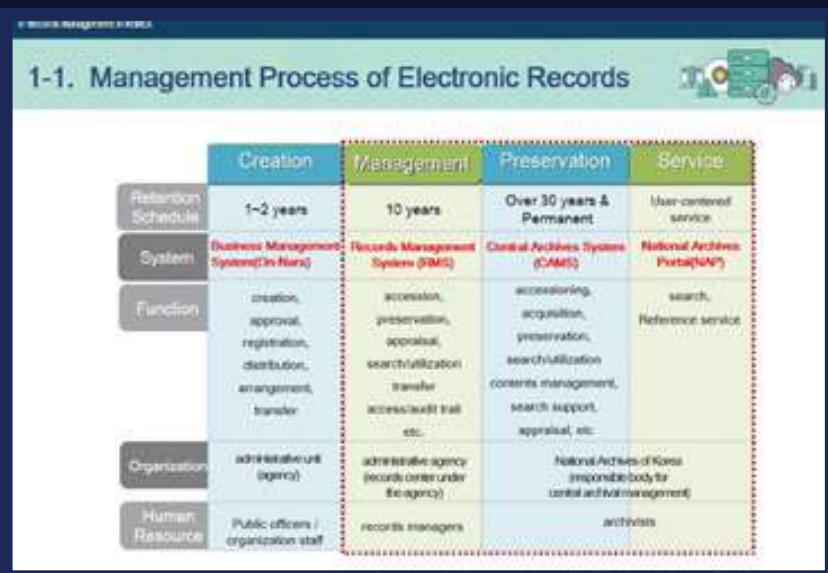
Sesi Practice of paper-based



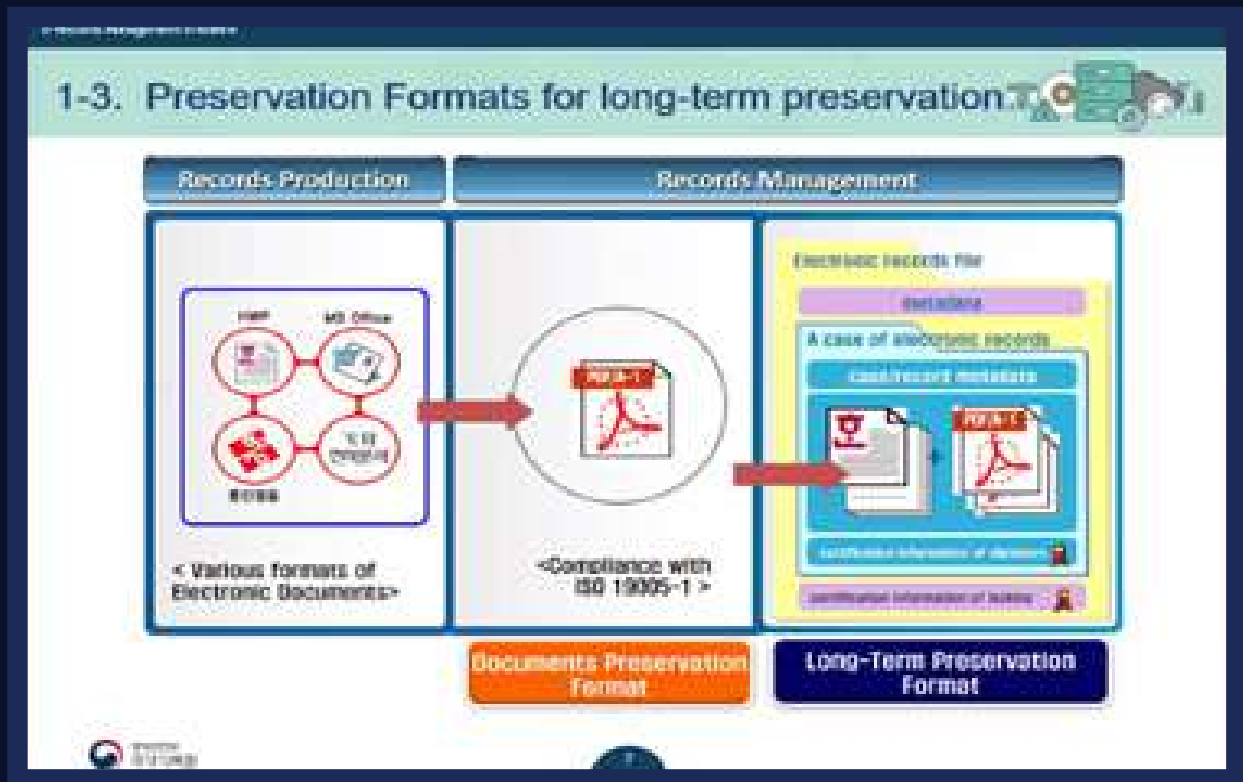
Komponen Utama RMS di NAK
Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021



Proses Manajemen Arsip di NAK
Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021



Proses Manajemen Arsip Elektronik di NAK
Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021



Format Preservasi Arsip Elektronik untuk pelestarian jangka panjang di NAK
 Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021

records restoration

Sesi yang dipresentasikan oleh pemateri Eun Hye Cho menjelaskan praktik restorasi arsip tekstual disajikan secara *virtual via channel Youtube* NAK. Proses restorasi di arsip tekstual adalah pertama memeriksa kondisi sebelum restorasi dengan mengambil foto sebelum di restorasi, mengukur ukuran kertas, mengukur ketebalan kertas, kelembapan atau ph dan kromatisitas pada kertas yang akan di restorasi. Selain itu, pada proses restorasi arsip tekstual secara darurat atau *emergency restoration* adalah mengeluarkan arsip tekstual dari suhu tempat penyimpanan, membersihkan arsipnya dengan air suling (*cleaning distill water*) dan memisahkan setiap lembar dengan kertas pendukung dan membersihkan kontaminasi setiap lembar arsipnya dengan air suling.



Proses Restorasi Arsip Tekstual di NAK

Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021



Proses Restorasi Arsip Tekstual yang Penting (Emergency Restoration) di NAK

Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021

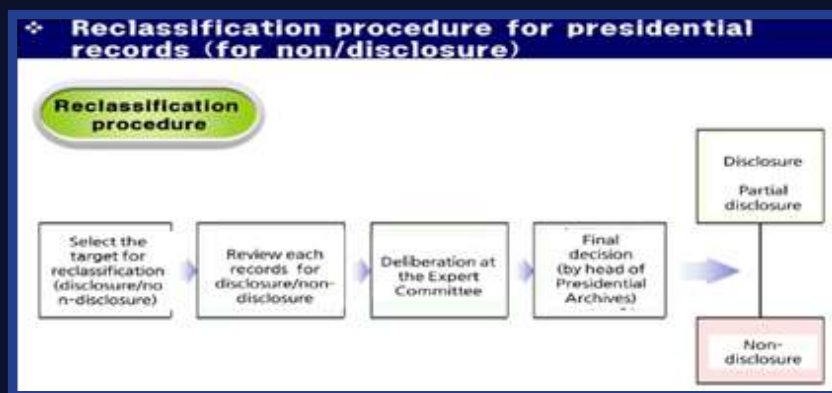
Sesi *Practical methods and skills - disclose and reclassification*

Sesi yang dipresentasikan oleh pemateri Soon Bin Kim menjelaskan bahwa proses re-klasifikasi memiliki jangka waktu 1 tahun, 5 tahun, sejak proses *transfer* dan re-klasifikasi setiap 2 tahun setelahnya. Re-klasifikasi ketika arsip telah lewat 30 tahun, re-klasifikasi 5 tahun setelahnya. Re-klasifikasi arsip yang telah ditentukan klasifikasi dan sifat proteksinya. Adapun standar klasifikasi intuk informasi *non-disclosure* adalah informasi yang dikategorikan terkait keamanan nasional, pertahanan, persatuan, hubungan diplomatik dll; informasi yang menghambat perlindungan kehidupan masyarakat, pribadi, mengganggu keamanan fisik dan lingkungan; informasi terkait pencegahan dan investigasi kasus kriminal, dakwaan dan yang dalam proses penuntutan; *Private information*, informasi tentang pengelolaan perdagangan dan kerahasiaannya terhadap perusahaan, organisasi atau individu; informasi yang memberikan keuntungan atau kerugian pribadi pada seseorang.

Prosedur re-klasifikasi pada arsip kepresidenan. Pertama memilih target re-klasifikasi (*disclosure/non-disclosure*). Kedua, melakukan *review* setiap arsip yang *disclosure/non disclosure* (pengungkapan/non pengungkapan), Ketiga, melakukan pembahasan di komite ahli. Terakhir adalah keputusan akhir (oleh kepala arsip kepresidenan) secara parsial pada arsip *disclosure* dan *non disclosure*.

Sesi *Environment control & disaster planning*

Pada sesi ini peserta melihat presentasi mengenai pengendalian



Prosedur reklasifikasi untuk Arsip Kepresidenan untuk arsip (non/disclosure) di NAK
Sumber: Buku Presidential Records and Archives Management (Indonesia), 2021

lingkungan dan *disaster planning* di NAK melalui *channel* Youtube. Adapun penjelasan dalam video tersebut adalah Nara *repository* memiliki 81 ruang depot penyimpanan dan panjangnya mencapai 237 km jika panjang rak buku disertakan. Ada pemindai gambar (*scanners*) untuk dokumen gambar berukuran besar dan peta dan terdapat pemindai buku (*robot scanner*) untuk buku yang dijilid. Saat ini di NAK arsip lebih banyak dikelola dalam sistem elektronik daripada tekstual. Beberapa arsip penting dari rekaman yang diproduksi secara elektronik direkam pada mikrofilm. Pada saat melihat arsip tekstual yang bersifat asam kita dapat melihatnya dengan tanda berwarna kuning. Setelah melakukan proses *deadification*, warna berubah menjadi ungu. Ketika magnesium oksida (MgO) ditambahkan ke arsip kertas yang diasamkan, komponen asam kertas dan magnesium oksida bereaksi secara kimia untuk menetralkan kertas.

Suhu dalam ruang penyimpanan sebesar 25 derajat Celcius, kelembaban 49,8% RH dan tekanan sekitar 1 atmosfer. Udara pada suhu dan kelembaban dalam depot penyimpanan disuplai selama 24 jam melalui saluran pendingin persegi di

langit-langit agar menjaga suhu dan kelembaban secara konstan. Saluran tersebut memfasilitasi sirkulasi udara di dalam ruang penyimpanan dan secara efektif membuang debu dari ruang tersebut. Dinding ruang penyimpanan memiliki struktur beton bertulang dan dilapisi dengan bahan epoksi yang tidak beracun untuk melindungi arsip dari zat berbahaya yang dipancarkan dari beton seperti gas alkali dan debu. Gas yang keluar untuk memadamkan api adalah gas inergen yang sebagian besar terbuat dari nitrogen dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Suhu ruangan di ruang penyimpanan arsip audio visual dipertahankan sekitar nol derajat celsius. Dalam penyimpanan arsip *films, pictures* dan *motion picture films, the photosensitive layer* (lapisan fotosensitif) terbuat dari gelatin yang dicampur dengan zat warna. Lapisan tersebut dapat berubah warna atau tidak berwarna, menyusut atau retak, karena jamur dapat muncul pada lapisan ini. Oleh karena itu, arsip *audio visual* harus disimpan pada suhu dan kelembaban rendah untuk penyimpanan yang aman. Ruang penyimpanan arsip *audio visual* bersuhu rendah berada dalam ruangan yang paling depan diantara ruang penyimpanan media lainnya.

PRESERVASI

Hal tersebut disebabkan pada saat arsip *audio visual* dibawa keluar dari penyimpanan yang dingin pada suhu 0 derajat Celcius, otomatis arsip akan mengembun pada permukaan yang dingin dan membentuk tetesan air. Oleh karena itu, arsip *audio visual* dari ruangan bersuhu 0 derajat Celcius harus secara bertahap meningkatkan suhu saat melewati ruangan sehingga ditempatkan paling depan untuk mencegah kondensasi. Tidak seperti ruang penyimpanan media lainnya, dinding dan langit-langit ruang penyimpanan audio visual dilengkapi dengan panel baja tahan karat untuk insulasi.

Nara *repository* terletak di sebuah lembah kecil di pegunungan. Dikarenakan tiga dari empat sisi bangunan bersentuhan dengan gunung, sangat berbahaya jika terjadi kebakaran maka pada bangunan tersebut dibuat sistem tirai air (*water curtain system*) yang mengeluarkan sejumlah besar air dari atap gedung ke segala arah. Dengan demikian, dapat mencegah kebakaran hutan menyebar ke ruang penyimpanan. Untuk mencegah tanah longsor atau hujan, lantai 3 *basement* dirancang sebagai tempat parkir. Dalam hal perlindungan keamanan arsip dipasang penghalang jalan dan *roadkiller* di pintu masuk gedung dengan menyertai tag RFID, apabila arsip dikeluarkan atau dibawa ke ruang penyimpanan tanpa izin, penanggung jawab dan ruang kontrol segera mengetahuinya. Dalam hal menghindari serangan dari atas atau rudal, atap ruang penyimpanan dibuat dua rangkap. Dalam menghadapi bencana gempa, fasilitas penahan getaran dipasang di setiap bangunan untuk meminimalkan kerusakan pada arsip.

Storage stacks			
F7		Stack room	Stack room
F6	Preservation treatment office space	Stack room	Stack room
F5	Scanning/micro-film room	Stack room	Stack room
F4	Audio-visual records room	Stack room	Stack room
F3	Restoration room/computer system room	Stack room	Stack room
F2	Binding room/digital media room	Stack room	Stack room
F1	Unloading space/arrangement & registration room/distribution room/stacking room	Stack room	Stack room
BF1		Stack room for audiovisual records	Stack room for audiovisual records
BF2	Machine room	Stack room for special media	Stack room for special media

Reading, exhibition, education service
Restaurant
Lecture room, auditorium
Reading room
Exhibition hall
Electrical room

The stack rooms of Nara repository are located on nine floors. Each floor is divided into three zones such as A, B, C by grouping two, three or four stack rooms into each zone.

Denah Fasilitas Gedung Penyimpanan (Repositories) di NAK
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=gy5yn3ofH0I&t=547s>



Denah Fasilitas Gedung Penyimpanan (Repositories) di NAK
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=gy5yn3ofH0I&t=547s>



Depot Penyimpanan Arsip Audio Visual di NAK
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=gy5yn3ofH0I&t=547s>



Fasilitas Preventif di Nara Repository di NAK

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=gy5yn3ofH0I&t=547s>



Fasilitas Keamanan Arsip Nara Repository di NAK

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=gy5yn3ofH0I&t=547s>

Sesi Conservation and digitalization of audio-visual records

Pada sesi ini peserta melihat presentasi mengenai konservasi dan digitalisasi arsip *audio visual* di NAK melalui *channel* Youtube. Adapun tujuan utama semua arsip harus didigitalisasi adalah untuk menyelamatkan arsip media kertas, *audio visual*, *magnetic tape*, film agar dapat digunakan dan dimanfaatkan sampai jangka waktu lama, sebagai memori kolektif serta juga sebagai

back-up dan untuk kepentingan akses.

Banyaknya jenis kaset video, terdapat juga jenis perangkat pemutarannya. Film dan video mempunyai karakter sebagai *moving image*, akan tetapi mempunyai *player* yang berbeda. Seperti halnya pada *microfilm/mikrofisce*, *negative/positif celluloid* foto, kertas foto, digital foto, kertas lembaran, peta mempunyai karakter sebagai *still image*. Media film *celluloid* lahir sekitar tahun 1900-an

yang merupakan media yang rentan rusak jika suhu dan kelembapan tidak stabil, tetapi diandalkan pada kualitas media simpannya. Harapan hidup arsip tergantung pada kualitas bahan arsip, dan tidak ada seorangpun bisa memprediksi sampai berapa lama bertahan dan hanya berusaha mempertahankan usia arsip selama mungkin. Ditambah lagi bahwa *Playback*/pemutar media using seperti *ampex 2"* dan *1" tape BCN* (sekarang sangat sedikit *playback* yang bisa dioperasikan, *playback VHS tape* (sudah *discontinue*, sulit dicari di pasaran), *playback Betacam/Digibeta* (sudah *discontinue*, saat ini masih banyak *playback* akan tetapi terancam sulit dicari di masa depan). Oleh karena itu, banyaknya jenis *playback* yang menghilang di pasaran dan lebih cepat daripada usia media itu sendiri, maka sangat penting untuk mempercepat dan mengakselerasi digitalisasi arsip sebagai upaya penyelamatan sebelum *playback* itu benar-benar menghilang.

Sistem MAM (*Media Asset Management*) merupakan sistem pengelolaan arsip audio visual digital setelah proses digitalisasi menjadi arsip analog. Sistem secara otomatis melakukan serangkaian proses mulai dari registrasi hingga layanan. Dari proses *transcoding catalog* ke *streaming* arsip (penyimpanan). Proses Restorasi file video melihat dari *scene shake*, *color problems* dan *part of image loss*. Restorasi pada file gambar fokus pada bagian yang rusak atau lubang dan masalah warna yang ekstrim. Fungsi dari operator dalam proses digitalisasi ini adalah memeriksa apakah proses pemindaian (*scanning*) berhasil dan apakah ada visual yang hilang. Proses dalam melakukan digitalisasi pada arsip film yang pertama adalah menentukan awal proses kegiatan,



Koleksi arsip kaset Video di NAK
 Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=CXH9r_LMYFA

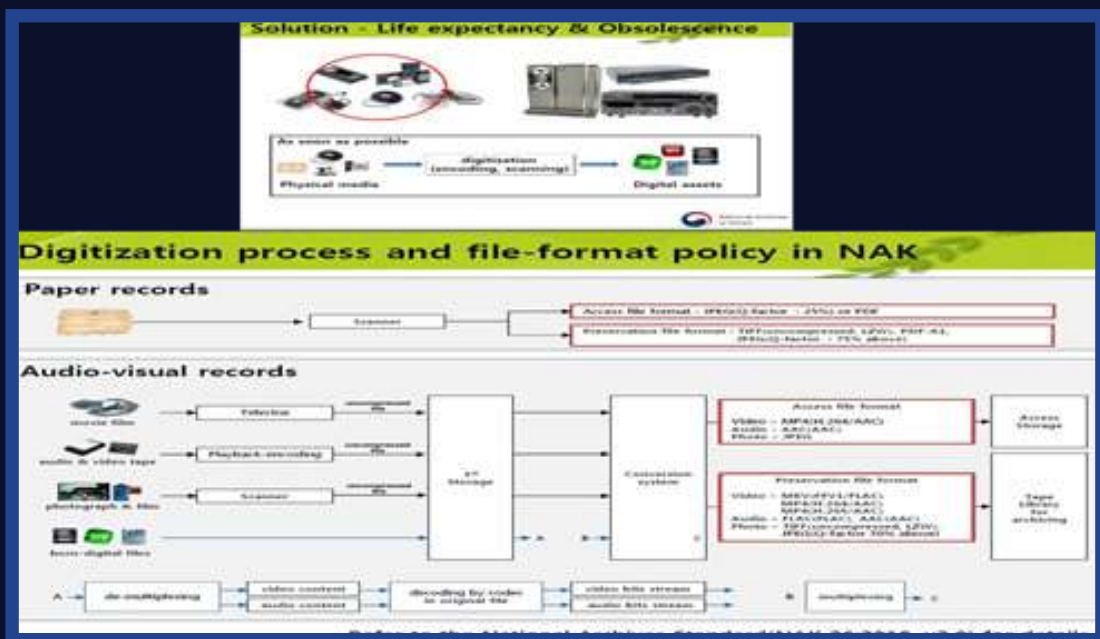
identifikasi informasi, jenis film dan menentukan kode awal.

Melihat penjelasan program preservasi arsip kepresidenan yang sudah dijalankan oleh NAK dapat menjadi panduan serta catatan penting bagi program preservasi di ANRI nantinya. Hal tersebut terlihat dari belum adanya depot penyimpanan

(*repository*) yang khusus untuk menyimpan arsip kepresidenan di Indonesia seperti di Korea. Maka dari itu, perlu adanya akselerasi dalam hal kebijakan preservasi dalam membuat *repository* khusus arsip kepresidenan, perlindungan arsip kepresidenan yang bersifat khusus (*designated*) dalam hal ketentuan akses layanan arsip kepresidenan,

dan menjalankan *action plan* jangka pendek/menengah/panjang dari para peserta yang mengikuti *training* dari tahun 2019 s.d 2021 khusus mengenai preservasi terutama proses digitalisasi arsip kepresidenan dan pengembangan aplikasi untuk melayani arsip kepada publik.

Arsip Kepresidenan merupakan



Proses digitalisasi dan kebijakan format file Arsip di NAK
 Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=CXH9r_LMYFA



Proses digitalisasi Arsip Film di NAK
 Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=CXH9r_LMYFA



Proses MAM (Media Asset Management) System di NAK
 Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=CXH9r_LMYFA

tanggung jawab lembaga kearsipan (ANRI) yang harus dimaknai sebagai upaya untuk menjamin keutuhan dan keamanan arsip yang berkaitan dengan Kepresidenan, baik sebagai individu (kepala negara atau kepala pemerintahan) maupun sebagai organisasi atau lembaga Kepresidenan itu sendiri. Pada prinsipnya, arsip kepresidenan harus dapat menggambarkan prestasi (*hall of fame*) presiden, termasuk kehidupan sosial dan budayanya, baik di lingkungan keluarga pada khususnya maupun dalam masyarakat pada umumnya. Arsip Kepresidenan

adalah program yang sudah dijalankan sejak 6 tahun lalu (sejak 2015) di dunia kearsipan Indonesia melalui program Arsip Kepresidenan di Indonesia yang mempunyai harapan untuk dapat merekam dan menyajikan kepada publik mengenai kegiatan semua Presiden dari awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Adapun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini adalah karakteristik presiden yang berbeda satu sama lain, baik dari segi visi dan misi, program aksi, diplomasi, sosialisasi, dan acara lainnya yang mengiringi proses

pengelolaan arsip presiden. Oleh karena itu, pentingnya konsistensi program ini agar berkelanjutan antara periode presiden satu dengan lainnya agar menjadi bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu diketahui masyarakat luas. Dengan bercermin pada konsistensi kebijakan Korea Selatan dan dukungan kuat dari kepala pemerintahannya, Indonesia dapat mengadopsi metode ini sehingga proses pelestarian arsip kepresidenan dapat dilakukan secara efektif dan efisien di masa depan.

M. Haris Budiawan

PENYELENGGARAAN PROGRAM MEMORY OF THE WORLD DI AUSTRALIA

Warisan budaya dapat mewakili banyak hal terkait dengan eksistensi suatu bangsa yang melambangkan kekuatan budaya suatu bangsa, kenangan tonggak penting dalam sejarah dan keunikan yang bernilai signifikansi universal. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak awal pendiriannya (1945) memiliki perhatian dalam bidang konservasi/perlindungan warisan budaya dan alam (*world heritage*); konservasi tentang penyelamatan warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*); dan pelestarian warisan dokumenter *Memory of the World* (MoW).

Program MoW yang digulirkan UNESCO sejak 1992 menjadi tonggak pencatatan warisan dokumenter (dokumen, manuskrip, tradisi lisan, materi audio-visual, bahan pustaka, dan arsip) yang memiliki nilai universal untuk mendorong peningkatan pelestariannya: pembentukan jaringan pertukaran informasi ilmiah dan pengembangan sumber daya pelestarian, digitalisasi, dan menyediakan akses yang telah

terregistrasi. Selain itu, kesadaran bahwa warisan dokumenter adalah milik semua, menyandarkan pada pengakuan atas adat istiadat dan kepraktisan budaya setempat dan kewaspadaan akan ancaman nyata dari kehilangan karena faktor alamiah (bencana alam) maupun faktor non-alam (manusia) jika tidak dikelola dengan baik.

Menyadari urgensi registrasi memori dokumenter sebagai memori suatu bangsa, banyak negara membentuk komite nasional untuk mengoordinasikan pengusulan dan penentuan warisan dokumenter nasional sebagai sistem yang ideal sebelum dilakukan registrasi internasional. Salah satu negara yang akan mengoordinasikan hal tersebut adalah Indonesia. Pada peluncuran Program Register Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa, (25/8) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan webinar mengenai warisan dokumenter. Pada webinar tersebut, salah satunya menghadirkan *Chair of The Australian MOW Committee*, Roslyn Russell. Dalam materinya Russel memaparkan pencapaian-pencapaian Australia dalam mengelola warisan dokumenter

yang memiliki signifikansi nasional, regional dan universal

KOMITE MOW AUSTRALIA

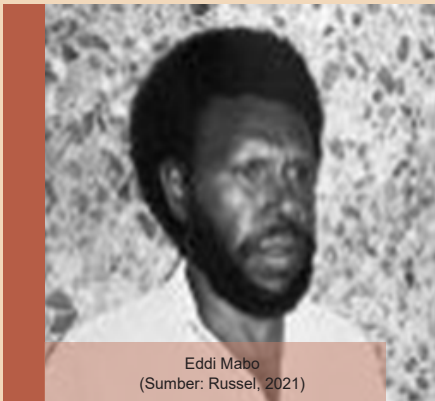
Menurut Russel Komite MoW-UNESCO Nasional Australia berdiri sejak tahun 2000. Lembaga ini berjalan di bawah naungan Komisi Nasional Australia untuk UNESCO. Adapun keanggotaannya mencakup perwakilan lembaga warisan budaya nasional dari lembaga kearsipan nasional (Arsip Nasional Australia) dan negara bagian Australia (Arsip negara bagian dari 6 *state* dan 2 *territories*), perpustakaan (Perpustakaan Nasional Australia), arsip audiovisual (Arsip Film dan Suara Nasional Australia), Lembaga Institut Studi Penduduk Asli Australia dan Kepulauan Selat Torres (*Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies*, AIATSIS), museum (museum nasional), hingga perorangan (sejarawan dan spesialis pelestarian).

Saat ini, komite MoW Australia telah berhasil menghimpun 78 warisan dokumenter yang telah dinilai para pakar dan ditetapkan mendapat penganugerahan di berbagai level nasional, regional dan global. Situs

MANCANEGARA

Web MoW UNESCO (URL: <http://www.amw.org.au>) menampung deskripsi warisan dokumenter Australia yang telah teregistrasi, item berita, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seputar pelestariannya.

WARISAN DOKUMENTER AUSTRALIA BERNILAI SIGNIFIKANSI GLOBAL-REGIONAL



Daftar Warisan Dokumenter Australia (Australian MoW Register) mencakup berbagai macam naskah/manuskrip/arsip yang disimpan di lembaga kearsipan, perpustakaan, museum, universitas, dan komunitas di Australia. Berikut beberapa di antaranya yang terbagi secara tematis.

Warisan Dokumenter Australia di Register Internasional (*Inscription on Register Memory of the World*):

1. Arsip penjelajahan bagian bumi selatan oleh James Cook;
2. Arsip perjuangan hak sipil penduduk asli Eddy Mabo;
3. Arsip narapidana pemukim pertama Australia *convict record*;
4. Arsip Kriminal terkenal Ned Kelly Gang;
5. Arsip pendirian partai buruh

pertama dunia (*Australian Labor Manifesto*)

6. Arsip pelabuhan Sydney (*Sydney Harbour - Bayles*)

Warisan Australia di Register Asia-Pasifik (*Inscriptions on MOWCAP Register*):

1. Dokumen Konstitusi Persemakmuran Australia (*Landmark Constitutional Documents of the Commonwealth of Australia*);
2. Arsip Kerja Paksa Warga Kepulauan Pasifik (*Pacific Islanders Indentured Labourer Records; Queensland Archives work canefield*);
3. Koleksi (Foto) FE Williams (F E Williams Collection), Papua New Guinea



WARISAN DOKUMENTER AUSTRALIA BERNILAI SIGNIFIKANSI NASIONAL

Arsip bangsa pribumi Australia (*first nations records*):

1. Arsip bahasa-bahasa pribumi, AIATSIS (*Indigenous Languages Collection, AIATSIS*);
2. Koleksi surat-surat anak-anak suku bangsa Kaurna, Perpustakaan Universitas Adelaide (*Kaurna Children's*

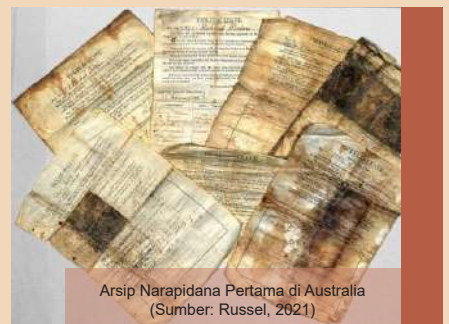
Letters, University of Adelaide Library)

3. Arsip seni wicara bangsa penduduk Western Desert, Universitas Nasional Australia (*Western Desert Verbal Arts Collection, Australian National University*); and
4. *Ngaanyatjarra Council Early European settlement in Australia.*



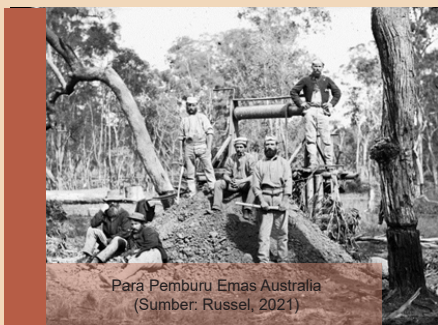
Arsip narapidana Australia (*Convict Records*):

1. Khazanah Arsip narapidana di Arsip Negara Bagian NSW, Tasmania Australia Barat dan Queensland (NSW, Tasmania, *Western Australia and Queensland Archives*); dan
2. Koleksi Buku Muster para Penetap Negara Bagian New South Wales Tahun 1800 (*Settlers' Muster Book 1800, New South Wales Parliamentary Library*).



Arsip (*Records*):

1. Fenomena Perburuan emas di Australia (*Goldfields Gold Rush Australia*) terdapat dalam khazanah arsip Holtermaan dan Catatan Harian Edward Sell, Perpustakaan Negara Bagian New South Wales dan Victoria (*The Holtermann Collection and Edward Snell's Diary, State Libraries of New South Wales and Victoria*). Sejarah Alam (*Natural history*):
2. Sejarah alam, kehidupan liar, buku *Gould* tentang Ikan Australia, Perpustakaan dan Museum Allport, Hobart, Tasmania (*Gould's Book of Fish, Allport Library and Museum, Hobart, Tasmania*)
3. Koleksi Lepidoptera Australia Harriet dan Helena Scott, Museum Nasional Australia (*Harriet and Helena Scott Australian Lepidoptera Collection, Australian Museum Archives*)



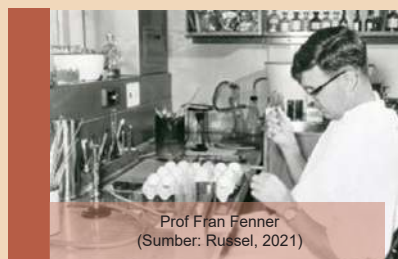
Kehidupan sosial warga Australia:

1. Koleksi cerita rakyat (*folklore*) John Meredith, arsip audiovisual, Perpustakaan Nasional Australia (*John Meredith Folklore Collection: audiovisual records, National Library of Australia*);

2. Sejarah Lisan (*Oral Histories*) yang diselenggarakan lembaga kearsipan dan perpustakaan untuk merekam kenangan orang-orang yang bermigrasi ke Australia;
3. *Migration voices*, koleksi sejarah lisan Perpustakaan Nasional Australia, Perpustakaan Negara Bagian Australia Barat Australia Selatan, New South Wales, Museum Migrasi-Adelaide (*National Library of Australia, State Library of Western Australia, State Library of South Australia, State Library of New South Wales, Migration Museum, Adelaide*).



Arsip ilmiah (*Scientific Records*) mencakup arsip ilmiah Prof. Frank Fenner, arsip Akademi Ilmu Pengetahuan Australia, arsip Perpustakaan Adelaide, arsip Perpustakaan Universitas Nasional Australia (*Collections of Professor Frank Fenner, Australian Academy of Science Archives; University of Adelaide Library; Australian National University Archives*).



Registrasi Seni Pertunjukan Australia AusStage (*Performing Arts Inscriptions AusStage*) meliputi pangkalan daya seni pertunjukan langsung dan koleksi C.J. Williamson (*The Australian Live Performance Database and J C Williamson Collection*).



Program registrasi warisan dokumenter secara nasional bukan hanya usaha untuk melestarikan arsip yang memiliki nilai signifikansi nasional, regional atau bahkan internasional, tetapi juga usaha untuk melestarikan identitas dan jati diri bangsa untuk kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang.

Pengelolaan kekayaan dan keragaman lanskap warisan dokumenter di Indonesia kian menjadi perhatian. Pengembangan program registrasi adalah inisiatif yang baik, melalui dialog dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga koleksi yang penting secara nasional. Dengan demikian, kesadaran dan perlindungan warisan dokumenter dunia dan pencapaian aksesibilitas universal bisa dikembangkan secara permanen.

Referensi:
Russell, Roslyn. 2021. *The UNESCO Australian Memory of the World Committee and its Register*. Materi Seminar peluncuran Program Register Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa 25 Agustus 2021, ANRI

KEPALA ANRI LAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA KEARSIPAN DI CILACAP



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, (6/12). Kunker di Cilacap diawali dengan meninjau langsung Segara Anakan yang diharapkan arsip Segara Anakan dapat diajukan sebagai arsip Memori Kolektif Bangsa (MKB).

Segara Anakan merupakan sebuah laguna luas yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa yang terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Segara

Anakan merupakan laguna di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap. Kawasan Segara Anakan merupakan tempat bertemunya tiga sungai besar, yaitu Sungai Citanduy, Sungai Cibereum dan Sungai Cikonde serta sungai-sungai kecil lainnya.

Segara Anakan merupakan kawasan perairan yang unik, karena didominasi hamparan hutan mangrove yang sangat luas. Tempat ini merupakan salah satu laboratorium alam bagi para peneliti dalam dan luar negeri

DAERAH

SELAMAT DATANG DI KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP



dari berbagai disiplin ilmu.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI, Imam Gunarto beserta jajaran, didampingi pejabat setempat berkesempatan singgah di Kampung Laut yang merupakan salah satu perkampungan di wilayah Segara Anakan. Setelah singgah di Kampung Laut, Imam Gunarto beserta rombongan melihat hamparan hutan mangrove dan mendengarkan langsung perkembangan wilayah Segara Anakan dari penduduk setempat.

Imam Gunarto berharap kepada penduduk dan pejabat setempat mendukung penuh arsip Segara Anakan sebagai MKB, agar keberadaan Segara Anakan dapat menjadi proses pembelajaran bagi

generasi mendatang.

Setelah meninjau Segara Anakan, Imam Gunarto mengunjungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap untuk meninjau langsung Segara Anakan.

Pada hari berikutnya, Imam Gunarto beserta jajaran mengunjungi Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan, Cilacap di mana desa tersebut merupakan Desa Terbaik I Pengelolaan Arsip Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Di desa ini, Imam Gunarto memberikan bantuan peralatan kearsipan berupa lemari arsip, boks arsip, dan folder arsip sebagai sarana pendukung untuk mengelola arsip di desa.

Agenda kunjungan kerja terakhir,

Imam Gunarto beserta tim melakukan audiensi dengan Bupati Cilacap Tatto Suwanto Pamuji. Pada kesempatan ini, Imam Gunarto menyampaikan maksud dan tujuan hadir di Kabupaten Cilacap ini. Beberapa hal yang disampaikan di antaranya mengenai pendalaman program tahun 2022 seperti tertib arsip dan MKB.

Pada kunjungan tersebut pun turut hadir anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tetty Rohatningsih, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo Wahyu Utomo. **(am/is)**

Dimas P. Yuda

KEMAJUAN TEKNOLOGI KEARSIPAN ERA *SOCIETY* 5.0

“Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban perlu waktu lama untuk menemukannya dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana.”

Paragraf di atas adalah penggalan pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50, Jakarta, 9 Juni 2021. Pidato tersebut seakan senafas dengan perintah moral ala Thomas Aquinas, *Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum*: yang baik harus dilakukan dan diusahakan, dan yang buruk dihindari. Dalam konteks pidato itu, “yang baik” adalah inovasi dan adaptasi teknologi pengarsipan untuk menghindari “yang buruk”, yaitu pengelolaan yang tidak efisien dan akses yang lamban.

Terlebih lagi pada era yang secara apriori disebut Revolusi Industri 4.0 saat ini. Sebuah era dengan karakteristik proliferasi komputer, otomatisasi pencatatan, dan konektivitas di semua bidang (Suherman et. al., 2020, h.16). Sebuah era yang sarat akan kemajuan teknologi dengan istilah-istilah rumit yang terdengar *fancy* seperti *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Augmented Reality*, *Cyber Security*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Web and Mobile*, *Simulation*, *System Integration*, *Cloud Computing*, dan lain-lain.

Namun apakah kita lantas harus euforia atau “menelan” begitu saja adaptasi kemajuan teknologi ala Revolusi Industri 4.0 itu? di bidang kearsipan, seperti apa praktik dan tujuan dari kemajuan teknologi itu? Belum lagi selesai soal Revolusi Industri 4.0, kini muncul sebuah konsep *Society* 5.0 (Masyarakat 5.0). Menurut penulis, munculnya konsep *Society* 5.0 justru dapat menjadi jawaban bijak bahwa kemajuan teknologi kearsipan era Revolusi Industri 4.0 dapat dilaksanakan dalam ranah *Society* 5.0.

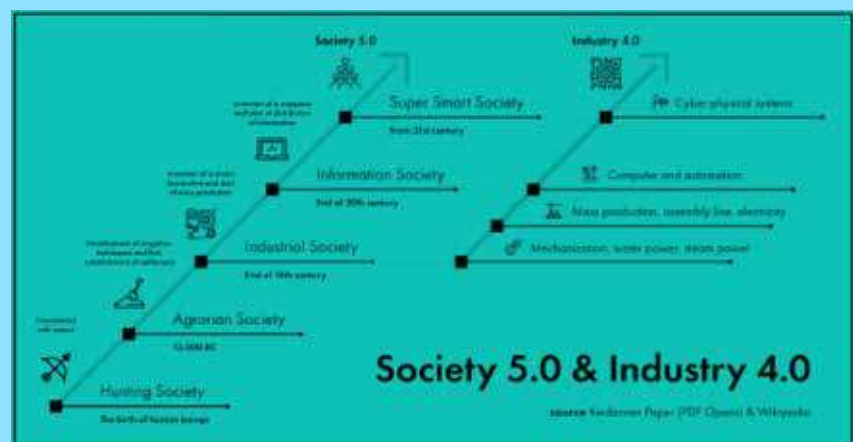
Sekilas tentang *Society* 5.0

Konsep *Society* 5.0 diusulkan Pemerintah Jepang dan merupakan

tingkat lanjut dari *Society* 4.0. Definisinya adalah masyarakat yang berpusat pada manusia (*human centered society*) yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang siber (*cyberspace*) dan ruang fisik (*physical space*). Istilah kunci dari *Society* 5.0 adalah berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*).

Anggapan yang salah kaprah dalam memahami *Society* 5.0 adalah bahwa saat ini kita sudah masuk ke dalam *Society* 5.0 dan meninggalkan Revolusi Industri 4.0, atau bahwa *Society* 5.0 adalah tingkat lanjut dari Revolusi Industri 4.0. Padahal keduanya ada di garis yang berbeda, tetapi tetap saling terhubung. Gambar di bawah sekiranya dapat menjelaskan maksud tersebut.

Pada visualisasi *Society* 5.0 dan Industry 4.0 bahwa *Society* 1.0 adalah



Visualisasi *Society* 5.0 dan Industry 4.0

masyarakat berburu yang bercirikan nomaden. Seiring berjalannya waktu masyarakat berubah menjadi *Society* 2.0 (masyarakat agraris), lalu *Society* 3.0 (masyarakat industri) yang juga menandai dimulainya Industri 1.0 (industri mekanik menggunakan mesin uap). Setelah itu penggunaan listrik untuk industri membentuk era Industri 3.0. Sampai pada era Industri 3.0 itu, garis masyarakat masih pada tahap *Society* 3.0 atau masyarakat industri.

Selanjutnya garis industri naik tingkat menjadi Industri 3.0 atau era komputer dan otomatisasi. Pada era ini garis masyarakat pun berubah dari *Society* 3.0 menjadi *Society* 4.0 (masyarakat informasi). Penyebaran internet mulai dari tahun 1960-an telah membentuk masyarakat informasi ini. Garis industri ini akhirnya sampai pada Industri 4.0 yang (semestinya) membawa dampak perubahan dari *Society* 4.0 (*information society*) menjadi *Society* 5.0 (*super smart society*). Untuk garis industri maka saat ini kita berada pada era Revolusi Industri 4.0. Sedangkan untuk garis masyarakat (*society*) kita berada pada era *Society* 5.0.

Munculnya *Society* 5.0 menjadi sebuah upaya untuk mengatasi masalah *Society* 4.0, seperti berbagi pengetahuan dan informasi lintas batas yang dianggap tidak cukup serta kerja sama yang sulit untuk dilakukan. *Society* 5.0 juga menjadi jawaban atas perubahan lingkungan global dan ekonomi di mana masalah-masalah sosial dan ekonomi diselesaikan melalui bantuan teknologi, menyeimbangkan solusi masalah ekonomi dan solusi pada masalah sosial.

Oleh karena itu, sepertinya tidak keliru jika mengatakan bahwa *Society* 5.0 juga upaya mengatasi kemajuan teknologi yang belum optimal digunakan untuk kepentingan manusia atau kurangnya “sentuhan” manusiawi dalam pemanfaatannya. Mengutip situs resminya (www8.cao.go.jp), *Society* 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada setiap orang dan bukan masa depan yang dikendalikan *Artificial intelligence* (AI) dan robot.

Pada prinsipnya kemajuan teknologi dalam *Society* 5.0 diarahkan untuk kepentingan manusia atau memudahkan aktivitas manusia.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan pencetusnya, mungkin saja *Society* 5.0 ini juga muncul sebagai respon terhadap ciri khas masyarakat industri yang oleh Adorno disebut sebagai “*Massenkultur*” (kebudayaan masa). Zaman di mana segala sesuatunya dapat direifikasi (*verdinglicht*), yakni diperlakukan sebagai “res” atau “benda” (*das Ding*). Zaman di mana segalanya dianggap sebagai komoditas yang dapat direproduksi dan dijual kepada masyarakat. Berubahnya sebuah “nilai guna” menjadi hanya sebuah “nilai tukar” (Hardiman, 20186)

Kemajuan Teknologi Kearsipan dalam *Society* 5.0

Lantas seperti apa atau bagaimana mendudukan kemajuan teknologi kearsipan pada era *Society* 5.0? Tulisan ini tidak bermaksud memberikan banyak contoh untuk membuktikan peran kemajuan teknologi kearsipan pada era *Society* 5.0. Selain karena keterbatasan penulis, juga teringat akan adagium latin lainnya yaitu, *Qui nimis probat nihil probat*; siapa yang membuktikan terlalu banyak malahan tidak membuktikan apa-apa. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah kalau mau mengusahakan terlalu banyak, malah tidak akan menghasilkan sesuatu apa pun.

Pertama, yang relevan dan penting dalam konteks *Society* 5.0 namun kerap dilupakan adalah peran dari masyarakat. Hal ini penting karena juga disebutkan dalam pidato presiden pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50. Presiden menyebutkan, “inovasi pengarsipan tidak semata ditujukan untuk pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan portal yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik dengan layanan akses yang nyaman”, dan

pada kalimat. “Akses pada arsip yang nyaman bagi publik harus disiapkan. Ruang keterlibatan publik dan komunitas dalam pengarsipan harus didorong”, terang Presiden Joko Widodo.

Kemajuan teknologi kearsipan dalam *Society* 5.0 adalah teknologi yang juga kental akan peran serta masyarakat. Proyek *Citizen Archivist* (<https://www.nas.gov.sg/CitizenArchivist/>) yang digagas ala Revolusi Industri 4.0 dalam konteks *Society* 5.0. Proyek *Citizen Archivist* tersebut memungkinkan setiap orang untuk ikut serta secara aktif membuat deskripsi terhadap koleksi arsip (termasuk memberikan penjelasan terhadap arsip tersebut) dan mengunggah arsip ke situs NAS.

Proyek tersebut tidak hanya akan dapat menambah khazanah arsip di NAS, tetapi juga melengkapi deskripsi arsip yang telah ada, sehingga arsip tersebut dapat ditemukan dan dimanfaatkan dengan lebih mudah oleh pengguna. Selain itu, proyek ini juga dapat menciptakan keakraban masyarakat terhadap arsip yang mungkin selama ini hanya dianggap konsumsi bagi aparaturnegara dan para peneliti. Proyek *Citizen Archivist* tentu dilakukan tidak sepenuhnya dibebaskan, masyarakat tetap mendapat panduan dan pendampingan dari arsiparis di NAS, agar dapat mengisi deskripsi arsip sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

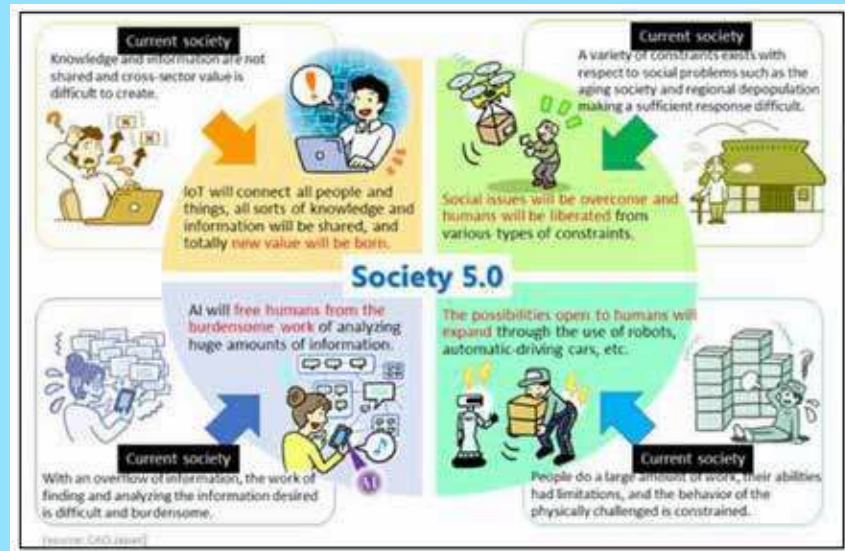
Kedua, salah satu dari konsep teknologi Revolusi Industri 4.0 lainnya adalah *big data*. *Big data* merupakan himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional serta memiliki karakteristik tertentu yaitu 3V, *volume* (ukuran), *variety* (varietas), dan *velocity* (kecepatan). *Big data* memiliki ciri ukuran data yang sangat besar, sangat bervariasi, dan bertambah dengan sangat cepat, serta dapat

disajikan dengan cepat.

Bicara kearsipan maka juga bicara mengenai data yang ada di dalam sebuah arsip, khususnya arsip elektronik. Arsip elektronik di sini tidak hanya dianggap arsip hasil alih media (*scan*) yang kemudian diunggah ke dalam suatu sistem komputer. Tetapi arsip yang memang sudah tercipta secara digital (*born-digital*). Beberapa situs seperti Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Indonesia *OneSearch*, atau bahkan Sejarah Nusantara menjadi contoh upaya menciptakan *big data* dan memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Di dalam situs-situs tersebut terdapat banyak koleksi arsip atau data yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna dan terus bertambah. Khusus untuk situs Sejarah Nusantara adalah arsip bersejarah zaman VOC yang telah dialihmediakan oleh ANRI bekerja sama dengan *The Corts Foundation* dari Belanda.

Namun, tentu saja memanfaatkan *big data* dalam konteks *Society 5.0* tidak dapat berhenti pada arsip statis yang memang telah dimiliki oleh lembaga kearsipan, tetapi juga (mungkin) untuk arsip dinamis di pencipta arsip. Pada era *open Government* seperti saat ini, arsip dinamis di pencipta arsip juga sedapat mungkin dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Adanya pandemi Covid-19 juga telah memberikan contoh bagaimana penggunaan arsip dinamis tentang pandemi Covid-19 dimanfaatkan. Tidak hanya untuk pengambilan keputusan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, tetapi juga oleh para peneliti dan masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dengan demikian, konsep *big data* juga berhubungan dengan huruf "V" lainnya yaitu, *Value* (nilai) yakni berupa manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Ketiga, kembali lagi pada ciri *Society 5.0* yaitu berpusat pada




manusia (*a human centered society*). Artinya kemajuan teknologi kearsipan di bidang kearsipan dimanfaatkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Di sini berarti kemajuan teknologi kearsipan tidak hanya untuk memudahkan aparat pemerintah memberikan pelayanan kepada pengguna, tetapi juga menjamin bahwa pengguna dapat mendapatkan pelayanan yang mudah dan berkualitas.

Misalnya saja kemajuan teknologi dalam tata kelola persuratan secara elektronik, seharusnya memudahkan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dalam praktiknya, di beberapa kasus pemanfaatannya tidak sepenuhnya elektronik. Pengguna masih harus mengunggah dokumen *hard copy* hasil alih media (*scan*) ke dalam sistem tersebut, atau pengguna harus mencetak dokumen tersebut untuk kemudian diunggah kembali. Kenyataannya kemajuan teknologi tidak seperti yang diharapkan dan bukannya mempermudah aktivitas manusia, sebaliknya justru mempersulit aktivitasnya.

Terjadinya hal seperti itu dimungkinkan karena adanya kekhawatiran atau semacam ketidakpercayaan pada arsip

elektronik ataupun pada teknologi yang digunakan. Bisa saja karena masalah formalisme prosedur atau keautentikan sebuah arsip. Di sinilah arsiparis bersama-sama dengan ahli teknologi informasi dan ahli lainnya dapat berperan untuk membuat suatu sistem otomatisasi yang dapat menjamin bahwa arsip elektronik adalah autentik tanpa harus mengubah sistem informasi yang sepenuhnya elektronik menjadi "hybrid".

Demikianlah kiranya tulisan ini berakhir dengan sebuah pertanyaan apakah memang kemajuan teknologi di bidang kearsipan ala Revolusi Industri 4.0 itu sudah sesuai atau diarahkan dengan semangat *Society 5.0* yang terlihat pada pidato presiden? Jika memang kemajuan teknologi itu belum mempermudah kehidupan masyarakat atau belum menempatkan peran serta masyarakat sebagaimana tempatnya, atau bahkan justru malah membuat masyarakat (baca: manusia) kesulitan dengan teknologi itu, maka nampaknya kita perlu kembali mengevaluasi tujuan dan cara penerapan teknologi tersebut.



Rayi Darmagara

REVITALISASI LEMBAGA KEARSIPAN DI PEMERINTAHAN DAERAH

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki babak baru yaitu ketika disampaikannya pidato Presiden Republik Indonesia, Jokowi pada saat pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada Sidang Paripurna MPR RI, (20/10/2019). Salah satu amanat dan tugas besar yang disampaikan melalui pidatonya tersebut adalah penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan secara besar-besaran. “Investasi

untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” terang Presiden Jokowi.

Sejalan dengan hal tersebut,

kebutuhan atas reformasi birokrasi juga diutarakan Eko Prasjo dan Teguh Kurniawan dalam tulisannya “Reformasi Birokrasi dan *Good Governance: Best Practiced* dari Sejumlah Daerah”, mengulas bagaimana pengaruh reformasi birokrasi dalam pembangunan sebuah negara ataupun daerah yaitu dari sisi politik yang kuat di mana birokrasi bermain di dalamnya untuk memainkan fungsinya secara baik dan sesuai perintah. Kesuksesan

yang diterapkan di beberapa daerah dengan sistem *good governance* menunjukkan daerah tersebut bisa bergerak lebih baik dalam pembangunan, sehingga terjadi penggerakan secara simultan dengan yang diperoleh daerah tersebut. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sangat nyata dan dibutuhkan dalam negara maupun daerah.

Penyederhanaan birokrasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tidak mengenal lagi terminologi “eselonisasi” akan tetapi sudah berbasis kelas jabatan. Penggolongan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil diubah menjadi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilaksanakanlah kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dengan fokus pada Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (eselon V) yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020.

Penyederhanaan Birokrasi terhadap Dinas Kearsipan di Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan organisasi dan tata kerja pada pemerintahan daerah. Lahirnya Peraturan Menteri PANRB tersebut memberikan amanat bagi pemerintah pusat dan daerah agar melakukan penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pada Peraturan Menteri PANRB tersebut pun disebutkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III, Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV dan Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi pada saat ini terhadap penyederhanaan birokrasi, Pemerintahan Daerah juga melakukan penghapusan/likuidasi beberapa perangkat daerah termasuk perangkat daerah bidang kearsipan. Melalui perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah tersebut. Berdasarkan data yang telah dihimpun, paling tidak sedikitnya telah

ada lima pemerintahan daerah yang sudah mengumumkan penghapusan perangkat daerah bidang kearsipan.

Menyikapi hal tersebut, jika merujuk pada Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi dua tingkatan unit organisasi. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 bahwa penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria. Kriteria penyederhanaan struktur organisasi meliputi, kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan dan kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan. Hal ini memperjelas bahwa pengaturan penyederhanaan struktur organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa jabatan perangkat daerah provinsi yaitu kepala dinas daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama dan kepala dinas daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama sehingga sebetulnya bukan merupakan *addresat* (subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundang-undangan) dalam

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Penguatan Eksistensi Dinas Kearsipan di Pemerintahan Daerah

Pembentukan dinas kearsipan dilaksanakan berdasarkan pada pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah. Beban kerja dinas kearsipan yang meliputi penetapan kebijakan, pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis bagi dinas kearsipan kabupaten/kota, perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Kemudian melaksanakan pembinaan kearsipan kepada satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah (termasuk kecamatan), BUMD dan desa/kelurahan bagi dinas kearsipan kabupaten/kota, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia (SDM) kearsipan, merupakan faktor penting tetap dibutuhkannya lembaga kearsipan dalam bentuk dinas. Selain itu, perlu diingat pula bahwa arsip memiliki banyak peranan penting, yakni arsip merupakan bukti akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, melindungi kepentingan

negara dan hak-hak keperdataan rakyat, menjaga keselamatan aset daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota.

Menyikapi hal tersebut, langkah yang dapat dilakukan dalam penguatan eksistensi dinas kearsipan di pemerintahan daerah salah satunya adalah penghitungan kembali beban kerja sesuai dengan kriteria variabel umum dan variabel teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Dengan demikian, didapatkan tipologi yang sesuai berdasarkan pemetaan. Hal ini sesuai pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang dapat melakukan evaluasi perangkat daerah dilakukan dua tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.

Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi serta aspek struktur organisasi perangkat daerah. Evaluasi dan pengendalian terhadap struktur organisasi perangkat daerah meliputi aspek besaran organisasi yang

dilakukan dengan membandingkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan tipe perangkat daerah, susunan perangkat daerah yang dilakukan dengan membandingkan susunan perangkat daerah yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perangkat daerah yang dibentuk oleh daerah, pewadahan dan perumpunan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah.

Jika kita berkaca pada saat ini, otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kekuasaan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah termasuk pada urusan kearsipan, tidaklah memberikan hasil yang signifikan terhadap perkembangan kearsipan. Masih banyak baik pada tingkatan penetapan kebijakan, pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan dan sarana/prasarana termasuk SDM kearsipan yang harus diakui terbelengket dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dijelaskan bahwa arsip daerah kabupaten/kota wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib membentuk lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kemudian, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jelas bahwa berdasarkan intensitas beban kerja yang tinggi dan tinjauan yuridis terhadap urusan kearsipan, pada pemerintah daerah dinas kearsipan sebagai lembaga kearsipan daerah wajib dibentuk.

Jika diperlukan penghitungan ulang terhadap beban kerja perangkat daerah bidang kearsipan, maka dapat menggunakan kriteria teknis yang tercantum dalam indikator dan kelas interval. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: untuk indikator dan kelas interval urusan pemerintahan bidang kearsipan bagi pemerintahan daerah provinsi, dalam rangka menentukan tipologi lembaga kearsipan daerah provinsi meliputi indikator jumlah perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik dengan bobot 30%, jumlah perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam

rangka akuntabilitas publik dengan bobot 10%, dan jumlah arsip yang harus dikelola per tahun berdasarkan jumlah perangkat daerah dan BUMD (satuan boks) dengan bobot 40%.

Sedangkan terhadap indikator dan kelas interval urusan pemerintahan bidang kearsipan bagi pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam rangka menentukan tipologi lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota meliputi indikator jumlah perangkat daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik dengan bobot 25%, jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik dengan bobot 25% dan jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, dan desa/kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) dengan bobot 40%.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Menteri PANRB pada 27 Mei 2021 melalui surat Nomor: B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi bertujuan untuk:

1. Memperpendek dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat maupun kepada sesama instansi pemerintah menjadi lebih cepat;
2. Mengurangi terjadinya resiko penyimpangan baik dalam memahami tujuan organisasi maupun dalam pengelolaan sumber daya sebagai akibat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan;
3. Menyederhanakan proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi.

Dalam surat tersebut, terdapat kriteria khusus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyederhanaan pada perangkat daerah yang berbentuk dinas, badan, dan inspektorat. Adapun kriteria khusus tersebut meliputi:

1. Spesialisasi urusan pemerintahan;
2. Karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
3. Sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
4. Formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
5. Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia;
6. Kompleksitas pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi pada beberapa pemerintah daerah yang diikuti

dengan proses verifikasi dan validasi diperoleh hasil pemetaan terhadap seluruh urusan pemerintahan. Selanjutnya setelah dilakukan proses tabulasi, analisis, dan pengolahan data dan informasi menggunakan kriteria, bobot, dan nilai di atas, maka ditetapkan model urusan pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota pada Model IV, yaitu urusan pemerintahan memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 5 ($x \leq 5$), tidak memiliki seksi/subbidang pada masing-masing bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut, namun masih memiliki satu Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain pada sekretariat, dengan bagan struktur sebagai berikut:

Pemaknaan Ulang Penggabungan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas daerah provinsi sendiri, urusan pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain. Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas daerah provinsi didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antarpelayanan urusan pemerintahan. Sedangkan untuk

perumpunan urusan pemerintahan meliputi perpustakaan dan kearsipan.

Diperlukan pemaknaan ulang terhadap perumpunan urusan kearsipan dengan perpustakaan, di antaranya dengan dinas kebudayaan atau dengan dinas komunikasi dan informatika. Hal ini bertujuan jika secara politis keinginan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengurangan struktur birokrasi (dinas) bisa tetap tercapai, tetapi kewajiban pembentukan dinas kearsipan tetap terwadahi dengan nomenklatur bergabung dengan dinas lain.



Berdasarkan Surat Menteri PANRB pada 27 Mei 2021 Nomor: B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota



**PUSAT STUDI ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

JALAN BUNEIT NO. 26 PANCORAN JAKARTA SELATAN 12540
www.arri.go.id

Dharwis W.U. Yacob

**PUSAT STUDI
ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia memiliki banyak pengalaman menghadapi permasalahan korupsi. Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Korupsi yang terjadi di tubuh VOC mengakibatkan perusahaan besar yang didukung penuh pemerintah Belanda itu tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia terkait korupsi ini ternyata setelah kemerdekaan masih ditemui kembali pada masa Republik Indonesia, sehingga setelah 75 tahun Indonesia merdeka kasus tindak pidana korupsi terus-menerus

berulang. Cakupannya kian meluas, tidak hanya terjadi di lingkungan institusi pemerintah, tetapi juga di lingkungan institusi cabang-cabang kekuasaan negara lain baik di tingkat pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah (BUMN/BUMD), dan partai politik dengan melibatkan kalangan dunia usaha/pengusaha.

Arsip dan peristiwa sejarah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari memori bangsa. Arsip menjadi saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Arsip pemberantasan korupsi

merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis dalam penelitian dan pengembangan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Arsip pemberantasan korupsi sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan arsip statis harus dikelola secara benar, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan.

Saat ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Ruang Kajian Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Februari 2021

dan dengan dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) membangun unggulan berbentuk pusat studi kearsipan dengan materi arsip statis pemberantasan korupsi. Diresmikan pada 20 Desember 2020 dengan nama Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan PSAPK ANRI. Pusat studi ini melaksanakan kegiatan studi, pelayanan, dan pemanfaatan

arsip pemberantasan korupsi yang berasal dari institusi penegak hukum di Indonesia dengan standar tertentu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi arsip yang dikelola adalah arsip terkait pemberantasan korupsi yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht dan memiliki nilai guna kesejarahan. PSAPK ANRI juga secara khusus mengembangkan studi kearsipan yang objek materinya

arsip statis pemberantasan korupsi, dengan menjalin hubungan kerja sama dengan institusi penegak hukum pemberantasan korupsi serta berbagai institusi lain yang terkait di dalam dan luar negeri, guna menghasilkan pelayanan kearsipan terbaik, khususnya pelayanan akses arsip pemberantasan korupsi.

Harapan berdirinya PSAPK ANRI antara lain mampu membangkitkan minat para pengguna arsip penegakan



Prasasti Peresmian Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi 20 Desember 2020



Kerja sama Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ANRI dengan Pusat Studi Anti Korupsi dan Tindak Pidana Universitas Airlangga, 30 Maret 2021



Ruang Layanan Arsip Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Maret 2021

hukum bidang korupsi dari berbagai profesi, mempromosikan khazanah arsip statis ANRI sebagai memori kolektif bangsa, sumber pengetahuan, dan bahan penelitian pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, PSAPK ANRI harus memiliki sarana akses yang lengkap baik manual dan elektronik serta tersaji dalam situs web ANRI.

Dikelola dengan profesional dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal agar dapat melahirkan program dan kegiatan dengan hasil yang berkualitas unggul.

Visi PSAPK ANRI adalah menjadikan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ANRI yang unggul pada 2025. Sedangkan

misi PSAPK ANRI adalah menyelenggarakan pelayanan arsip statis tindak pidana korupsi (tipikor) dari masa kolonial hingga kemerdekaan secara manual dan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, menyelenggarakan pameran arsip penegakan hukum tipikor secara reguler dan temporer;



Ruang Pameran Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Februari 2021



Ruang Perpustakaan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Februari 2021

menyelenggarakan kegiatan ilmiah kearsipan (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait arsip penegakan hukum tipikor; menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berstandar internasional; membangun jejaring nasional dan internasional untuk menyelamatkan, mengolah, melestarikan, dan menyajikan khazanah arsip statis ANRI, khususnya arsip penegakan hukum tipikor untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik; menyediakan referensi ilmiah kearsipan dan penegakan hukum tipikor untuk kepentingan penelitian dan peningkatan pelayanan publik.

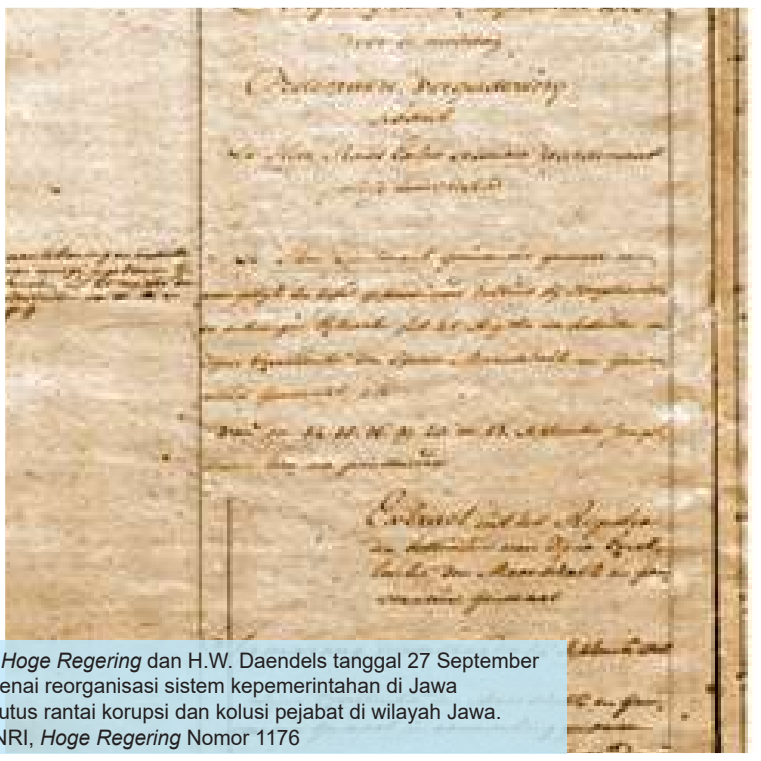
Sebagai contoh gambaran umum dari penyusunan target program dan strategi pencapaian PSAPK ANRI dapat ditempuh melalui lima tahapan. Tahapan ini mulai dari persiapan (2020-2021), perintisan (2021-2022), pengembangan (2022-

2023), internasionalisasi (2023-2024), hingga tahap menjadi Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi ANRI (2025) yang unggul sebagaimana dirumuskan dalam visinya.

Tahap Persiapan (2020-2021) adalah tersusunnya naskah akademik pendirian PSAPK ANRI, terpenuhinya dasar legalitas PSAPK ANRI, strukturisasi fungsi dan tugas pokok PSAPK ANRI, dan tersusunnya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) PSAPK ANRI. Tahap Perintisan (2022-2023) adalah tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi keahlian yang memadai untuk ditugaskan di PSAPK ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll), tersedianya fasilitas prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran,

seminar, penelitian, perpustakaan, area publik, digitalisasi arsip, terselenggaranya pameran kearsipan di bidang pemberantasan korupsi, terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.

Tahap Pengembangan (2023-2024) adalah meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian memadai untuk ditugaskan di PSAPK ANRI, meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor, meningkatnya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor, terbentuknya jejaring kelembagaan dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam negeri, tersedianya sarana akses arsip penegakan hukum baik manual dan elektronik, digitalisasi dan layanan



Keputusan *Hoge Regering* dan H.W. Daendels tanggal 27 September 1808 mengenai reorganisasi sistem pemerintahan di Jawa untuk memutus rantai korupsi dan kolusi pejabat di wilayah Jawa. Sumber: ANRI, *Hoge Regering* Nomor 1176



Artikel yang ditulis J. F. Dijkstra (seorang pemilih perkebunan berkebangsaan Belanda) yang berjudul "*De Corruptie in de Nederlandsch-Indische Ambtenaarswereld of Mr. Remrevalsregeerings-commissaris door J. F. Dijkstra, Planter*" (Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Hindia-Belanda, Mr. Rhemrev, Menjabat sebagai Komisioner Pemerintah, ditulis oleh J. F. Dijkstra) merupakan kasus korupsi pertama yang diekspose kepada publik melalui pers. Sumber: ANRI, Inventaris Arsip *Algemene Secretarie Seri Grote Bundel Besluit* Nomor 1337 (1)

daring arsip penegakan hukum tipikor, dan publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.

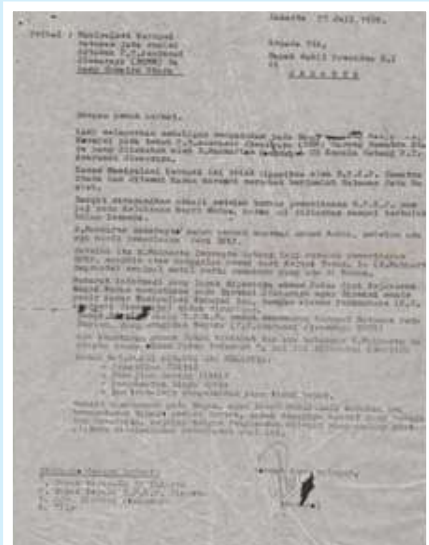
Tahap Internasionalisasi (2024-2025) adalah ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian berkualifikasi internasional untuk ditugaskan di PSAPK ANRI, tersedianya prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, penelitian, perpustakaan, area publik (*public area*) manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional, meningkatnya ketersediaan sarana akses arsip penegakan hukum tipikor baik manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional, terselenggaranya penyelenggaraan

pameran arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional, terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) terkait arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional, meningkatnya publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional.

Tahap PSPAK ANRI Unggul (2025) adalah meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang unggul untuk ditugaskan di PSAPK ANRI, meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, penelitian, perpustakaan,

area publik (*public area*) manual dan elektronik yang unggul, meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor yang unggul, meningkatnya penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait kearsipan dan penegakan hukum yang unggul, meningkatnya publikasi hasil penelitian/penerbitan naskah sumber kolaborasi internasional di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor yang unggul.

Adapun khazanah arsip statis pemberantasan korupsi pada era VOC (1609-1799) adalah khazanah arsip statis *Hoge Regering* (Dewan Tertinggi zaman VOC), *Notariaat* (Notaris zaman VOC), dan *Residentie* (Arsip Daerah zaman VOC). Khazanah arsip statis mengenai



Korupsi Yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Tahun 1989
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI : Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969 – 1999 Nomor 730

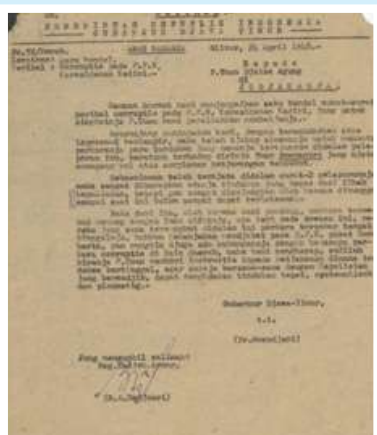


Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah Tahun 1989. Sumber: ANRI, Inventaris Sekretariat Negara RI: Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969–1999 Nomor 727

pemberantasan korupsi pada era Hindia Belanda (1816-1942) adalah khazanah arsip statis *Algemene Secretarie* (Sekretariat Negara Zaman Hindia Belanda, *Burgelijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum Zaman Hindia Belanda), *Verkeer en Waterstaat* (Irigasi dan Pengairan Zaman Hindia Belanda), *Mijnwezen* (Dinas Pertambangan zaman Hindia Belanda), *Financien* (Departemen Keuangan zaman Hindia Belanda), dan *Binnenlandsch*

Bestuur (Kementerian Dalam Negeri zaman Hindia Belanda). Khazanah arsip statis mengenai pemberantasan korupsi pada era Republik Indonesia (1945-sekarang) adalah khazanah arsip Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) 1959-1963, Departemen Pertahanan, Kabinet Presiden RI, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Negara seri Tromol Pos, Telkom, Sekretariat Negara Seri Produk Hukum.

PSAPKANRI memiliki nilai strategis bagi ANRI dan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia ke depan. Oleh karena itu, PSAPK ANRI harus terus dikembangkan secara matang, komprehensif, terpadu sesuai dengan target strategis yang telah ditetapkan sehingga mampu menjawab kebutuhan para penegak hukum dalam bidang pemberantasan korupsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat di Karesidenan Kediri Tahun 1948. Sumber: ANRI, Inventaris Kepolisian Negara Nomor 2028



Laporan Pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 tentang korupsi atau pungli yang telah diolah atau ditindaklanjuti
Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969–1999 Nomor 763



Laporan Pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 tentang korupsi atau pungli yang telah diolah atau ditindaklanjuti. Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969–1999 Nomor 763



FOTO: ISTIMEWA

Tim *Risk Assessment* Arsip Laboratorium ANRI melakukan penilaian kerusakan arsip pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan tindak lanjut dari survei kelayakan yang sebelumnya dilaksanakan di tempat yang sama pada Mei 2021 lalu (17-18/06/21).

TIM *RISK ASSESSMENT* ARSIP ANRI NILAI KERUSAKAN ARSIP PADA DOKUMEN LANGKA MILIK BPHN

Jakarta (17/06) - Laboratorium dan Autentikasi Arsip yang diwakili oleh *Tim Risk Assessment* Arsip Laboratorium ANRI kembali melakukan penilaian kerusakan arsip pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 17-18 Juni 2021. Kegiatan *Risk Assessment* ini merupakan tindak lanjut dari survei kelayakan yang sebelumnya dilaksanakan di tempat yang sama pada Mei 2021 lalu. Berdasarkan hasil survei tersebut, salah satu arsip yang harus dinilai kerusakannya adalah dokumen Langka milik BPHN yaitu kumpulan Lembaran Negara (*Stadsblad*) yang merupakan

referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, *Ordonantie* dan *Reglement* pada masa Hindia Belanda.

Pada kegiatan ini selain melakukan penilaian kerusakan arsip statis, *Tim Risk Assessment* Arsip Laboratorium ANRI juga melakukan *Workshop* singkat tentang pemeliharaan arsip statis dan pengenalan kerusakan arsip kertas yang sesuai dengan amanat peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas. Selain itu, diserahkan juga beberapa alat yang dapat digunakan dalam

proses pemeliharaan arsip statis dan juga penilaian Arsip Statis, di antaranya adalah *Thermohyrometer*, *Filmoplast*, *PH Indicator*, serta buku Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan timbul kesadaran dari seluruh instansi pemerintahan maupun perusahaan BUMN dan BUMD untuk melakukan pemeliharaan arsip dan mampu melakukan penilaian kerusakan arsip secara mandiri, khususnya dalam yang dalam bentuk konvensional/kertas. **(ohs)**



PIAGAM PENGHARGAAN
BKN AWARD 2021
LEMBAGA NEGARA / LPNK TIBE B

Peringkat II
Diberikan Kepada

ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

Atas capaian dalam
Implementasi Penilaian Kinerja

BIMA HARIA WIBISANA
Kepala



Jakarta (01/07) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meraih dua penghargaan masing-masing pada Peringkat Kedua Kategori Implementasi Penilaian Kinerja dan Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Keberhasilan ANRI dalam predikat tersebut dipilih berdasarkan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengembangan Sistem Manajemen ASN yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam mengelola Manajemen ASN serta dinilai melalui proses seleksi yang ketat.

Dengan diraihnya dua penghargaan tersebut, ANRI terus berkomitmen untuk meningkatkan Pengelolaan Manajemen ASN dan Pengembangan Sistem Manajemen ASN.

BKN Award 2021 ANRI RAIH DUA PENGHARGAAN KATEGORI IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA DAN KOMITMEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai di lingkungan ANRI untuk terus meningkatkan pelayanan dan kinerja, serta terus berinovasi agar kinerja dan pelayanan yang diberikan semakin optimal,” ujar Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum ANRI, Rini Agustiani.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings pada Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2021 dengan tema “Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi

yang Dinamis”. Award yang diterima instansi ini melengkapi hujan prestasi yang telah diraih ANRI.

Rakornas Kepegawaian Tahun 2021 diselenggarakan di Denpasar, Bali, dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya penyederhanaan secara teknis melainkan harus bisa mengubah kerangka berpikir ASN untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan. “Harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi atau pemikiran baru,” kata Wapres Ma’ruf.

Indikator perubahan kerangka berpikir dan budaya kerja para ASN tersebut, lanjut Wapres, dinilai dari peningkatan kesadaran para abdi negara terhadap eksistensi dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh,” ujar Wapres Ma’ruf. (okh)



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo (kiri) melantik Imam Gunarto (kanan) sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, ANRI (15/07/21).

FOTO: DOK. ANRI

MENTERI PANRB LANTIK IMAM GUNARTO SEBAGAI KEPALA ANRI

Jakarta (15/07) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo melantik Imam Gunarto sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, ANRI. Penunjukkan Imam Gunarto sebagai Kepala ANRI ke-10 didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan ANRI.

Pelantikan digelar secara daring dan luring, dengan peserta sangat terbatas dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Acara

pelantikan secara daring digelar melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dan saluran akun youtube Arsip Nasional RI dengan tautan privat. Seluruh pegawai ANRI, pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Perguruan Tinggi juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut secara daring. Sebelum mengakhiri acara pelantikan, Menteri Tjahjo juga turut menyampaikan piagam penghargaan kepada Pelaksana Tugas Kepala ANRI periode 2019-2021, M. Taufik dan Kepala ANRI yang baru saja dilantik, Imam Gunarto.

Imam Gunarto yang merupakan alumnus sarjana dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

dan Magister Humaniora Universitas Diponegoro ini, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama ANRI mulai 20 Februari 2020 s.d. 14 Juli 2021 serta Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI mulai 26 September 2017 s.d. 19 Februari 2020.

Adapun seleksi terbuka calon Pimpinan Utama Kepala ANRI ini telah dilakukan sejak 1 Maret 2021 dengan melalui berbagai tahapan seleksi. Pada proses seleksi tersebut melibatkan panitia seleksi yang didasarkan kepada Keputusan Presiden. Panitia seleksi diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana dan beranggotakan pejabat dari berbagai instansi. **(tk)**



ARCHIVES AUTHENTICITY AND RECENT CHALLENGES

FOTO: DOK. ANRI

Prof. Luciana Duranti seorang profesor yang memiliki kepakaran dalam teori kearsipan, diplomasi, dan preservasi arsip digital yang bekerja di Arsip Nasional Kanada mengupas tentang autentikasi meliputi proses, sistem, dan prosedur yang memungkinkan dan sebaiknya dilakukan dalam melakukan autentikasi arsip (14/07/21).

Direktorat Preservasi Selenggarakan Webinar **ARCHIVES AUTHENTICITY AND RECENT CHALLENGES**

Jakarta (14/07) - Dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-50 di Indonesia, Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali menggelar kegiatan webinar dengan tema *Archives Authenticity and Recent Challenges*. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dan ditayangkan secara langsung melalui saluran akun Youtube Arsip Nasional RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara webinar ini. Multi berharap peserta dapat memperoleh ilmu kearsipan sebagai bentuk dasar kesadaran dalam menjaga kelestarian arsip di

tempat mereka bertugas. Di samping itu, dalam menyikapi perkembangan teknologi, ANRI berupaya menangkap isu tentang autentifikasi arsip, karena pada hakekatnya arsip sangat memperhatikan aspek autentik dan keutuhan.

Webinar ini diikuti oleh kurang lebih 4000 peserta yang berasal dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah dan berbagai kalangan. Pada webinar yang membahas tentang autentikasi arsip ini diisi oleh Prof. Luciana Duranti, seorang profesor yang memiliki kepakaran dalam teori kearsipan, diplomasi, dan preservasi arsip digital. Beliau saat ini bekerja di Arsip Nasional Kanada. Ia mengupas tentang autentikasi

meliputi proses, sistem, dan prosedur yang memungkinkan dan sebaiknya dilakukan dalam melakukan autentikasi arsip. Adapun materi kegiatan dapat diperoleh dengan mengunjungi tautan <https://anri.go.id/publikasi/materi-kegiatan>.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan rangkaian terakhir seri Webinar Preservasi Arsip yang sudah dilaksanakan sejak bulan Mei. Rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Pengendalian Hama Terpadu pada Arsip (4 Mei 2021), Preservasi Arsip Digital (25 Mei 2021), Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip Digital (15 Juni 2021), dan Restorasi Arsip Digital (29 Juni 2021). (ag)



Pertemuan dihadiri pimpinan dan perwakilan dari 10 negara ASEAN yang dipimpin Chairman SARBICA, Vitorino Manalo dari Filipina, serta dipandu oleh Sekretaris Jenderal SARBICA, Hapiza Osman (29/07/21).

SARBICA EXTRAORDINARY MEETING ON ASEAN PANDEMIC RESPONSE ARCHIVES (APARA)

Jakarta (29/07) - Delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menghadiri Pertemuan Luar Biasa (*Extraordinary Meeting*) yang diselenggarakan Southeast Asian Branch of International Council on Archives (SARBICA) pada 29 Juli 2021 dalam forum virtual. Pertemuan ini dihadiri pimpinan dan perwakilan dari 10 negara ASEAN yang dipimpin Chairman SARBICA, Vitorino Manalo dari Filipina, serta dipandu oleh Sekretaris Jenderal SARBICA, Hapiza Osman. Pada rapat ini tiap negara menyampaikan laporan tentang program pelestarian arsip penanganan pandemi COVID-19 yang telah dan sedang dilakukan oleh Arsip Nasional negara tersebut.

Dalam kesempatan ini Imam Gunarto menyampaikan presentasi

tentang penyelenggaraan program penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Paparan materi yang disampaikan mulai dari penyusunan dan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuisisi arsip penanganan COVID-19 di berbagai pencipta arsip, serta wawancara sejarah lisan terhadap tokoh yang memiliki keterlibatan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, ANRI juga melakukan riset dan identifikasi arsip tentang sejarah pandemi yang terjadi di Indonesia yang terdapat pada khazanah ANRI dan lembaga lainnya.

Dalam rangka menyebarluaskan arsip sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat, ANRI juga berencana membangun Pusat Studi Arsip COVID-19 bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain membahas tentang program APARA, pertemuan ini pun membahas laporan perkembangan tentang persiapan Pertemuan Dewan Eksekutif, Sidang Umum dan Seminar Internasional SARBICA yang akan dilaksanakan pada November 2021. Pada kegiatan tersebut, Indonesia akan berperan sebagai tuan rumah. Pada kesempatan yang sama juga turut membahas persiapan *workshop* APARA pada Oktober 2021 yang diselenggarakan oleh Filipina bekerja sama dengan ASEAN-COCI. **(krm)**



Direktur Preservasi ANRI, Kandar (kiri) menyerahkan naskah proklamasi tulisan tangan kepada Kepala Biro Administrasi Setpres, Sony Kartiko (kanan) (16/08/21).

Naskah Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno KEMBALI “HADIR” PADA UPACARA PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI TAHUN 2021 DI ISTANA MERDEKA

Jakarta (16/08) - Meski masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia (RI) pada tahun 2021 tetap disambut meriah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang selama ini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan turut “hadir” kembali pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2021. Sama halnya dengan tahun lalu, naskah proklamasi yang ditulis tangan Bung Karno akan kembali “berdampingan” dengan Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang kerap hadir pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Sebelum dihadirkan pada Upacara

Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, naskah proklamasi “dijemput” oleh Tim Sekretariat Presiden (Setpres) Kementerian Sekretariat Negara RI dari depot penyimpanan arsip statis ANRI di jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan pada 16 Agustus 2021. Pada saat yang sama, dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Sementara Naskah Proklamasi oleh Direktur Preservasi ANRI, Kandar dan Kepala Biro Administrasi Setpres, Sony Kartiko. Selanjutnya, naskah proklamasi ini akan dikembalikan oleh Setpres kepada ANRI pada 18 Agustus 2021.

Kehadiran naskah proklamasi pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka menjadi kebanggaan tersendiri dan merupakan suatu hal yang berharga, khususnya bagi

komunitas kearsipan. Memori kolektif bangsa yang menjadi saksi sejarah proklamasi kemerdekaan RI yang selama ini disimpan dan dilestarikan di ANRI, hadir di mimbar kehormatan pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sebagai informasi, naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno telah disimpan di ANRI sejak tahun 1992. Naskah proklamasi disimpan di ruang dan tempat penyimpanan khusus. Naskah proklamasi yang diselamatkan wartawan BM Diah tersebut diserahkan kepada negara, melalui Menteri Sekretaris Negara periode 1988-1998, Moerdiono. Kemudian, Moerdiono menyerahkan naskah proklamasi tersebut kepada Kepala ANRI periode 1992-1998, Noerhadi Magetsari untuk dilestarikan di ANRI. (tk/lnh)

TAHUN 2021

Horison Ultima B



FOTO: DOK. ANRI

Kepala ANRI, Imam Gunarto (tengah) didampingi Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Sumrahadi (kiri) menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemenang Arsiparis Teladan Nasional kategori Keahlian, Rosa Delima Nilakusuma Wardani, S.ST.Ars., M.M. (kanan) yang menjabat sebagai Arsiparis Ahli Muda dari Provinsi Jawa Tengah (17/08/21).

ANRI TETAPKAN PEMENANG ARSIPARIS TELADAN NASIONAL 2021

Jakarta (17/08) - Setelah melalui serangkaian proses pemilihan Arsiparis Teladan Nasional, akhirnya Dewan Juri menetapkan para pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021, Bekasi (17/08). Penetapan pemenang tersebut dengan memperhatikan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 222 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 dan Berita Acara Penilaian Babak Grand Final Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 Nomor: PK.01.02/ 159 /2021 tanggal 17 Agustus 2021.

Berikut para pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 sebagaimana yang dituangkan

dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 282 Tahun 2021 tentang Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021. Pemenang Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 Kategori Keterampilan. Juara I (satu) diraih oleh Agustina Dwi Krismayanti, S.AP. Arsiparis Mahir dari Provinsi Jawa Tengah. Juara II (dua) Alfu Mahar Syarofi, A.Md. Arsiparis Penyelia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Juara III (tiga) diraih oleh Winda Desrah Maini, A.Md., yang merupakan Arsiparis Mahir dari Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Pemenang Arsiparis Teladan Nasional kategori Keahlian, juara I (satu) diraih Rosa Delima Nilakusuma Wardani, S.ST.Ars., M.M. Arsiparis Ahli Muda, Provinsi

Jawa Tengah. Juara II (dua) Rani Pamungkas, S.AP, Arsiparis Ahli Muda, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan Juara III (tiga) Abid Zusriha Hasan, M.AP., Arsiparis Ahli Muda, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Para Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional diberikan plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Sumrahadi.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI, Imam Gunarto berharap para Arsiparis Teladan Nasional dapat menjadi agen perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan. Imam

AN ARSIPARIS TELADAN NAS

TAHUN 2021

Horison Ultima Bekasi, 1

FOTO: DOK. ANRI

Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto (tengah) didampingi Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Sumrahadi (kiri) menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemenang Arsiparis Teladan Nasional kategori Keterampilan, Agustina Dwi Krismayanti, S.AP. (kanan) yang menjabat sebagai Arsiparis Mahir dari Provinsi Jawa Tengah (17/08/21).

Gunarto juga berharap agar para arsiparis untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta mengikuti perkembangan teknologi.

Kegiatan Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 sudah dimulai sejak bulan Juni 2021. Sampai dengan batas akhir pendaftaran, jumlah pendaftar Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 sebanyak 51 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang memenuhi syarat administrasi dan berhak untuk mengikuti babak penyisihan.

Pada Babak Penyisihan Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2021, yang diikuti sebanyak 40

orang peserta dengan rincian 26 orang Arsiparis kategori keahlian dan 14 orang arsiparis kategori keterampilan dari 19 Kementerian, Lembaga dan 11 Pemerintah Daerah Provinsi. Dari ke-40 peserta babak penyisihan, dipilih masing-masing 5 orang terbaik dari kategori keahlian dan 5 orang terbaik dari kategori keterampilan.

Pada Babak *Grand Final* Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 dilaksanakan tanggal 16 Agustus diikuti oleh 10 orang, yang terdiri atas: 5 orang Arsiparis Kategori Keahlian perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Provinsi Jawa

Tengah. Sementara 5 orang Arsiparis Kategori Keterampilan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Barat.

Setelah dilakukan penilaian *Focus Group Discussion*, Persentasi dan Wawancara, serta uji panelis, Dewan Juri telah menetapkan Juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing kategori. Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 282 Tahun 2021 tentang Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021. (is)



Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka, pada Selasa, 17 Agustus 2021 (17/08/21).

PIMPINAN ANRI IKUTI UPACARA PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

Jakarta (17/08) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Sumrahyadi, Deputi bidang Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman, Plt. Sekretaris Utama, Rini Agustiani, Plt. Deputi bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati, dan Inspektur ANRI, Syaifuddin mengikuti secara virtual upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2021.

Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka, pada Selasa, 17 Agustus 2021. Kepala Negara hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko

Widodo dan didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin.

Peringatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI kali ini mengusung tema "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh". Tema ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik.

Bertindak selaku komandan upacara pada kesempatan kali ini yaitu Kolonel Pnb. Putu Sucahyadi, S.AP., M.Sc., M.M.S. Pria kelahiran Denpasar, 9 Oktober 1977, ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999 yang

saat ini menjabat sebagai Asops Kosekhanudnas II Makassar.

Laporan komandan upacara dan dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali yang menggelegar dari arah Taman Monumen Nasional dengan disertai bunyi sirene panjang, menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, membacakan naskah proklamasi yang pada 76 tahun lalu dikumandangkan proklamator, Ir. Soekarno, sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dari belenggu penjajahan.

Selepas itu, Presiden Joko Widodo



(dari kiri ke kanan) Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI Multi Siswati, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Sumrahyadi, Kepala Arsip Nasional RI Imam Gunarto, Plt Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani, Deputi Bidang IPK Andi Kasman, dan Inspektur Syaifuddin menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 secara daring (17/08/21).

selaku inspektur upacara memimpin para peserta upacara, baik yang hadir secara terbatas di lokasi maupun yang mengikuti secara virtual untuk mengheningkan cipta. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, kemudian memandu pembacaan doa.

Ardelia Muthia Zahwa, anggota Paskibraka asal Provinsi Sumatera Utara selanjutnya membawa bendera Merah Putih untuk kemudian dikibarkan. Adapun Paskibraka lainnya yang bertugas mengibarkan bendera yakni Dika Ambiya Rahman sebagai pembentang bendera, Ridho Hadfizar Armadhani sebagai pengerek bendera, dan Aditya Yogi Susanto sebagai Komandan Kelompok 8.

Pengibaran bendera Merah Putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berhasil ditunaikan dengan baik oleh para Paskibraka. Sang Merah Putih tampak gagah berkibar di halaman Istana Merdeka.

Aksi para prajurit TNI AU yang melakukan *fly pass* pesawat tempur

turut memeriahkan upacara kali ini. Sesaat sebelum melintas di langit Istana Merdeka, salah satu pilot pesawat tempur tersebut memberikan ucapan selamat HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Setelahnya, masyarakat dan para undangan disuguhi persembahan lagu “Syukur” dan “Maju Tak Gentar” oleh Gita Bahana Nusantara yang ditayangkan secara virtual.

Ada yang sedikit berbeda pada upacara kali ini, yakni adanya *fly pass* helikopter yang membawa bendera Merah Putih ukuran raksasa. Enam helikopter yang membawa dua bendera berukuran 20 meter kali 30 meter melintas dari arah kiri podium dan disambut tepuk tangan para hadirin.

Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa rangkaian Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilakukan menjadi penutup rangkaian upacara.

Meski digelar secara terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi, upacara peringatan pada 17 Agustus 2021 ini tetap berlangsung khidmat. Jalannya prosesi upacara turut diikuti secara virtual oleh tamu undangan, serta masyarakat dari berbagai wilayah, baik di dalam maupun luar negeri.

Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri hadir secara langsung dalam upacara peringatan tersebut, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, para Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu mengikuti jalannya upacara secara virtual dari kediaman masing-masing. (is)

Webinar: *Excellent Human Resources in Records and Archives Profession through Education and Training* 19 Agustus 2021



Barbara Reed (kanan) narasumber utama webinar menyampaikan bahwa sebagai pengajar di bidang kearsipan harus beradaptasi dengan lingkungan kerja, perkembangan teknologi informasi, dan prioritas organisasi (19/08/21).

FOTO: DOK. ANRI

WEBINAR EXCELLENT HUMAN RESOURCES IN RECORDS AND ARCHIVES PROFESSION THROUGH EDUCATION AND TRAINING

Jakarta (19/08) - Sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Webinar *Excellent Human Resources in Records and Archives Profession through Education And Training* melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* yang juga disiarkan secara langsung dalam saluran akun youtube Arsip Nasional RI dan Pusdiklat Kearsipan.

Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa webinar ini

selaras dengan program prioritas pemerintah yang saat ini gencar melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Arsiparis harus beradaptasi dan bersikap dinamis pada era informasi ini, sehingga dapat bersaing tidak hanya di tingkat lokal. Kolaborasi juga menjadi hal yang penting, apalagi tahun lalu ANRI telah merilis aplikasi SRIKANDI, maka diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengimplementasikan aplikasi umum di bidang kearsipan tersebut. Dengan demikian, arsip tidak terpencair-pencar dan tidak ada aplikasi kearsipan yang dibangun sendiri-sendiri," ungkap Imam.

Sejalan dengan yang disampaikan Imam Gunarto, *Director Record Keeping Innovation Pty Ltd*, Barbara Reed sebagai narasumber utama webinar yang memaparkan materi *Modern Archival Training in the Digital Age* menyatakan bahwa untuk menjadi seorang arsiparis yang profesional pada era digital ini harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya mampu memahami pengetahuan dasar serta mengaplikasikannya ke dalam lingkungan teknis yang baru, berpikir bagaimana hal tersebut harus dilakukan, bukan pernah dilakukan sebelumnya. Arsiparis juga dituntut untuk selalu menjadi manusia

How do we address these and other professional issues?

- Knowing and being secure in foundational knowledge
- Applying foundational knowledge to new technical environments
- Think about why something is being done, not how it is being done
- Continuing to learn
- Find innovators
- Exploring and experimenting
- Collaborating and encouraging colleagues to develop
- Talking with your colleagues

pembelajar, berkreasi dan berinovasi, bereksplorasi dan bereksprimen, berkolaborasi, berdiskusi dan bersinergi dengan rekan kerja. Tak hanya itu, sebagai pengajar di bidang kearsipan pun harus beradaptasi dengan lingkungan kerja, perkembangan teknologi informasi dan prioritas organisasi.

Barbara juga menyampaikan bahwa ada berbagai model pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan, yaitu pembelajaran tatap muka, jarak jauh (seperti penggunaan *email*, *learning management system* seperti pembelajaran melalui modul) *workshop*, pelatihan bagi pelajar dan lain-lain. Setiap model pembelajaran

ini memiliki tantangan masing-masing. Namun, model pembelajaran melalui tatap muka dinilai paling efektif, karena melibatkan komunikasi dua arah yang aktif dan partisipatif dari peserta maupun pengajar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusdiklat Kearsipan, Desi Pratiwi juga mengungkapkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 menghadirkan lingkungan yang berbeda, baik bagi pengajar maupun peserta diklat. Namun, Pusdiklat Kearsipan ANRI terus berupaya untuk mengadaptasi dan menginovasi model pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang kerap ditemui, di

antaranya masih adanya peserta yang kurang mahir memanfaatkan teknologi dan kualitas infrastruktur jaringan yang belum merata baik di tiap peserta maupun pengajar.

Sebagai informasi, meski di tengah keterbatasan pandemi COVID-19, Pusdiklat Kearsipan telah berhasil memperoleh akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara dan saat ini menjadi unit kerja percontohan untuk diajukan dalam Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Berbagai inovasi pelayanan informasi tentang kediklatan pun telah banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penggunaan berbagai media komunikasi. **(tk)**



Kepala ANRI Imam Gunarto beserta jajaran dan Sekretaris Jenderal MK beserta jajaran saat berfoto bersama setelah melakukan audiensi di RSG Soemartini Gedung Arsip Nasional RI di Jakarta (20/08/21).

FOTO: DOK. ANRI



KEPALA ANRI MENERIMA AUDIENSI SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jakarta (20/08) - Kepala ANRI Imam Gunarto menerima audiensi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) RI, M. Guntur Hamzah beserta jajaran di ruang serbaguna Sumartini. Ada beberapa hal yang dibahas dalam audiensi ini, di antaranya adalah sinergi kegiatan Pusat Sejarah Konstitusi serta pembahasan mengenai optimalisasi sistem kearsipan SRIKANDI dalam peningkatan kualitas

Kearsipan di MK. Dalam kesempatan ini hadir Deputy Bidang Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman, Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan, Sumrahyadi dan Kepala Pusat Data dan Informasi, Imam Mulyantono dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional. **(In)**

PEKAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA



23-27
AGUSTUS 2021

FOTO: DOK. ANRI

Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa program MKB ini merupakan program unggulan ANRI. “Program MKB, merupakan salah satu program unggulan ANRI, yang meliputi rangkaian proses mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan pelayanan serta registrasi arsip sebagai MKB” (24/08/21).

www.anri.go.id
Arsip Nasional RI
@arsipnasionalri
arsipnasionalri
Arsip Nasional RI

ANRI GELAR PEKAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA

Jakarta (24/08) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Pekan Memori Kolektif Bangsa (MKB), 23-27 Agustus 2021. Dalam laporan Ketua Panitia Acara, Multi Siswati menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya Pekan MKB. “Diselenggarakannya Pekan Memori Kolektif Bangsa yakni untuk mendapatkan gambaran kinerja layanan dan pemanfaatan arsip di lembaga kearsipan secara nasional sebagai memori kolektif bangsa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip,” ungkapnya.

Selain itu, Pekan MKB sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan

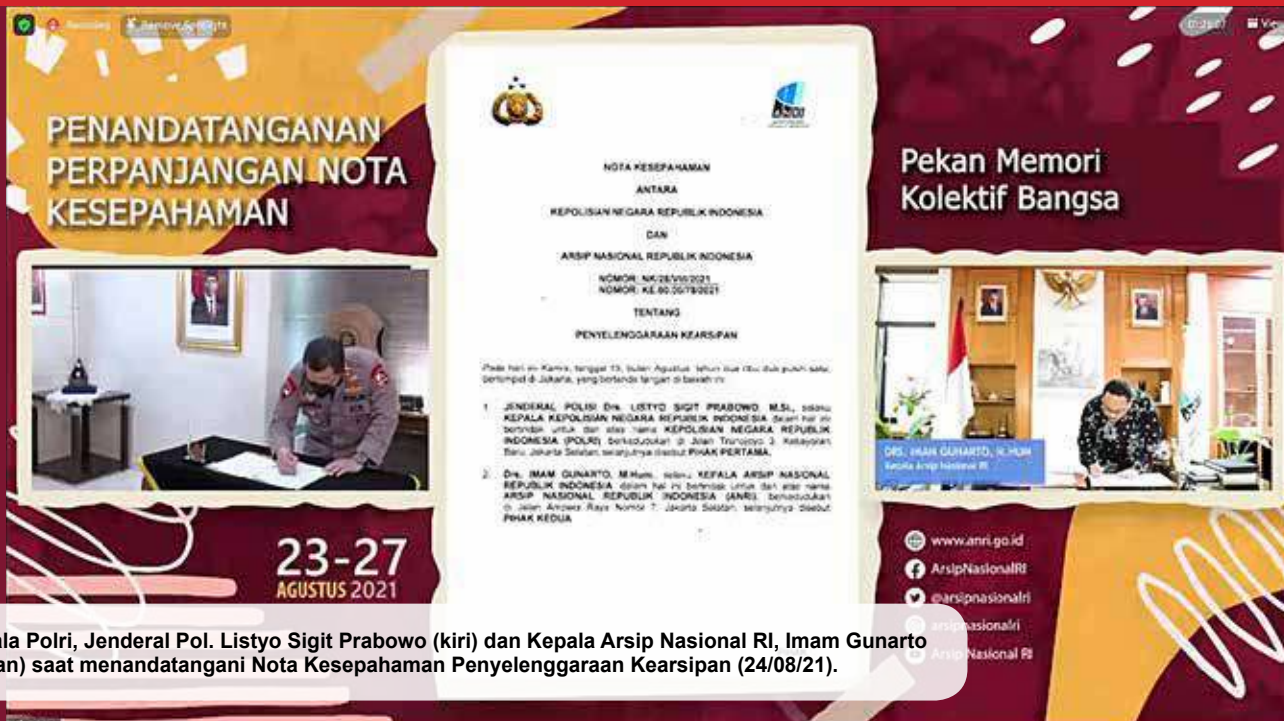
mengenai penyusunan naskah sumber arsip dan pameran, mensosialisasikan Program Register Arsip sebagai MKB ANRI, forum *sharing session* dari negara-negara yang telah menjalankan program serupa, serta katalisator bagi individu/lembaga yang menyimpan arsip untuk berpartisipasi dalam program MKB.

Sementara itu, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa program MKB ini merupakan program unggulan ANRI. “Program MKB, merupakan salah satu program unggulan ANRI, yang meliputi rangkaian proses mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan pelayanan, serta registrasi arsip sebagai MKB,” tutur Imam Gunarto

dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Imam Gunarto menyampaikan bahwa program MKB merupakan program kolaborasi yang bersifat nasional dan internasional, baik antar pemerintah, pemerintah dengan lembaga swasta, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan masyarakat/perseorangan. *Out come* dari program ini adalah terwujudnya arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa yang kuat.

Peserta MKB berasal dari Lembaga Kearsipan Provinsi. Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Kearsipan Negara, BUMN, serta Ormas dan Orpol. (is)



Kepala Polri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto (kanan) saat menandatangani Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Kearsipan (24/08/21).

FOTO: DOK. ANRI

POLRI DAN ANRI PERPANJANG NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Jakarta (24/08) - Dalam rangka meningkatkan sinergitas penyelenggaraan kearsipan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani perpanjangan nota kesepahaman penyelenggaraan kearsipan. Penandatanganan dilaksanakan secara *desk to desk* dan ditayangkan melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI.

Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan pada pembukaan Pekan Memori Kolektif Bangsa, serta dilaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan ANRI.

Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan Pekan Memori Kolektif Bangsa mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas perkenan

Kepala Polri, Kepala LAN yang diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, serta peserta yang hadir untuk ikut bergabung dalam acara penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman yang telah berakhir pada beberapa waktu lalu.

“Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih fluktuatif dan kesibukan Bapak Kapolri dan Bapak Kepala LAN, maka proses penandatanganan ini dilakukan secara *online* dan *desk to desk*. Kami berharap dengan proses semacam ini tidak mengurangi nilai dan tekad kita untuk terus berkolaborasi. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen antara Polri, LAN, dan ANRI dalam meningkatkan kerja sama dan sinergitas antar lembaga dalam penyelenggaraan kearsipan maupun tugas-tugas pembangunan bangsa,” jelas Imam Gunarto.

Kepala Polri, Jenderal Pol.

Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman tersebut. “Saya menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman antara Polri dan ANRI tentang penyelenggaraan kearsipan secara *desk to desk*,” terang Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya secara virtual.

Listyo Sigit Prabowo berharap melalui kerja sama ini dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Polri yang tertib, komprehensif dan terpadu melalui pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang semakin profesional dalam sistem kearsipan nasional.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema “Sinkronisasi dan Harmonisasi Layanan Arsip Statis antar Lembaga Kearsipan”. **(sa)**

Jakarta (24/08) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjalin kerja sama mengenai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Penyelenggaraan Kearsipan, Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Terapan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Kepala LAN yang diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara virtual, 24 Agustus 2021.

“Walau dilakukan penandatanganan ini secara virtual, namun hal tersebut tidak mengurangi



Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto (kiri) Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana (kanan) saat memberi sambutan pada kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Kearsipan secara daring (24/08/21).

BANGUN SINERGI DAN KOLABORASI LAN DAN ANRI TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN

tekad kita untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam rangka pengelolaan kearsipan maupun tugas-tugas untuk pembangunan bangsa,” terang Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Imam Gunarto sangat mengapresiasi komitmen LAN dalam meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kearsipan mulai dari aspek pembangunan SDM, sistem kearsipan, kajian kebijakan, Inovasi, pelatihan dan pendidikan tinggi terapan.

Dalam kesempatan ini, Kepala LAN yang diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana

mengungkapkan apresiasinya kepada ANRI yang telah membangun komitmen bersama dengan LAN untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang kearsipan, kajian kebijakan, inovasi, pelatihan dan pendidikan tinggi terapan.

“Kami percaya pelaksanaan kegiatan yang kolaboratif dan saling *support* antar instansi pemerintah ini dapat meningkatkan sinergitas melalui pemanfaatan keunggulan yang dimiliki, pada masing-masing instansi, hal ini juga dapat mengikis *silo mentality* yang seringkali terjadi pada birokrasi pemerintahan,” ungkapnya.

Sekretaris Utama LAN juga menyampaikan bahwa dengan terbitnya UU ASN, memperkuat kewenangan, tugas dan fungsi LAN dalam bidang kajian kebijakan, inovasi administrasi negara dan manajemen ASN, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.

“Oleh karena itu kami membuka peluang kepada ANRI untuk dapat memanfaatkan seluas-luasnya segala potensi yang ada pada LAN, dan kami berharap melalui nota kesepahaman ini dapat saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,” tuturnya. **(Inh)**

Pelan MEMORI KOLEKTIF BANGSA

ARSIP NASIONAL
ANRI REPUBLIK INDONESIA



Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemdikbud, Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd. memberikan sambutan pada Peluncuran Program Register Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (25/08/21).

76TH
INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUN

Hari
Kearifan
Ke-50

23-27
AGUSTUS 2021

www.anri.go.id

FOTO: DOK. ANRI

ANRI LUNCURKAN PROGRAM REGISTER ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

Jakarta (25/08) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meluncurkan Program Register Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa. Peluncuran program tersebut dilaksanakan secara daring melalui ruang Zoom Cloud Meeting dan *streaming* YouTube, 25 Agustus 2021. “Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim* saya luncurkan program Register Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB),” ungkap Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam sambutan.

Imam Gunarto menyampaikan bahwa program MKB sebagai rangkaian proses mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan pelayanan serta registrasi arsip sebagai MKB, merupakan program kolaborasi yang bersifat nasional dan internasional, baik antar pemerintah, pemerintah dengan lembaga swasta, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan masyarakat atau perseorangan. “*Out come* dari

program ini adalah terwujudnya arsip sebagai identitas dan jatidiri bangsa yang kuat. Oleh karena itu arsip sebagai MKB ini harus diinterpretasikan dalam pemaknaan yang dinamis, bukan statis. Arsip itu tidak dilihat sebagai entitas kebendaan yang dikeramatkan, tetapi harus dikelola sebagai data informasi yang membentuk pengetahuan yang terus dinamis memenuhi kebutuhan kekinian dan masa depan. Program MKB haruslah mampu memasadepankan masa silam. Arsip harus menjadi penerang, menjadi inspirasi, mencerahkan dan mencerdaskan,” terang Imam Gunarto.

Lebih lanjut Imam Gunarto menambahkan bahwa dalam konteks warisan dokumenter atau arsip sebagai MKB, ANRI merupakan representasi negara yang harus hadir dan mempersiapkan ekosistem agar praktik dan produk kearsipan sebagai bagian dari kebudayaan dapat dipandang sebagai produk yang

dinamis, yang terus menerus dapat diaktualisasi dalam konteks jaman yang berkesesuaian.

Turut hadir pada acara peluncuran ini dan memberikan sambutan Ketua Komite *Memory of the World* (MOW) Indonesia, Dr. Dudi Hidayat, M.Sc, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemdikbud, Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd, serta *Keynote Speech* oleh *Secretary General of Memory of The World Regional Committee for Asia and Pacific*, Mr. Andrew Henderson.

Setelah peluncuran program Register Arsip sebagai MKB, acara dilanjutkan dengan webinar yang menghadirkan para pembicara profesional, di antaranya Chair of The Australian MOW Committee, Ms. Roslyn Russell, Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip, Dra. Multi Siswati, MM, Dewan Pakar MOW Indonesia, Dr. Mukhlis PaEni, MA. Acara webinar mengenai MKB dimoderatori Eli Ruliawati, S.Sos, MAP. (is)

Jakarta (09/09) - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan internasional melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Hal ini diimplementasikan melalui sinergi dan kerja sama antara Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam penyelenggaraan webinar internasional yang mengusung tema *International Webinar on Records and Archive Management: Documenting History of Nations* yang digelar pada 9 September 2021.

Webinar ini diikuti lebih dari 400 peserta yang berasal dari Indonesia dan beberapa negara lain, di antaranya Amerika Serikat, Filipina, Timor Leste, Singapura, Malaysia,



Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama membuka acara webinar kearsipan internasional (09/09/21).

KEMENSETNEG DAN ANRI SELENGGARAKAN WEBINAR KEARSIPAN INTERNASIONAL

dan Republik Korea. Webinar tersebut pun merupakan kegiatan pertama di bidang manajemen kearsipan dalam kerangka KSS antar kedua instansi yang bertujuan menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman Indonesia di bidang manajemen kearsipan, termasuk arsip kepresidenan.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama membuka acara webinar tersebut. Dalam sambutannya, Imam Gunarto mengapresiasi inisiasi kerja sama yang dilakukan oleh kedua instansi dan berharap kegiatan ini akan menjadi awal mula kolaborasi pada masa mendatang.

“Tema webinar ini menggarisbawahi kegiatan pengarsipan selama pandemi COVID-19. Diharapkan webinar ini dapat menjadi wadah bagi peserta Indonesia dan negara lain untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan,” tutur Imam Gunarto.

Sementara itu, Setya Utama menyampaikan bahwa pelaksanaan KSS merupakan komitmen Indonesia dalam berkontribusi kepada pembangunan global yang berdasarkan solidaritas, kemitraan, dan kerja sama. “KSS juga merupakan strategi Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs),” ungkap Setya.

Lebih lanjut Setya menyampaikan bahwa Kemensetneg memiliki sejarah panjang dan pengalaman yang baik dalam pemeliharaan dan manajemen arsip kepresidenan. Dengan adanya manajemen arsip kepresidenan yang baik, bukti atas perubahan, transformasi, dan pembangunan Indonesia dapat dilestarikan.

Pada kesempatan ini, webinar menghadirkan para narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, di antaranya Direktur Preservasi ANRI, Kandar, Prof. Yoshimi Nishi dari Universitas Kyoto; dan Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, Sinta Puspitasari. (is)



FOTO: DOK. ANRI

Kepala Pusdiklat Kearsipan ANRI, Desi Pratiwi memperlihatkan Sertifikat Akreditasi yang memperoleh Bintang Satu dari LAN RI (14/09/21).

PUSDIKLAT KEARSIPAN ANRI TERAKREDITASI BINTANG SATU

Bogor (14/09) - Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berhasil memperoleh akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan capaian nilai 81,145 kategori Bintang Satu. Sertifikat akreditasi berlaku selama lima tahun dan diserahkan oleh Kepala LAN, Adi Suryanto didampingi Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Muhammad Taufiq kepada Kepala Pusdiklat Kearsipan ANRI, Desi Pratiwi.

Akreditasi Pusdiklat Kearsipan ANRI telah melalui proses dan tahapan yang panjang yang dimulai pada awal tahun 2020. “Prosesnya kami menyiapkan berbagai hal dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi dan mengunggahnya dalam aplikasi SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara).

Setelah itu, karena kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung, Tim Asesor dari LAN melakukan visitasi secara virtual ke Pusdiklat Kearsipan,” jelas Desi Pratiwi.

Meski telah memperoleh akreditasi Bintang Satu, Pusdiklat Kearsipan tak lantas berpuas diri. Berbagai inovasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kearsipan dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut terlihat bahwa Pusdiklat Kearsipan selama pandemi COVID-19 telah berinovasi dalam penyelenggaraan pelatihan kearsipan, di antaranya melakukan:

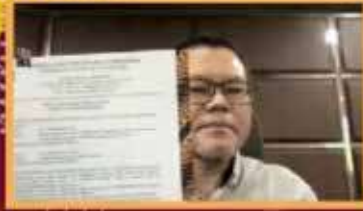
- pelatihan dengan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan Google Classroom dan Google Forms;
- melaksanakan webinar dalam bidang pelatihan;
- melakukan publikasi tentang pelaksanaan diklat melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan kanal Youtube

- Pusdiklat Kearsipan);
- mengubah layanan pembayaran mengikuti diklat dari metode *cash* ke sistem *online* melalui Simponi;
- menyiapkan kurikulum pembelajaran daring (*e-learning*);
- proses registrasi dan pendaftaran diklat berbasis web (*e-registrasi*), melalui subdomain pusdiklat.anri.go.id;
- optimalisasi *hotline* melalui aplikasi pesan singkat (Whatsapp) untuk konsultasi diklat;
- pengembangan La-Simak (Layanan Aspirasi Masyarakat);
- mengendalikan gratifikasi dengan mengembangkan formulir gratifikasi Pusdiklat Kearsipan; dan
- mengembangkan konten pembelajaran jarak jauh melalui LMS (*Learning Management System*) bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi ANRI.

Selain itu, pimpinan juga berharap agar ke depan Pusdiklat Kearsipan ANRI diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai ANRI secara berkelanjutan guna memenuhi sifat pekerjaan yang berubah dengan cepat karena mengalami transformasi lingkungan, teknologi, dan sosial, yang berakibat mengubah peran diklat dalam pembelajaran seumur hidup pegawai.

“Pusdiklat juga diharapkan mengikuti perkembangan kebutuhan pelatihan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan keterampilan yang muncul dan mendesak bagi kementerian/lembaga/pemerintahan daerah/ perguruan tinggi negeri, seperti penggunaan aplikasi umum SRIKANDI, dan mampu mengikuti model pembelajaran yang sedang tren saat ini berkaitan dengan *micro credential*, khususnya di bidang pelatihan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya,” tambah Desi Pratiwi. (tk)

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima KOMITE NASIONAL MOW INDONESIA



Ketua Komite Nasional Memory of the World (MOW) Indonesia periode 2021, Dudi Hidayat (kiri), Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman (tengah atas), dan Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) memperlihatkan Berita Acara Serah Terima Komite Nasional MOW Indonesia yang telah ditandatangani secara daring (21/09/21).

FOTO: DOK. ANRI

LIPI SERAHKAN TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE MOW INDONESIA KE ANRI

Jakarta (21/09) - Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Ketua Komite Nasional Memory of the World (MOW) Indonesia periode 2021, Dudi Hidayat menyerahkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Nasional MOW Indonesia kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : B-7521/III/KS.02.06/8/2021 yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Serah terima Komite Nasional MOW Indonesia dari LIPI ke ANRI dikarenakan adanya penggabungan LIPI ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Dengan adanya penataan organisasi LIPI yang digabungkan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional maka kepengurusan dan kesekretariatan Komite Nasional Memory of the World Indonesia

tidak bisa lagi bernaung di bawah LIPI, karena memang LIPI sebagai sebuah lembaga sudah tidak ada lagi. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 31 Agustus yang lalu yang dihadiri oleh ANRI, Perpustakaan Nasional, KNIU maka seluruh kegiatan dan aktivitas Komite Nasional Memory of the World Indonesia saya serahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia,” ungkap Dudi Hidayat.

Lebih lanjut Dudi Hidayat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pendiri dan *stakeholder* Komite MOW Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya kepada Komite MoW Indonesia selama ini.

Sementara itu Kepala ANRI, Imam Gunarto siap berkomitmen untuk meneruskan dan mengembangkan komite yang telah dibentuk sejak tahun 2006 ini. “Melalui Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : B-7521/III/KS.02.06/8/2021 mengenai Serah

Terima Komite MOW Indonesia dari LIPI kepada ANRI, kami sangat mendukung, meneruskan dan mengembangkan Program Komite MOW Indonesia yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh Komite Nasional sebelumnya,” terang Imam Gunarto.

Imam Gunarto berharap bahwa melalui kegiatan Komite MOW Indonesia ini tidak hanya semakin meningkatnya daftar warisan dokumenter internasional, namun sebagai pondasi yaitu register nasional *documentary heritage* perlu dibangun dan dikembangkan.

Turut hadir dalam acara serah terima tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman, Dewan Pakar Memory of the World, Wardiman Djojonegoro dan Mukhlis Paeni. **(is)**

Magnetic tape preservation and challenges

Ray Edmondson

Magnetic media preservation
accessibility



Ray Edmondson (atas) dan Mick Newnham (bawah) saat memberikan pemaparan pada webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Preservasi ANRI (21/09/21).

Direktorat Preservasi Selenggarakan Webinar **MAGNETIC TAPE PRESERVATION AND TRANSFER TO DIGITAL**

Jakarta (21/09) - Dalam rangka merayakan Hari Kearsipan ke-50 Indonesia, Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali menggelar kegiatan webinar. Webinar kali ini merupakan webinar seri ke-7 dengan tema *Magnetic Tape Preservation and Transfer to Digital* dan diselenggarakan pada Selasa, 21 September 2021 melalui Zoom Cloud Meeting, dan ditayangkan secara langsung melalui Youtube Arsip Nasional RI.

Webinar diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Pelaksana Tugas Deputy Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati. Ia menyampaikan bahwa webinar ini merupakan salah satu

cara untuk meningkatkan kapabilitas preservasi audiovisual mengingat banyaknya jumlah koleksi arsip kaset atau *tape* yang dimiliki oleh ANRI dan instansi-instansi pemerintah lainnya di Indonesia.

Webinar ini diikuti oleh kurang lebih 1129 peserta yang berasal dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah dari dalam serta luar negeri, serta menghadirkan dua pemateri dari Australia, yaitu Ray Edmondson dan Mick Newnham.

Dalam paparannya bertajuk *Magnetic Tape Preservation and Challenges*, Ray Edmondson menyampaikan informasi seputar karakter media penyimpanan

audiovisual, metadata serta properti intelektual dari sebuah arsip, dan manajemen lokasi. Selanjutnya, dalam materi berjudul *Magnetic Media Preservation and Accessibility*, Mick Newnham menyampaikan informasi seputar proses migrasi media arsip secara digital yang meliputi infrastruktur seperti akomodasi, tenaga, sistem TI, dsb dan pengecekan kualitas dan *checksums* seperti *status format*, *ongoing migration timing*, dan *digital collection*. Untuk lebih detailnya, materi kegiatan dapat diperoleh dengan mengunjungi tautan <https://anri.go.id/publikasi/materi-kegiatan>. (ag)



FOTO: DOK. ANRI

Kepala Perpustakaan Nasional RI beserta jajaran dan Kepala Arsip Nasional RI beserta jajaran melakukan pertemuan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama di bidang pembinaan, akreditasi, pengelolaan arsip dan naskah serta bahan pustaka, serta penyelamatan arsip terjaga dan kebencanaan (21/09/21).

Perkuat Sinergi dan Kerja Sama KEPALA ANRI LAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN KEPALA PERPUSNAS RI

Jakarta (22/09) - Bertempat di gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto melaksanakan audiensi dengan Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando. Pertemuan

kedua Kepala lembaga tersebut untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antara ANRI dengan Perpusnas RI.

Salah satu agenda pertemuan ini adalah membahas kerja sama dalam menyukseskan Pekan Memori Dunia yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan ini, kedua belah pihak juga membahas mengenai kolaborasi di bidang pembinaan, akreditasi, pengelolaan arsip dan naskah serta bahan pustaka, serta penyelamatan arsip terjaga dan kebencanaan. **(tgh)**



WAGUB NTB DUKUNG TERCIPTANYA ARSIPARIS YANG BERKUALITAS MELALUI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ARSIPARIS

Nusa Tenggara Barat (27/09) - Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XXII di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 30 September 2021 di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah yang dihadiri langsung oleh

Kepala ANRI, Imam Gunarto di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin, 27 September 2021.

Dalam kesempatannya, Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan kebutuhan Arsiparis di Provinsi NTB masih jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan.

Keberadaan tenaga fungsional Arsiparis yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, harus menjadi perhatian.

“Saya berharap kegiatan hari ini akan menghasilkan gagasan yang tepat dan aktual untuk meningkatkan komitmen dan semangat bagi tenaga kearsipan yang sudah ada,

sekaligus meningkatkan semangat untuk menyiapkan tenaga kearsipan baru yang handal dan bersertifikat, sehingga memberi pengaruh yang lebih besar bagi pengelolaan arsip kedepannya,” ujar wanita yang akrab disapa Ummi Rohmi ini.

Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis di Provinsi NTB sebanyak 92 orang dan pada kegiatan sertifikasi kali ini diikuti oleh 40 orang peserta, sedangkan sisanya sebanyak 52 orang akan diikutsertakan pada kesempatan berikutnya.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto menerangkan bahwa dalam perhitungan jumlah

N FUNGSIONAL ARSIPARIS ANGGKATAN XXI OMPETENSI (TIK) - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



FOTO: DOK. ANRI

Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto beserta jajaran, dan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah beserta jajaran berfoto bersama setelah membuka Kegiatan Sertifikasi Fungsional Arsiparis Angkatan XXII, Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB (27/09/21).

kebutuhan Arsiparis di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB diperkirakan sebanyak 1.528 orang. Pemprov NTB diperkirakan membutuhkan arsiparis sebanyak 211 orang.

“Perkiraan jumlah kebutuhan Arsiparis sebanyak ini pada dasarnya merupakan jumlah ideal yang dibutuhkan Provinsi NTB apabila ingin meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB sesuai dengan mandat negara berdasarkan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,”

jelas Imam Gunarto.

Lebih lanjut, Kepala ANRI berharap kepada Gubernur Provinsi NTB untuk dapat memberikan dukungan kepada Dinas Kearsipan Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB agar kinerja penyelenggaraan kearsipan meningkat secara signifikan. Salah satunya dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan Arsiparis yang tidak hanya cukup, namun juga cakap dalam melaksanakan mandat negara dibidang kearsipan.

Pelaksanaan sertifikasi Arsiparis ini mengacu pada PermenpanRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana

telah diubah dengan PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2016, dan PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, serta Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi JF Arsiparis.

Diharapkan pelaksanaan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XXII dapat memelihara, meningkatkan, dan melindungi kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis serta memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis yang profesional. (ab)



Rektor Universitas Mataram beserta jajaran dan Kepala ANRI beserta jajaran berfoto bersama setelah melakukan audiensi yang membahas wacana pembukaan program studi bidang kearsipan (27/09/21).

FOTO: DOK. ANRI

ANRI MELAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN UNIVERSITAS MATARAM

Nusa Tenggara Barat (27/09) -

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto beserta jajaran melaksanakan kegiatan audiensi dengan Rektor Universitas Mataram (UNRAM), Lalu Husni. Audiensi terkait dengan tindak lanjut pembahasan pembukaan program studi bidang kearsipan di UNRAM ini, diterima langsung oleh Rektor UNRAM, Lalu Husni beserta jajaran.

Kepala ANRI, Imam Gunarto memberi dukungan penyelenggaraan kearsipan di UNRAM dan mengusulkan wacana untuk pembukaan program studi bidang

kearsipan.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Sumrahadi mengusulkan agar jenjang pendidikan dapat dimulai dari Diploma 3 dan 4, serta Strata 1.

“Sebagai bentuk dukungan Indonesia yang memasuki industri 4.0, maka jurusan kearsipan yang akan dibuka bisa lebih mengarahkan untuk pengelolaan arsip digital,” tegas Sumrahadi

Sementara itu, UNRAM menyambut baik kedatangan ANRI dalam rangka tindak lanjut pengusulan pembukaan program studi

bidang kearsipan.

Rektor UNRAM, Lalu Husni menjelaskan bahwa dalam rangka pembukaan program studi baru bidang kearsipan dibutuhkan studi kelayakan D3 dan D4, serta SDM pengajar yang memiliki kompetensi memadai.

Dibutuhkan komunikasi yang intens dan kerja sama ANRI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam dukungan pembentukan program studi bidang kearsipan ini.

Diharapkan jika telah terbentuknya program studi bidang kearsipan dapat menarik banyak peminat untuk mempelajari bidang kearsipan. **(ab)**



Direktur Kearsipan Daerah II, Amieka Hasraf menyerahkan Citra Daerah Kota Padang Panjang kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul. Acara serah terima dilakukan di Aula Senja Kenangan, Pondok Promosi Kota Padang Panjang (30/09/21).

FOTO: DOK-ANRI

ANRI SERAHKAN CITRA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Kota Padang Panjang (30/09) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diwakili oleh Direktur Kearsipan Daerah II, Amieka Hasraf menyerahkan Citra Daerah Kota Padang Panjang kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul. Acara serah terima dilakukan di Aula Senja Kenangan, Pondok Promosi Kota Padang Panjang pada hari Kamis, 30 September 2021.

Dalam sambutan Kepala ANRI yang dibacakan oleh Direktur Kearsipan Daerah II pada acara Penyerahan Buku Citra Daerah Kota Padang Panjang dan Pembukaan Bimbingan Teknis Implementasi e-Arsip Terintegrasi Aplikasi SRIKANDI, Amieka Hasraf memaparkan bahwa Penyerahan Citra Daerah ini merupakan program ANRI dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai khazanah

arsip statis yang tersimpan di ANRI mengenai perjalanan sejarah Kota Padang Panjang.

“Citra Daerah merupakan suatu kolaborasi antara ANRI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, dan sejarawan dari Kota Padang Panjang. Program ini sangat berpotensi menghasilkan sebuah mozaik sebagai upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam,” ujar Kepala ANRI.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul mengatakan penerimaan Citra Daerah ini juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menjaga dan melestarikannya. “Arsip Citra Daerah sangat berharga, dan merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke

generasi,” jelas Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul.

Kota Padang Panjang dipilih sebagai penerima Buku Citra Daerah karena berhasil menjadi juara ketiga pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Terampil di level nasional, selain Padang Panjang juga berhasil menduduki peringkat kedua terbaik se-Sumatera Barat dalam hal penyelenggaraan kearsipan. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan dari Kota Serambi Mekah tersebut.

Selain menerima citra daerah, Wakil Wali Kota Padang Panjang juga membuka dan meresmikan Bimbingan Teknis Implementasi e-Arsip Terintegrasi Aplikasi SRIKANDI yang diselenggarakan pada 30 September s.d. 1 Oktober 2021. (hr)



FOTO: DOK. ANRI

Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto melakukan audiensi dengan Kepala ANRI, Imam Gunarto di Kantor ANRI, Ampera Raya, Jakarta (04/10/21).

Konsultasi Implementasi Aplikasi Srikandi BUPATI KENDAL AUDIENSI DENGAN KEPALA ANRI

Jakarta (04/10) - Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto melakukan audiensi dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto di Kantor ANRI, Ampera Raya, Jakarta, 4 Oktober 2021. Audiensi tersebut bertujuan untuk konsultasi implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pada kesempatan ini, Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto menyampaikan harapannya agar ANRI dapat menerapkan penyelenggaraan kearsipan secara digital, sehingga di daerah dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh ANRI dalam penyelenggaraan

kearsipan secara digital.

Sementara itu, Kepala ANRI, Imam Gunarto sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang telah mengimplementasikan SRIKANDI dan berharap ke depan dapat membangun sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kearsipan. **(is)**

Jakarta (07/10) - Sebanyak 8.201 nomor arsip terkait kegiatan ASIAN Games 2018 diserahkan Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam acara yang digelar secara luring dan daring. Selain penyerahan arsip statis, pada kesempatan yang sama juga turut dilaksanakan deklarasi komitmen Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kemenpora.

Menurut Gatot, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Kemenpora untuk menjaga dan merawat arsip sebagai aset bangsa yang tercipta di Kemenpora. "Karena seperti yang kita tahu, arsip dapat berperan sebagai memori kolektif bangsa yang dapat mewarisi berbagai informasi kepada anak cucu kita. Seperti halnya peristiwa ASIAN Games 2018, nantinya dapat diketahui generasi mendatang melalui arsip yang telah diserahkan oleh Kemenpora kepada ANRI. Selanjutnya, ini pun menjadi motivasi bagi kami untuk menjaga, merawat dan menyelamatkan arsip peristiwa penting lainnya seperti PON yang saat ini digelar di Papua, *event* olah raga lain serta kegiatan kepemudaan yang menjadi binaan Kemenpora, arsipnya juga harus diselamatkan," jelas Gatot.

Gatot juga berharap dengan adanya penyerahan arsip statis, deklarasi GNSTA dan sosialisasi pedoman pengelolaan arsip dinamis, Kemenpora dapat memperoleh predikat pengelolaan arsip yang



ANRI TERIMA ARSIP STATIS ASIAN GAMES 2018 DARI KEMENPORA

baik dari tahun ke tahun, memotivasi untuk terus melakukan pembenahan kearsipan di Kemenpora yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Sementara itu, Imam Gunarto menyampaikan apresiasi yang tinggi dari ANRI kepada Kemenpora yang telah menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI. "Arsip statis yang menjadi memori kolektif bangsa jika memiliki signifikansi skala internasional, juga bisa kita ajukan untuk diakui sebagai *Memory of the World* oleh UNESCO," terang Imam Gunarto. Ditambahkan olehnya, Kemenpora juga sudah berkomitmen mendeklarasikan GNSTA

yang menjadi spirit di hulu untuk peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Dengan adanya GNSTA dapat membangun komitmen seluruh jajaran di Kemenpora untuk bersama-sama menjadikan kearsipan sebagai program yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, penyerahan arsip statis ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Kemenpora kepada ANRI. Adapun penyerahan arsip statis ini merupakan kewajiban setiap pencipta arsip sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (tk)

MOWEEK (Pekan Memori Dunia) "From New York to Beograd"



Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko (kiri) menyerahkan secara simbolis salinan autentik arsip terjaga tentang varietas tanaman, desain industri, merek, dan hak cipta kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto (kanan) (11/10/21).

FOTO: DOK. ANRI

BRIN SERAHKAN SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA KEPADA ANRI

Jakarta (11/10) - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyerahkan secara simbolis salinan autentik arsip terjaga tentang varietas tanaman, desain industri, merek, dan hak cipta kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto. Salinan arsip terjaga yang diserahkan tersebut berada pada kurun waktu tahun 1995 s.d. 2018 yang terdiri dari 69 nomor arsip. Penyerahan salinan autentik arsip terjaga ini dilaksanakan secara daring pada acara pembukaan Pekan Memori Dunia *From New York to Beograd* yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Menurut Imam Gunarto,

penyerahan salinan autentik arsip terjaga yang telah dilakukan BRIN merupakan salah satu implementasi Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara periode 2014-2019 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga. "Kami mengapresiasi BRIN yang terus menunjukkan komitmen untuk menyelamatkan arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional," terang Imam.

Sementara itu, Handoko pun menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wujud bahwa BRIN terus berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan arsip negara. "Kami juga memiliki arsip yang

berpotensi memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional. Kami juga berencana untuk menyerahkan arsip dari zaman Hindia Belanda, khususnya terkait riset," jelas Handoko.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 saat itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kini menjadi bagian dari BRIN juga telah menyerahkan salinan autentik arsip terjaga sebanyak 69 berkas. "Dengan menyerahkan salinan autentik arsip terjaga, diharapkan arsip tersebut dapat terjaga keutuhan dan keselamatannya di tangan lembaga yang profesional, yaitu di ANRI," tambah Handoko. **(tk)**

Jakarta (11/10) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta didukung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menggelar Pekan *Memory of the World* (MOW) secara daring dan ditayangkan melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI (11/10).

Dalam laporannya Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pada 21 September 2021 telah dilakukan serah terima kepengurusan Komite MOW Indonesia dari LIPI kepada ANRI. "Komite MOW ini memiliki tugas mengoordinasikan proses pengajuan *documentary heritage* secara nasional dan kemudian dilakukan secara bersama-sama dengan pakar untuk menentukan *documentary heritage*, seperti apa yang akan diajukan sebagai MOW ataupun *memory asia pacific*," jelas Imam Gunarto.

Tjahjo Kumolo juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Pekan MOW. "Saya sampaikan dukungan dan apresiasi kegiatan Pekan *Memory of the World* ini sebagai sarana sosialisasi pentingnya warisan dokumenter dan arsip sebagai memori kolektif bangsa," jelas Tjahjo Kumolo.

Pekan MOW yang digelar ANRI bertujuan untuk melakukan pengalangan dan pendalaman sosialisasi persiapan pengajuan warisan dokumenter sebagai MOW



Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menyampaikan peran ANRI, Perpusnas RI, BRIN, BPIP disertai dukungan UNESCO, mampu menghimpun arsip di mana generasi-generasi mendatang akan terus mengikuti dan mempelajari dari pendiri-pendiri bangsa ini (07/10/21).

FOTO: DOK. ANRI

MENTERI PANRB BUKA KEGIATAN PEKAN MEMORY OF THE WORLD

ke UNESCO yang akan ditutup pada 30 November 2021. Ada 3 koleksi *documentary heritage* yang akan diajukan Indonesia, yakni arsip pidato Sukarno *To Build the World Anew* yang disampaikan pada sidang umum PBB. Pidato ini merupakan representasi dari puncak pemikiran dan perjuangan Bung Karno dalam memimpin Indonesia dan memiliki pengurus signifikan secara internasional.

Kedua, khazanah arsip KTT Gerakan Non Blok pertama yang diajukan secara *joint nomination* bersama dengan Serbia, Yugoslavia dan Aljazair. Pada pengajuan ini, Indonesia juga sedang mengupayakan dengan India, Mesir, dan Ghana, serta sudah mendapat *letter of support* dari beberapa negara yang hadir pada KTT tersebut. Koleksi ini merupakan koleksi

ANRI dan koleksi negara-negara yang melakukan *joint nomination* dengan ANRI. Ketiga, khazanah Hikayat Aceh yang diajukan bersama-sama antara Indonesia dengan Belanda. Koleksi ini merupakan koleksi milik Perpusnas RI dan KITLV Belanda.

Dalam pembukaan Pekan MOW ini turut hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Ketua Harian KNIU Itje Chodidjah, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Kepala Perpusnas RI diwakili oleh Sekretaris Utama Perpusnas RI Woro Titi Haryanti, *Director and Representative UNESCO Office* Jakarta Mohamed Djelid, Dewan Pakar MOW Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Sejarahwan Prof. Dr. Asvi Warman, Sejarahwan Prof. Adrian Vickers, Duta Arsip Rieke Diah Pitaloka. (sa)

MOWEEK (Pekan Memori Dunia) "From New York to Beograd"

Bandung Conference 1955

FOTO: DOK. ANRI



- Creation of a 'Third World'
- Other leaders included Prince Sihanouk and Zhou En Lie
- Sukarno as leader of international revolution



Prof. Adrian Vickers saat menyampaikan materi tentang Sukarno dan Konstelasi Dunia Menghadapi Perang Dingin (*World Significance Point 7.0*) (11/10/21).

WEBINAR SUKARNO MENGGUNCANG DUNIA DALAM KEGIATAN PEKAN MEMORI DUNIA

Jakarta (11/10) - Sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Memori Dunia "*From New York to Beograd*", Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Webinar Sukarno Mengguncang Dunia melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dan disiarkan secara langsung melalui saluran akun Youtube Arsip Nasional RI. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi turut hadir sebagai pembicara kunci yang menyampaikan Pemikiran Sukarno bagi Dunia. Hadir pula Prof. Adrian Vickers yang menyampaikan materi tentang Sukarno dan Konstelasi Dunia Menghadapi Perang Dingin (*World Significance Point 7.0*). Hadir pematery lainnya adalah Duta Arsip, Rieke Diah Pitaloka, Prof. Wardiman Djojonegoro

yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi The Habibie Center, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asvi Warman Adam.

Menurut Rieke terdapat enam pokok pikiran dalam Pidato Presiden Sukarno "*To Build the World Anew*", yaitu penegasan perdamaian dunia tugas seluruh umat manusia, Pancasila sebagai dasar piagam universal untuk kesejahteraan umat manusia, dukungan bagi kemerdekaan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, koeksistensi dan peluncutan senjata, reorganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan cita-cita membangun dunia.

Sementara itu, Prof. Wardiman Djojonegoro mengemukakan bahwa alangkah baiknya apabila Nominasi Pidato Presiden Karno di Sidang Umum PBB, dilengkapi dengan pleidoi di Bandung dan pidato di pembukaan Konferensi Asia Afrika, karena akan memperkuat pandangan dan visi Presiden Sukarno, dari semasa perjuangan sampai menjadi presiden.

Demikian pula peneliti Asvi Warman Adam menyatakan bahwa sebaiknya pidato terdahulu Bung Karno sebelum pidato "*To Build the World Anew*" juga turut disertakan disebut. Hal tersebut dikarenakan pidato Bung Karno di PBB adalah akumulasi dari pemikiran dan gagasan sejak sebelum Indonesia merdeka.

Pada webinar ini menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya semua pihak yang terlibat mendukung segala langkah yang akan dijalankan ANRI sebagai Komite Nasional *Memory of the World* (MOW) Indonesia dalam penyelamatan warisan dokumenter bangsa untuk diakui di tingkat dunia dalam MOW UNESCO sebagai jalan pemahaman tentang *knowledge of each other's lives*, kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai registrasi MOW saja, tetapi menentukan tindak lanjut setelah suatu warisan dokumenter diakui sebagai ingatan dunia, dan menggali keterkaitan gagasan dan ketokohan Sukarno sebagai tokoh anti kolonialisme-imperialisme (termasuk menawarkan Pancasila sebagai bagian dari nilai universal, mendorong koeksistensi damai dan pelucutan senjata dalam kerangka membangun tata dunia baru) dan menempatkannya dalam konteks politik internasional masa perang dingin. **(tk)**

Jakarta (07/10) - Sebagai bagian dari rangkaian acara Pekan *Memory of the World* (MOW), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Webinar Internasional dengan tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok I: *From Bandung to Beograd* pada Selasa, 12 Oktober 2021. Acara yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ini, disiarkan melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI.

Acara webinar yang diawali dengan penayangan video penominasian KTT Gerakan Non-Blok I sebagai MOW ini, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto, yang menyampaikan rasa bangga dan harunya atas terselenggaranya rangkaian kegiatan Pekan MOW dan adanya dukungan dari para pemimpin nasional untuk pengajuan arsip KTT Gerakan Non-Blok I sebagai bagian dari MOW United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Dalam sambutannya, Imam Gunarto juga memohon dukungan dari berbagai pihak dalam rangka pengajuan khazanah KTT Gerakan Non-Blok I untuk menjadi salah satu MOW. "Hingga saat ini, dari ratusan enkripsi UNESCO, hanya terdapat lima yang berasal dari Indonesia. Dengan mengajukan KTT Gerakan Non-Blok I ini, diharapkan koleksi *Memory of the World* dari Indonesia akan bertambah," jelas Imam Gunarto.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian A. Ruddyard, selaku Pembicara Kunci (*Keynote Speaker*), menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan publik akan semakin memahami terkait pendaftaran arsip KTT Gerakan Non-Blok I pada MOW telah didukung



Jürgen Dinkel dari University of Leipzig, Jerman saat mengisi materi pada Webinar International "KTT Gerakan Non-Blok I: From Bandung to Beograd" (07/10/21).

ANRI Gelar Webinar Internasional KTT GERAKAN NON-BLOK I: FROM BANDUNG TO BEOGRAD

sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Webinar Internasional KTT Gerakan Non-Blok I: *From Bandung to Beograd* menghadirkan beberapa narasumber, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Narasumber tersebut di antaranya dari University of Leipzig, Jerman, Jürgen Dinkel, mantan Duta Besar Indonesia untuk Serbia, Samuel Samson, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Penny Dewi Herasati, dan Plt. Deputi Konservasi Arsip ANRI, Multi Siswati.

Dalam webinar ini dipaparkan mengenai perkembangan proses penominasian arsip KTT Gerakan Non-Blok I sebagai MOW. Penominasian Arsip KTT Gerakan Non-Blok I telah dilakukan sebelumnya pada periode 2016-2017, namun belum berhasil atas pertimbangan arsip yang diajukan belum berimbang (*unbalanced*) antara KTT satu dengan

yang lain. Sehingga, diputuskan bahwa arsip yang diajukan pada periode pengajuan berikutnya hanya arsip KTT Gerakan Non-Blok I, yang merupakan tonggak sejarah kelahiran Gerakan Non-Blok. ANRI telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penominasian arsip KTT Gerakan Non-Blok I, baik skala nasional maupun internasional. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dikordinasikan dengan mitra calon *co-nominator* atau *supporter*, terutama melalui jalur diplomatik, selain melalui jalur antarkomunitas kearsipan ANRI.

Pekan MOW yang digelar ANRI bertujuan untuk melakukan pendalaman sosialisasi persiapan pengajuan warisan dokumenter sebagai MOW ke UNESCO. Dengan pengajuan warisan dokumenter ini akan membantu terdapatnya akses universal dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk menjaga warisan dokumenter sebagai peradaban dunia dan untuk mencerahkan kehidupan saat ini ataupun mendatang. **(rra)**

MOWEEK (Pekan Memori Dunia) "From New York to Beograd"

FOTO: DOK. ANRI



Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan Kementerian Sekretariat Negara, Sinta Puspitasari saat memaparkan materi pada MOWEEK (13/10/21).

PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MENUJU MEMORI KOLEKTIF BANGSA

Jakarta (13/10) - Sebagai tindak lanjut penerapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Webinar Penyelamatan Memori Kolektif Bangsa Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Penyelamatan Arsip Penanganan Pandemi COVID-19 Menuju Memori Kolektif Bangsa (MKB).

Salah satu kegiatan dari Pekan Memori Dunia: *From New York to Beograd* ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI. Adapun narasumber

yang hadir di antaranya Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan Kementerian Sekretariat Negara, Sinta Puspitasari, Arsiparis Ahli Utama Kementerian Kesehatan RI, dr. Desak Made Wismarini, Kepala Biro SDM dan Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Eny Supartini, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus, Wahyu Haryanti, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Sebelas Maret, Yani Maryudiasti.

Pelaksana Tugas Deputy Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati saat pembukaan acara menyampaikan, rakor ini membahas dan mendiskusikan kearsipan yang sangat khusus, yakni penyelamatan arsip penanganan COVID-19 yang

dilakukan secara nasional. Oleh karena itu, perlu partisipasi aktif dari seluruh peserta agar dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan dalam program dan kegiatan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta perguruan tinggi.

Penyelamatan arsip COVID-19 memiliki kekhususan karena terkait suatu upaya untuk menyelamatkan arsip dari peristiwa luar biasa yang melanda hampir seluruh wilayah dan berdampak sangat luas, serta memengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Arsip COVID-19 ini harus segera diselamatkan oleh lembaga kearsipan pada kesempatan pertama untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Direktur Akuisisi ANRI, Rudi Anton menyampaikan peristiwa luar biasa pandemi COVID-19 perlu diantisipasi dalam konteks kearsipan oleh ANRI. "Kita harus menyelamatkan bukti akuntabilitas kinerja dan bukti akuntabilitas tadi bisa kita gunakan sebagai sumber pembelajaran. Artinya, bukti akuntabilitas bisa dikatakan dalam konteks kekinian, namun sumber pembelajaran tidak berhenti dalam konteks kekinian. Ini akan berlanjut terus," jelas Rudi Anton.

Arsip penanganan COVID-19 merupakan sebuah warisan dokumenter yang layak dijadikan sebuah MKB akan pentingnya rekaman peristiwa dan semua yang telah dilakukan instansi pemerintah dalam menangani pandemi. Selanjutnya, arsip penanganan COVID-19 sebagai MKB tersebut tidak terpisahkan dari Memori Dunia. **(sa)**



FOTO: DOK. ANRI

Pelaksana Tugas Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani (kiri) dan Sekretaris Utama Perpustakaan RI, Woro Titi Haryanti (kanan) disaksikan oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto (tengah) saat menunjukkan berita acara perjanjian kerja sama peningkatan layanan publik perpustakaan dan kearsipan (13/10/21).

PERPUSNAS RI DAN ANRI TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jakarta (13/10) - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tanda tangani perjanjian kerja sama peningkatan layanan publik perpustakaan dan kearsipan, Kamis, 30 September 2021.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan RI, Woro Titi Haryanti dan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani dengan disaksikan oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto di Kantor Perpustakaan RI, Jakarta, 13 Oktober 2021.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan

untuk meningkatkan hubungan kedua lembaga dalam rangka Peningkatan Layanan Publik Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan secara nasional;
- b. Penyelamatan arsip dan bahan pustaka melalui pertukaran informasi di dalam dan luar negeri;
- c. Pengembangan sistem preservasi dan sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penanggulangan bencana berskala nasional terhadap arsip dan bahan pustaka;
- e. Pemanfaatan arsip dan bahan pustaka melalui pameran dan publikasi bersama;
- f. Peningkatan akses arsip, bahan pustaka dan jurnal ilmiah dalam rangka penelitian dan pengkajian kearsipan dan perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan program Memori Kolektif Bangsa (MKB), Ingatan Kolektif Nasional (IKoN) dan *Memory of the World*;
- h. Pembangunan Jaringan Informasi Kearsipan dan Perpustakaan Nasional; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati oleh Perpustakaan RI dan ANRI. **(md/is)**



Peluncuran website keputakaan dan arsip kepresidenan ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Kepala Perpustakaan RI, Muhammad Syarif Bando dan Kepala ANRI, Imam Gunarto beserta jajarannya (13/10/21).

FOTO: DOK. ANRI

PERPUSNAS RI DAN ANRI LAUNCHING WEBSITE KEPUSTAKAAN DAN ARSIP KEPRESIDENAN

Jakarta (13/10) - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkolaborasi meluncurkan *website* keputakaan dan arsip kepresidenan Republik Indonesia. Acara Peluncuran dilaksanakan di gedung Perpustakaan RI, Jakarta, 13 Oktober 2021. Peluncuran *website* keputakaan dan arsip kepresidenan ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Kepala Perpustakaan RI, Muhammad Syarif Bando dan Kepala ANRI, Imam Gunarto beserta jajarannya.

Website keputakaan kepresidenan dapat diakses di <https://keputakaan-presiden.perpusnas.go.id/home/>. Sementara Arsip Kepresidenan dapat diakses melalui <https://anri-arsipkepresidenan.ih heritage.id/>.

Situs web keputakaan dan arsip kepresidenan Republik Indonesia ini dibangun sebagai pusat informasi dan keputakaan tentang presiden-presiden dan kepresidenan di Indonesia. Penyediaan akses dan rujukan ke informasi dan bahan

pustaka dan arsip ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dan masyarakat luas akan informasi yang memiliki nilai historis, khususnya tentang presiden dan berbagai aspek kepresidenan di Indonesia.

Situs web ini dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh Perpustakaan RI sejak tahun 2006. Berlandaskan Nota Kesepahaman di tahun 2021, pengelolaan dan pengembangan konten situs web tersebut selanjutnya dilakukan bersama dengan ANRI. **(md/is)**

Jakarta (13/10) - Naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka yang ditulis pada abad ke 17 M. Karya sastra kuno yang diajukan menjadi nominasi *Memory of the World* (MOW).

Peneliti Bidang Agama dan Tradisi Keagamaan Melayu-Aceh Kementerian Agama, Fakriati menyampaikan bahwa naskah Hikayat Aceh ini berkisah tentang masa Kejayaan Sultan Iskandar Muda. Selain itu, juga berisi mengenai tradisi, toleransi yang dibangun oleh tokoh utama Sultan Iskandar Muda.

Dalam naskah Hikayat Aceh, Fakriati mencoba merangkai isi naskah bahwa di dalamnya terdapat toleransi yang dibangun dari beberapa unsur, di antaranya sultan/pejabat negara, ulama, rakyat, adat dan agama.

“Ada keterikatan antar unsur ini secara utuh. Saling mendukung sehingga membentuk nilai-nilai toleransi,” ungkapnya dalam Webinar Hikayat Aceh *Road To Memory of the World*, yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 13 Oktober 2021.

Peneliti Filologi Melayu-Aceh, Hermansyah mengatakan naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka karena tidak ada banyak salinan. Saat ini hanya terdapat tiga naskah Hikayat Aceh, dua di antaranya terdapat di Universitas Leiden Belanda dan satu di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Dijelaskan, Hikayat Aceh menceritakan kisah para Sultan dan Kesultanan Aceh sebelum dan di masa Sultan Iskandar Muda pada 1590-1636 M. Naskah kuno ini pun memenuhi nilai-nilai historis baik melalui sumber primer sejarah, peristiwa dan ketokohan.

Sementara itu Pakar Pendidikan dan Sejarah, Wardiman Djojonegoro menceritakan bahwa pada tahun 2017, Perpusnas RI telah mengusulkan Hikayat Aceh untuk menjadi memori dunia tahun 2018. Namun, pada



NASKAH HIKAYAT ACEH DIUSULKAN MENJADI MEMORI DUNIA

tahun tersebut pendaftaran MOW oleh UNESCO ditunda. Meski begitu proses penyelesaian naskah nominasi tetap dilanjutkan.

“Pada tahun ini pendaftaran kembali dibuka, dan Hikayat Aceh akan diajukan menjadi nominasi MOW. Karena selain langka, naskah ini agak berbeda dari naskah melayu lainnya. Tidak menceritakan tentang raja tetapi bercerita tentang keagungan raja,” ungkapnya.

Dukungan terhadap pengajuan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi MOW juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Praregistrasi Hikayat Aceh sebagai MOW 2019 pada Oktober 2018 lalu.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan MOWEEK sebagai bentuk sinergitas antara Perpusnas RI dengan ANRI. Selain itu, Perpusnas bersama

ANRI melakukan integrasi web portal dengan meluncurkan Web Portal Memori Kepresidenan RI.

Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan, dengan dipilihnya Kepala ANRI sebagai Ketua Komite Nasional MOW menjadi sebuah langkah besar yang dilakukan untuk memulai kerja sama.

“Ini sebuah misi yang akan kita emban ke depan, sehingga misi peran kedua institusi makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komite Nasional MOW Indonesia, Imam Gunarto menyampaikan harapannya terhadap usulan Hikayah Aceh menjadi MOW. “Saya sangat berharap upaya kita dalam mengajukan naskah ini untuk memperoleh international register MOW UNESCO dapat berhasil dengan baik, dan kemudian kita lakukan kapitalisasi untuk kepentingan nasional maupun internasional di kemudian hari”, terang Imam Gunarto. **(md/ls)**



FOTO: DOK. ANRI

The Signing of Nomination Form of the First Non Aligned Movement Summit Meeting Archives

penandatanganan formulir nominasi oleh Kepala ANRI, Serbia dan Aljazair (14/10/21).

Talking

Roundtable Meeting : NOMINATION OF THE FIRST NON-ALIGNED MOVEMENT SUMMIT MEETING ARCHIVES AS THE MEMORY OF THE WORLD

Jakarta (14/10) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan kegiatan *Roundtable Meeting: Nomination of the First Non-Aligned Movement Summit Meeting Archives as the Memory of the World* pada Kamis, 14 Oktober 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Pekan *Memory of the World* (MOW).

Pertemuan ini dihadiri oleh Para Kepala Arsip Nasional dan Duta Besar negara-negara pemrakarsa serta beberapa negara anggota seperti India, Indonesia, Ghana, Mesir, Serbia dan Aljazair, Wakil Delegasi Tetap RI Untuk UNESCO, Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), Arsiparis yang bertanggung jawab atas arsip Pertemuan KTT Gerakan Non-Blok Pertama, dan staf dari ANRI serta Kemenlu RI.

Pertemuan ini bertujuan untuk

membahas dan mendapatkan dukungan dan komitmen bersama dalam menominasikan Arsip KTT GNB I sebagai register untuk Memori Dunia, UNESCO. Signifikansi dunia yang tersimpan dalam Arsip KTT GNB I menjadi alasan penting bagi ANRI untuk menominasikan arsip-arsip tersebut guna mendapatkan pengakuan dunia dan selanjutnya memberikan pengetahuan dan inspirasi kepada masyarakat dunia. Adapun arsip tersebut terdiri dari 71 file arsip tekstual, 226 foto, dan 9 film.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Delegasi Tetap RI Untuk UNESCO, Prof. Ismunandar yang memberikan paparan tentang Program MOW UNESCO. Ia menjelaskan tentang manfaat Penominasian Warisan Dokumenter dalam Register Internasional MOW UNESCO, yaitu untuk memperkuat jati diri bangsa dan keberlangsungan bangsa di masa depan, sebagai pengingat sejarah untuk masyarakat

masa kini dan mendatang, serta melindungi dan melestarikan warisan dokumenter dengan aksesibilitas universal serta permanen.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Dr. Itje Chodidjah juga menyampaikan bahwa KNIU mendukung semua langkah yang akan dilakukan ANRI selaku pimpinan Komite Nasional Memori Indonesia Dunia, agar upaya dalam menyelamatkan warisan dokumenter bangsa dapat diakui di tingkat dunia, dalam Memori Dunia UNESCO.

Acara dilanjutkan dengan Diskusi Rapat yang dipimpin oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dimana setiap negara perwakilan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terkait Penominasian Arsip KTT GNB I sebagai register untuk Memori Dunia, dan diakhiri dengan penandatanganan formulir nominasi oleh Kepala ANRI, Serbia dan Aljazair. **(enu)**

Arsip Digital sebagai Alat Bukti Hukum

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik termasuk buktibukti hukum atau surat yang mempunyai kekuatan hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis/asli seperti akta notaris/akta PPA." (Pasal 5 (4))

Dapat diakses

- Arsip digital yang diperoleh dapat diakses oleh sistem elektronik;

Data ditampilkan

- Arsip digital yang diperoleh dapat ditampilkan oleh sistem elektronik;

Dijamin keutuhannya

- Keutuhan arsip digital tersebut harus terjamin;
- Mempertahankan hash-value (MD5, SHA1, SHA256) dan arsip digital yang dijamin;

Dapat dipertanggungjawabkan

- Seluruh prosedur dan kegiatan penanganan arsip digital harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara legal;
- Menggunakan best practices atau standar yang telah ada dan diterapkan dalam organisasi lainnya baik dalam skala lokal maupun global;
- Penerapan soundness konsep

Izazi Mubarak saat memaparkan materi tentang rancangan pembangunan laboratorium forensik arsip digital (14/10/21).

FOTO: DOK. ANRI

PENGUJIAN AUTENTIFIKASI ARSIP MENUJU PENOMINASIAN MEMORI DUNIA

Jakarta (14/10) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengadakan webinar dan diskusi panel seri ke-8 yang merupakan bagian dari Pekan Memori Dunia: *From New York to Beograd* yang dilaksanakan oleh ANRI dari tanggal 11 s.d. 15 Oktober 2021

Direktur Preservasi ANRI, Kandar dalam pengarahannya menyampaikan bahwa salah satu kelengkapan usulan penominasian arsip sebagai *Memory of the World* (MOW) adalah melakukan pengujian autentikasi arsip.

Kepada semua komunitas Kearsipan, Kandar juga mengungkapkan bahwa ANRI sebagai Komite Nasional MOW Indonesia saat ini akan melakukan registrasi memori kolektif yang masih tersebar di Indonesia sebagai memori kolektif dunia serta membantu memfasilitasi dan mengembangkan menjadi memori dunia.

Webinar ini menghadirkan pakar Sejarawan maupun pakar IT, Harto Juwono dan dimoderatori oleh Jatniko. Dalam pemaparannya tentang Pemanfaatan Arsip Autentik dan *Best Practice* dalam Pengujian Autentikasi Arsip, Harto Juwono menyampaikan bahwa ANRI sebagai *Centre of Excelent* harus membuka wawasan pelayanan publik yang luas baik bagi kalangan akademis maupun praktisi. Autentikasi arsip selain berkaitan erat dengan kekuatan legal formal arsip sebagai alat bukti, juga tidak bisa meninggalkan kaidah ilmiah.

Selanjutnya, dalam paparan Rancangan Pembangunan Laboratorium Forensik Arsip Digital, Izazi Mubarak menyatakan bahwa ANRI sebagai pengelola kearsipan harus menyiapkan diri dalam rangka proses pengelolaan kearsipan digital, yang nanti pasti jumlahnya sangat besar, serta persiapan kebijakan dan prosedur digital.

Dalam pemaparan materi Pengujian Autentikasi Arsip Digital, Prof. Yudho Giri Suchahyo menyampaikan bahwa digitalisasi dapat menjangkau akses yang lebih luas ke masyarakat. "Digitalisasi memungkinkan kita untuk menghadirkan masa lalu kita kedalam sebuah layar yang kemudian bisa dinikmati oleh khalayak yang lebih luas. Kita tidak menutup mata bahwa generasi muda sekarang lebih berbudaya layar ketimbang berbudaya baca. Mereka lebih suka memegang *handphone* ketimbang memegang buku. Itu adalah kesempatan buat kita untuk menghadirkan memori kolektif bangsa, yang tadinya hanya tersimpan di gedung ANRI untuk kita hadirkan secara digital dengan tidak mengurangi konten keasliannya, maupun keautentikannya sehingga bisa dinikmati oleh seluruh generasi di Indonesia", ungkapnya. (md/is)

Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prakoso menjelaskan bahwa akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang mampu menghadirkan arsip gender, menjadi ingatan dunia (15/10/21).

ARSIP KESETARAAN GENDER DI INDONESIA DIHARAPKAN TAMBAH DAFTAR DOKUMEN HERITAGE YANG DIAKUI MOW

Jakarta (15/10) - Sebagai upaya mendukung program kesetaraan gender yang digulirkan *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional akan mengajukan arsip terkait gender yang dikelola ANRI untuk menjadi *Memory of the World* (MOW).

“Jika arsip gender yang dikelola ANRI berhasil diakui sebagai MOW, maka akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena mampu menjawab tantangan UNESCO untuk menambah dokumen kesetaraan gender yang dapat diakui sebagai MOW,” terang Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin saat menjadi pembicara kunci Webinar Persiapan Arsip Gender sebagai MOW yang diselenggarakan ANRI (15/10).

Ditambahkan Lenny, dari 155 dokumen *heritage* yang telah diregistrasi sebagai MOW di Asia Pasifik oleh UNESCO, hanya 4 dokumen *heritage* yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Oleh karenanya, webinar ini menjadi upaya Indonesia untuk berkontribusi untuk menambah dokumen *heritage* tentang kesetaraan gender yang dapat diakui sebagai MOW. “Arsip yang menyimpan banyak informasi. Perjalanan ini menjadi memori kolektif bangsa, tidak hanya catatan sejarah masa lalu tetapi histori perjalanannya

mempengaruhi identitas diri dan makna kehidupan sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi di Indonesia. Jika arsip gender ini berhasil diregistrasi menjadi MOW, maka diharapkan daftar dokumen *heritage* tentang kesetaraan gender bertambah, sehingga tidak ada kesenjangan gender dalam MOW,” jelas Lenny.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati memaparkan bahwa arsip kesetaraan gender dapat menghasilkan mozaik kesetaraan gender di Indonesia. Arsip tersebut diharapkan dapat dinominasikan dalam MOW yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. “Saat ini kami telah melakukan identifikasi khazanah arsip kesetaraan gender yang dikelola ANRI, dibantu tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat ini telah teridentifikasi arsip Kartini dan Kongres Perempuan Indonesia ke-1 sebagai arsip kesetaraan gender yang dikelola ANRI yang merekam informasi sehingga dapat membangun rasa bangga dan cinta tanah air,” ungkap Multi.

Sementara itu, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prakoso, menegaskan bahwa upaya untuk meregistrasikan arsip kesetaraan gender didukung oleh berbagai pihak. Penominasian juga harus didukung oleh dokumen autentik yang layak dinilai UNESCO untuk menjadi MOW. Oleh karenanya, melalui webinar ini menjadi salah upaya persiapan penominasian. Karena jika sudah diakui sebagai MOW, akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang mampu menghadirkan arsip gender, menjadi ingatan dunia,” tambahnya. (tk)



FOTO: DOK. ANRI

Kepala ANRI, Imam Gunarto (kiri) saat menyerahkan sertifikat penghargaan karena telah menyerahkan arsip statisnya ke ANRI kepada Kepala BIG, Muh Aris Marfai (19/10/21).

SERAH TERIMA ARSIP STATIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL KE ANRI

Jakarta (19/10) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima arsip statis Badan Informasi Geospasial (BIG) pada puncak acara perayaan ulang tahun ke-52 BIG (19/10). Serah terima arsip statis BIG dilaksanakan oleh Kepala ANRI Imam Gunarto dan Kepala BIG Muh Aris Marfai.

Arsip statis yang diserahkan di antaranya arsip eks Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan BIG antara lain peta tematik, peta *land use*, dan peta *recommend development area*, peta citra satelit Aceh, peta dan atlas yang

berkaitan dengan bencana alam tsunami di Aceh tahun 2004.

“Penyerahan arsip statis ini menggambarkan keseriusan BIG dalam menangani dunia kearsipan, agar semakin tertib, baik dan maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawai semakin meningkat,” tegas Imam Gunarto. Imam Gunarto juga menyampaikan sejumlah pesan. Pertama, dengan diserahkannya arsip statis BIG ke ANRI, maka BIG telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang.

Kedua, BIG telah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statisnya ke ANRI. Ketiga, BIG telah mentaati dan melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyalamatan arsip negara periode 2014-2019. Acara penyerahan arsip statis BIG ke ANRI yang dilaksanakan di Hotel Aston Sentul ini juga dihadiri Direktur Akuisisi Arsip, Rudi Anton. (lh)



Kepala ANRI, Imam Gunarto menghadiri forum tertinggi kearsipan internasional ICA *General Assembly* yang dipimpin oleh Presiden ICA, David Fricker (20/10/21).

KEPALA ANRI HADIRI FORUM TERTINGGI KEARSIPAN INTERNASIONAL ICA *GENERAL ASSEMBLY* 2021

Jakarta (20/10) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menghadiri *International Council on Archives (ICA) General Assembly* atau Sidang Umum Dewan Kearsipan Internasional 2021. Pertemuan ini merupakan forum tertinggi kearsipan internasional yang

dihadiri Kepala Arsip Nasional dari negara-negara anggota ICA yang diadakan setiap tahun.

Pada kali ini, ICA mengadakan dua jenis rapat secara virtual yaitu Ordinary dan Extraordinary General Assembly yang dipimpin oleh Presiden ICA, David Fricker dari Australia.

Adapun hasil dari pertemuan tersebut antara lain kesepakatan tentang laporan, tata kelola, anggaran serta kegiatan konferensi dan kongres ICA. Selain itu, pada rapat *Extraordinary General Assembly* ini juga dibahas amandemen konstitusi ICA. **(agp)**



Bupati Blitar, Rini Syarifah dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman beserta jajaran saat berfoto bersama pasca pembahasan implementasi SRIKANDI di lingkungan Kabupaten Blitar (21/10/21).

FOTO: DOK. ANRI

Implementasikan SRIKANDI BUPATI BLITAR: KAMI SIAP SINERGI DENGAN ANRI

Jakarta (21/10) - Sebagai salah satu komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kabupaten Blitar, Bupati Blitar Rini Syarifah beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungan kerja ini diterima oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman, Direktur Preservasi, Kandar serta Kepala Pusat Data dan Informasi, M. Imam Mulyantono di Ruang Serbaguna Soemartini, Gedung A lantai 2.

“Kunjungan ini menjadi satu solusi buat kami di Kabupaten Blitar untuk mengimplemetasikan aplikasi

kearsipan SRIKANDI. Ini juga sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Blitar. Oleh karenanya, kami ingin ada sinergi, khususnya program dan kegiatan dalam implementasi SRIKANDI. Saya siap mendukung untuk digunakan di Kabupaten Blitar,” terang Rini.

Senada dengan hal tersebut, Andi Kasman menyambut baik komitmen Bupati Blitar untuk mengimplementasikan SRIKANDI. “Implementasi SRIKANDI ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo pada saat peringatan Hari Kearsipan ke-50. Bidang kearsipan saat ini harus mengadaptasi kemajuan teknologi dan menggunakan cara-cara baru. Dalam

implementasi SRIKANDI di Kabupaten Blitar, kami koordinasikan juga dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar serta diperlukan sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan terpenting dukungan pimpinan,” jelas Andi Kasman.

Selain itu, Rini juga menyampaikan apresiasinya atas Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang ada di ANRI sejak 31 Agustus 2009. Menurutnya, keberadaan diorama tersebut menjadi wahana edukasi yang sangat baik bagi para pengunjung, karena dapat mengetahui sejarah dan arsip perjalanan bangsa sampai dengan masa reformasi. **(tk/sa)**



Kepala ANRI, Imam Gunarto memotong pita sebagai simbol diresmikannya Pusat Studi Arsip Kebencanaan/Arsip Tsunami (21/10/21).

PERESMIAN PUSAT STUDI ARSIP KEBENCANAAN/ARSIP TSUNAMI

Aceh Besar (21/10) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan/ Arsip Tsunami. Peresmian tersebut dilaksanakan di Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST), Gampong Bakoi, Ingin Jaya, Aceh Besar.

Imam Gunarto menyampaikan bahwa arsip tsunami yang dimiliki BAST harus bisa diketahui oleh publik secara lebih luas, sebagai sarana pembelajaran untuk memberikan gambaran kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). “Kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk mendukung penguatan menuju Pusat Studi Kebencanaan/Tsunami. Pusat Studi Arsip Kebencanaan tsunami ini dipersembahkan untuk masyarakat Aceh dan dunia sebagai bagian dari edukasi”, ujar Imam.

Acara peresmian juga dilakukan bersamaan dengan pembukaan “Pameran Merawat Harapan Pasca Bencana”. Peresmian ditandai dengan

pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kepala ANRI Imam Gunarto. Pada kesempatan ini, hadir pula Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar dan Kepala BAST Muhamad Ihwan.

Peresmian Pusat Studi Arsip ini sekaligus membuka Pameran Arsip Tsunami “Merawat Harapan Pasca Bencana” di gedung BAST. (wn/md/lh)



FOTO: DOK. ANRI

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI M. Syarif Bando serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Aceh (22/10/21).

AUDIENSI KEPALA ANRI, KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI DAN KEPALA BKN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH

Aceh (22/10) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI M. Syarif Bando serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Aceh yang pada saat acara diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Taqwallah. Audiensi dilaksanakan dalam rangka penominasian Hikayat

Aceh sebagai Memory of the world dan Penguatan Pusat Studi Arsip Tsunami.

Imam Gunarto dalam sambutan singkatnya menjelaskan bahwa pada 2021 ANRI menerima tongkat estafet Komite Nasional *Memory of the World* (MOW) yang sejak tahun 2005 berada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. "Indonesia melalui Komite Nasional MOW akan mengajukan 3 warisan dokumenter

untuk dicantumkan pada register internasional, yaitu arsip Sukarno; *To Build the World Anew*, Arsip KTT GNB I dan Hikayat Aceh," ujar Imam Gunarto.

Imam Gunarto juga berharap kepada jajaran pemerintah dan masyarakat Aceh dapat bersama-sama menggerakkan dan mendukung upaya ini agar sukses diakui oleh UNESCO. (md/lh)



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kearsipan (25/10/21).

ANRI DAN BP BATAM SEPAKATI KERJA SAMA KEARSIPAN

Batam (25/10) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kearsipan. Acara ini dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi BP Batam ke-50. Kerja sama ini selain bertujuan meningkatkan

hubungan kelembagaan antara kedua pihak, adalah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan khususnya di bidang kearsipan.

Salah satu ruang lingkup kerja sama terpenting adalah Penyiapan dan Pengelolaan Bidang Usaha Jasa Komersil Penyimpanan Arsip dengan pangsa pasar di kawasan Singapura, Johor dan Riau. ANRI siap mendukung implementasi kerja sama ini dan perlu

segera disusun Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja antara kedua belah pihak, agar kegiatan Usaha Jasa Komersil Penyimpanan Arsip segera terwujud.

Dalam kesempatan ini, Kepala ANRI juga menyerahkan penghargaan terhadap unit kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip terbaik di lingkungan BP Batam. (**agp**)



FOTO: DOK. ANRI

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman beserta jajarannya melakukan audiensi dengan Gubernur Riau H Syamsuar di kediaman resmi Gubernur Riau (26/10/21).

DELEGASI ANRI LAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN GUBERNUR RIAU

Pekanbaru (26/10) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dipimpin Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman beserta jajarannya melakukan audiensi dengan Gubernur Riau H Syamsuar di kediaman resmi Gubernur Riau.

Pada kesempatan ini, Andi

Kasman yang menjadi pimpinan delegasi dari ANRI menyampaikan maksud dan tujuan melakukan audiensi ini, yakni dalam rangka koordinasi persiapan peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 di Provinsi Riau.

Selain itu, kunjungan tim ANRI ke Riau juga dimaksudkan

untuk menggelar bimbingan teknis aplikasi Srikandi, Penyerahan Citra Daerah Kota Pekanbaru, koordinasi pengawasan kearsipan, tindak lanjut penggunaan lahan hibah dari Provinsi Riau kepada ANRI, serta implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Provinsi Riau. (is)



Talking: H021 CP

ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
KATEGORI LEMBAGA NEGARA DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
SEBAGAI BADAN PUBLIK



FOTO: ISTIMEWA

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ANRI KEMBALI RAIH KATEGORI INFORMATIF

Jakarta (26/10) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali meraih kategori Badan Publik Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat. Penganugerahan tersebut dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin. Pada penganugerahan ini, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani turut hadir dalam acara tersebut. Berdasarkan hasil penilaian Monev, menunjukkan bahwa kepatuhan dan komitmen ANRI dalam melaksanakan KIP sudah baik. Adapun capaian nilai monev KIP tahun 2021 yang diperoleh ANRI adalah 96,17, meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 92,64.

Ketua KI Pusat, Gede Narayana dalam laporannya menyampaikan, Monev KIP tahun 2021 diikuti oleh 337

Badan Publik. Jumlah ini mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 terdapat 348 Badan Publik. Hal ini terkait dengan penggabungan kelembagaan pada Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga Non Struktural.

Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada Badan Publik yang memperoleh kategori Informatif. "Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Badan Publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai Badan Publik yang Informatif," ucapnya. Beliau juga berpesan agar semua Badan Publik dapat terus menggelorakan semangat keterbukaan informasi dan terbuka akan kritik serta saran dari masyarakat.

"Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas

informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis. Untuk itu, semua Badan Publik harus terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, beretika dan bernorma, sesuai dengan ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis," terang K.H. Ma'ruf Amin.

Adapun hasil pelaksanaan Monev KIP tahun 2021 menunjukkan bahwa Badan Publik dengan kategori Informatif berjumlah 83, kategori Menuju Informatif berjumlah 63, kategori Cukup Informatif berjumlah 54, kategori Kurang Informatif berjumlah 37, serta Badan Publik dengan kategori Tidak Informatif berjumlah 100. **(sa)**



FOTO: DOK. ANRI

Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan kegiatan studi banding ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengunjungi Gedung KPK Merah Putih (26/10/21).

Perkuat Evaluasi Penanganan Konflik Kepentingan ANRI STUDI BANDING KE KPK

Jakarta (26/10) - Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan kegiatan studi banding ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengunjungi Gedung KPK Merah Putih jalan Kuningan Persada no.4, Kuningan, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.

Kegiatan ini merupakan salah satu strategi inspektorat ANRI untuk memperkuat penanganan *conflict*

of Interest yang menjadi salah satu unsur penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, tepatnya dalam indikator Penguatan Pengawasan. Studi banding diikuti 10 pegawai Inspektorat, terdiri dari Kasubag Tata Usaha Inspektorat, Sekertaris, 4 orang Auditor dan 4 CPNS yang sedang melaksanakan magang di Inspektorat.

Pada studi banding ini, disampaikan materi terkait penanganan *conflict of Interest* oleh

Inspektur KPK, Subroto. Dalam kegiatan tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah mekanisme penanganan *conflict of interest* yang diterapkan di KPK, meliputi penetapan kebijakan, komitmen pimpinan, deklarasi *conflict of interest*, mekanisme pelaporan *conflict of interest* di KPK hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan *conflict of interest*. **(tim Inspektorat ANRI)**



FOTO: DOK. ANRI

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dengan disaksikan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution di Komplek Walikota Pekanbaru, Tenayan Raya (27/10/21).

ANRI SERAHKAN CITRA DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru (27/10) - Pemerintah Kota Pekanbaru menerima Citra Daerah Kota Pekanbaru dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Citra Daerah tersebut diserahkan langsung Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dengan disaksikan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution di Komplek Walikota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa Arsip Citra Daerah Kota Pekanbaru merupakan harta yang sangat berharga, warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa juga dapat terlihat dari bagaimana sistem

pemeliharaan kelestarian arsipnya. "Lembar demi lembar yang ada dalam buku Citra Daerah Pekanbaru menggambarkan tentang dinamika kota Pekanbaru dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara," terangnya.

"Selamat kepada kota Pekanbaru atas penyerahan Citra Daerah dari ANRI. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kota Pekanbaru dan Provinsi Riau pada umumnya," tambah Edy.

"Melalui kolaborasi inovasi antara sumber daya manusia ANRI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dan Sejarawan Kota Pekanbaru, program Citra Daerah Kota Pekanbaru ini sangat berpotensi

menghasilkan sebuah mozaik sebagai upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah Kota Pekanbaru", ungkap Andi Kasman.

Andi Kasman menambahkan bahwa khazanah arsip negara mengenai Kota Pekanbaru banyak tersimpan di ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Di dalam khazanah arsip tersebut, di antaranya memuat informasi mengenai keindahan alam, keanekaragaman suku bangsa dan agama menjadi anugerah yang amat berharga bagi Kota Pekanbaru. Ciri khas religius dan semangat mempertahankan adat istiadat budaya melekat pada masyarakatnya. Kebersamaan dan hidup bergotong royong tercermin saat masyarakat saling bekerja sama dan membangun rumah serta menciptakan lingkungan yang aman dan selaras dengan alam melalui bangunan rumah tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini.


Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang telah menyerahkan Citra Daerah Kota Pekanbaru. Menurut Firdaus, bahwa arsip memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai warisan budaya dan sejarah untuk pembelajaran pada generasi mendatang.

"Arsip menunjukkan kita bangsa yang berperadaban. Oleh sebab itu, betapa pentingnya arsip ini. Contohnya saja bagaimana perkembangan sejarah Kota Pekanbaru tertuang dalam catatan seorang batin pada awal abad 17 lalu. Tanpa cerita, tanpa arsip, kita tidak akan tahu sejarah," ungkapnya. **(is)**



TERBAIK I

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)

 @arsipnasionalri



Gunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar AKUN RESMI MEDIA SOSIAL ANRI RAIH TERBAIK PERTAMA

Jakarta (28/10) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menobatkan akun resmi media sosial Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjadi terbaik ke-1 dalam penggunaan bahasa Indonesia

yang baik dan benar. Penilaian ini dilakukan terhadap 76 akun media sosial kementerian/lembaga yang diselenggarakan bertepatan dengan Bulan Bahasa dan Sastra 2021.

Pengumuman pemenang tersebut disampaikan secara daring melalui saluran akun youtube Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sebagai informasi, saat ini ANRI memiliki akun resmi media sosial pada platform facebook, instagram, twitter, youtube dan tiktok. **(tk)**



Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA. (kiri) saat menyerahkan Penghargaan Kelembagaan UPZ Terbaik 2021 dalam acara Rakornas UPZ yang diselenggarakan di Jakarta (02/11/21).

UPZ ANRI RAIH PENGHARGAAN DARI BAZNAS

Jakarta (02/11) - UPZ Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendapatkan penghargaan kelembagaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terbaik 2021 dalam kategori Pelaporan Terbaik.

“Sebagai bentuk penghargaan

dan apresiasi kepada seluruh UPZ dalam melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), BAZNAS memberikan penghargaan kepada UPZ-UPZ terbaik selama 2021,” ujar Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA. saat menyerahkan Penghargaan Kelembagaan UPZ

Terbaik 2021 dalam acara Rakornas UPZ yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (2/11) malam.

Prof Noor menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sekaligus sebagai motivasi kepada seluruh UPZ agar ke depan bisa lebih baik dalam mengumpulkan dana ZIS. **(UPZ ANRI)**



FOTO: DOK. ANRI

Kunjungan Bupati Siak, Alfredri beserta jajaran untuk menggali informasi mengenai arsip sejarah perjuangan Tengku Buwang Asmara yang akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau (04/11/21).

Telusuri Arsip Tengku Buwang Asmara BUPATI SIAK KUNJUNGI ANRI

Jakarta (04/11) - Bupati Siak Alfredri beserta jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, 4 November 2021. Kunjungan Alfredri beserta jajaran untuk menggali informasi mengenai arsip sejarah perjuangan Tengku Buwang Asmara yang akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. **(is)**





FOTO: DOK. ANRI

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto (kanan) dan Karaeng Turikale VIII Maros Sulawesi Selatan, Brigjen Pol (Purn) Mapparessa (kiri) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara ANRI dengan FSKN sebagai wujud kerja sama dalam bidang penyelamatan dan revitalisasi naskah-naskah serta dokumen kuno yang dimiliki keraton-keraton Nusantara (07/11/21).

ANRI LAKSANAKAN MOU DENGAN FORUM SILATURAHMI KERATON NUSANTARA

Jakarta (07/11) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Konservasi Kearsipan Multi Siswati beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ANRI, menghadiri Pelantikan Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Karaeng Turikale VIII Maros Sulawesi Selatan, Brigjen Pol (Purn)

Mapparessa.

Pada kesempatan yang sama dilaksanakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara ANRI dengan FSKN sebagai wujud kerja sama dalam bidang penyelamatan dan revitalisasi naskah-naskah serta dokumen kuno yang dimiliki keraton-keraton Nusantara.

Dalam sambutannya, Imam

Gunarto menyampaikan harapannya agar terjalin kolaborasi dalam penyelamatan dan pelestarian arsip Kesultanan/Kerajaan di Nusantara. "Arsip tersebut sangat berguna bagi generasi mendatang yang juga dapat dimanfaatkan bagi dunia pendidikan dan penelitian untuk kemajuan dan kecerdasan bangsa," tutur Imam Gunarto. **(md)**



Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah (kiri) menyerahkan arsip statisnya kepada Kepala ANRI Imam Gunarto (kanan) (13/10/21).

MK SERAHKAN ARSIP STATIS KEPADA ANRI

Jakarta (09/11) - Sebagai pencipta arsip, Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan arsip yang bernilai guna sejarah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip statis MK yang bernilai guna sejarah tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah kepada Kepala ANRI Imam Gunarto.

Adapun arsip yang diserahkan adalah Berkas Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Laporan Keadaan Perkara, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Berkas Perseorangan Pejabat, dan Struktur Organisasi kurun waktu tahun 2003 s.d. 2019 yang berjumlah 117 nomor arsip tekstual, dan 1002 nomor arsip video. Arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi kita dan generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa.

“Dengan diberikannya arsip statis pada hari ini berarti kita telah

mewariskan informasi yang sangat berharga di Indonesia sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang, dan seterusnya,” ujar Imam Gunarto.

Arsip statis MK dapat menggambarkan upaya suatu bangsa dalam menegakkan keadilan di bidang konstitusi yang telah dimulai sejak awal reformasi. Arsip ini pun mencerminkan adanya dinamika dan hubungan timbal balik antara pencari keadilan di bidang konstitusi dengan negara yang menaungi dan mengayominya.

Dengan diberikannya arsip statis MK kepada ANRI, maka 3 (tiga) hikmah sekaligus yang diperoleh, yakni, pertama, MK telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang.

Kedua, MK telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statis ke ANRI. Selain itu, MK telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014 - 2019.

Penyerahan arsip statis yang telah dilakukan oleh MK ini merupakan upaya bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan warisan dokumenter. “Kami selaku lembaga pembina kearsipan nasional sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas seluruh upaya yang telah dilakukan MK di bidang kearsipan,” tambah Imam Gunarto. **(wsb/is)**



Arsip Putusan Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilihat publik di Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) (09/11/21).

ARSIP PUTUSAN PERTAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT DILIHAT DI PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Jakarta (09/11) - Arsip Putusan Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilihat publik di Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon). Arsip tersebut merupakan salah satu bukti sejarah perjalanan MK dan putusan yang monumental yang layak diketahui masyarakat, khususnya pencinta sejarah Konstitusi di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara ANRI dengan MK dalam rangka pemanfaatan arsip statis MK yang merupakan milik negara dan dikelola ANRI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arsip yang disajikan di Puskon MK tersebut merupakan arsip statis tentang Ketetapan pertama Mahkamah

Konstitusi Nomor 008/PUU-I/2003; Putusan pertama Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003; Putusan pertama yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi Nomor 011&017/PUU-I/2003.

“Kita bisa belajar dari Jepang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama di Jepang tersimpan sangat istimewa, diperlakukan secara istimewa di Gedung *Minister of Justice*. Artinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama di Jepang tersebut merupakan sejarah bangsanya dan menjadi monumen yang sangat luar biasa. Selain itu menjadi ikon kunjungan dari berbagai penjuru dunia yang datang ke

Minister of Justice di Jepang,” terang Sekretaris Jenderal MK, Guntur dalam sambutannya pada acara Penempatan Putusan Pertama MK di Pusat Puskon oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Penyerahan Arsip Statis MK kepada ANRI berlangsung di Gedung MK.

Guntur juga mencontohkan museum Louvre di Perancis yang menyimpan ikon-ikon yang sering dikunjungi masyarakat domestik maupun internasional. Salah satu ikon terkenal di museum tersebut adalah lukisan Monalisa yang dikemas sedemikian rupa, sehingga memiliki daya tarik yang luar biasa bagi yang melihat.

“Oleh karena itu, saya berharap Putusan Pertama Mahkamah Konstitusi dapat menjadi ikon dan pusat kunjungan orang, sebagai dokumen asli pertama yang diputus MK. Artinya, semua yang hadir dalam acara ini, terutama Kepala ANRI telah mencatatkan diri dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah upaya yang luar biasa dari Kepala ANRI beserta segenap jajarannya yang memberi dukungan kepada kami,” terang Guntur.

Sementara itu, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyambut baik terkait penempatan arsip putusan MK pertama di Puskon MK. ANRI sangat senang dapat menempatkan arsip putusan pertama MK di Puskon MK. “Harapan kami, arsip yang monumental, arsip yang menjadi ikon dari kinerja MK ini bisa menjadi daya tarik dan pendorong bagi generasi muda dan seluruh bangsa Indonesia untuk mempelajari bagaimana proses konstitusi dibuat dan proses konstitusi berjalan hingga kini”, ungkap Imam Gunarto saat memberikan testimoni. **(wsb/is)**



FOTO: DOK. ANRI

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Agus Widodo (kiri) menyerahkan secara simbolis arsip statis kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto (kanan) di Ruang Rapat Kresna, Gedung Wantimpres lantai 2, jalan Veteran III, Jakarta Pusat (10/11/21).

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI

Jakarta (10/11) - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI. Arsip Statis tersebut diserahkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Agus Widodo kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto di Ruang Rapat Kresna, Gedung Wantimpres lantai 2, jalan Veteran III, Jakarta Pusat.

Arsip statis yang diserahkan yakni mengenai rekomendasi, nasihat dan pertimbangan Wantimpres dalam kabinet Presiden.

Pada kesempatan ini, Agus Widodo mengungkapkan bahwa arsip yang dihasilkan oleh Wantimpres

banyak berisi tentang nasihat dan pertimbangan dari Wantimpres kepada presiden, dokumen itu termasuk arsip yang rahasia, tidak boleh bocor dan bahkan hanya presiden yang tahu.

Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan dalam kesempatan ini ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan nasional menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wantimpres atas kinerja yang luar biasa yaitu dalam penyerahan arsip statisnya.

Imam Gunarto juga saat menyampaikan sambutannya menyampaikan tiga Program Kearsipan Nasional yaitu Tertib Arsip,

Transformasi Digital, dan Memori Kolektif Bangsa.

Imam Gunarto menambahkan tiga manfaat Wantimpres menyerahkan Arsip statisnya merupakan salah satu wujud keseriusan Wantimpres sebagai pencipta arsip melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip negara Periode 2014-2019. "Penyerahan arsip Wantimpres merupakan Mosaik sejarah dan bentuk Akuntabilitas Bangsa", terang Imam Gunarto menutup sambutannya. (lh)



FOTO: DOK. ANRI

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha (kiri) menyerahkan arsip statis Kementerian Kesehatan RI kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (tengah) (12/11/21).

PENYERAHAN ARSIP STATIS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA ANRI

Jakarta (12/11) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip Statis Kemenkes diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Acara serah terima arsip tersebut disaksikan secara langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin di Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Jakarta.

Adapun arsip statis yang diserahkan kepada ANRI berupa laporan hasil penelitian berskala nasional, serta penyusunan kebijakan teknis layanan Kesehatan primer. Arsip yang diserahkan tersebut berupa 642 nomor arsip tekstual dan 390 nomor arsip foto digital, serta arsip statis penanganan Covid-19, berupa 24 nomor arsip tekstual dan 671 nomor arsip rilis, foto digital, dan video.

Arsip Kemenkes RI yang diserahkan kepada ANRI selaku

Lembaga pembina di bidang kearsipan merupakan upaya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan warisan dokumenter yang sangat berharga baik bagi Kementerian Kesehatan RI, maupun bagi ANRI dalam mendukung program penyelamatan arsip statis.

Kegiatan penyerahan arsip statis tersebut dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa setiap Lembaga Negara wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI. **(md)**



FOTO: ISTIMEWA

ANRI RAIH JUARA I BMN AWARDS KATEGORI CONTINUOUS IMPROVEMENT

Jakarta (15/11) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meraih juara I kategori *Continuous Improvement* dalam kementerian/ lembaga (K/L) kelompok I pada penghargaan Apresiasi Pengelolaan Keuangan Negara Barang Milik Negara (BMN) Award yang diselenggarakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada 15 November 2021. Turut hadir menyaksikan penghargaan yang diterima oleh ANRI, Plt. Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani.

Continuous Improvement

merupakan salah satu kategori penghargaan yang diberikan untuk K/L yang telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi.

Dalam agenda penghargaan tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat sekaligus memberikan penghargaan kepada kementerian/ lembaga yang memperoleh penghargaan di setiap kategori.

Selain itu, Sri Mulyani berharap

kepada kementerian/ lembaga lain yang belum mendapatkan penghargaan agar tetap terus mendorong pengelolaan dan pemanfaatan BMN secara lebih baik lagi.

“Ini sebenarnya upaya kita bersama untuk terus membangun karakter Bangsa Indonesia dan peradaban Bangsa Indonesia. Ini karena kita memahami BMN tidak datang begitu saja, secara tiba-tiba. BMN, aset-aset negara itu kita peroleh melalui sebuah upaya proses keuangan negara yang membutuhkan berbagai pengorbanan dan bahkan upaya keras untuk bisa mendapatkannya,” tutur Sri Mulyani. **(is)**



Arsip statis DPR RI diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto di Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah (19/11/21).

FOTO: DOK. ANRI

DPR RI SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI

Jakarta (19/11) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip statis DPR RI diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto di Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah, 19 November 2021.

Serah terima arsip statis kali ini merupakan yang keempat kalinya dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan DPR RI telah melaksanakan penyerahan arsip statis sebanyak delapan kali sejak tahun 1998.

Adapun arsip yang diserahkan pada tahun ini adalah Personal File Para Anggota DPR RI Tahun 1950 s.d. 2000 sebanyak 933 nomor (914 berkas, 55 lembar) dan Kaset Rekaman mengenai Risalah Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Paripurna DPR RI dan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan instansi lain Tahun 2000 s.d. 2005 sebanyak

415 nomor (kaset). Arsip-arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi kita dan generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa.

“Dengan diberikannya arsip statis pada hari ini berarti kita telah mewariskan informasi yang sangat berharga, yaitu arsip tentang sejarah DPR RI sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang, dan seterusnya”, ungkap Imam Gunarto. ***

Bogor (22/11) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang digelar secara luring dan daring (*hybrid*).

Penyelenggaraan pemilu oleh KPU menghasilkan data kearsipan yang penting dengan jumlah yang besar. Dengan pencanangan GNSTA ini diharapkan tata kelola arsip kepemiluan yang jadi bagian dari tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan dapat terwujud dengan baik sesuai kaidah kearsipan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka kegiatan Sosialisasi Kearsipan dan Pencanangan GNSTA di lingkungan KPU.

Menurut Ilham, GNSTA ini untuk mulai memperbaiki arsip yang belum terkumpul sejak sekarang seperti mengarsipkan hasil pemilu dari level C hasil TPS. "Kalau ini belum dibuat teman-teman, para kabag yang hadir di sini, tolong diarsipkan kembali, yang kurang diarsipkan kembali," ucap Ilham.

Ilham mengatakan KPU sebagai sebuah institusi perlu mengatur dengan baik arsip, baik menyangkut penyimpanan arsip, membuktikan arsip dan juga bisa menjadi parameter pekerjaan. Pasalnya, arsip menyimpan begitu banyak hal terkait data dan informasi yang juga diharapkan dapat menjawab hoaks-hoaks yang sekiranya beredar.

"Saya berharap 2019 mumpung periode masih bapak ibu masih ada terlibat perhelatan 2019 mulai mencari remahan [informasi yang belum tersiapkan] itu, hal-hal yang kecil bagaimana mekanismenya bagaimana caranya, metode ilmiahnya ada pak Imam Gunarto Kepala ANRI bisa ditanyakan," ujar Ilham.



FOTO: DOK. ANRI

Dengan pencanangan GNSTA ini diharapkan tata kelola arsip kepemiluan yang jadi bagian dari tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan dapat terwujud dengan baik sesuai kaidah kearsipan (22/11/21).

Wujudkan Tata Kelola Arsip Pemilu yang Baik KPU CANANGKAN GNSTA

Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU karena sudah menyerahkan dan menyelamatkan arsip bersejarah.

"Arsip statisnya sebanyak 10 kali kepada ANRI. Sepuluh kali menyerahkan arsip bersejarah ke arsip nasional adalah torehan sejarah yang nanti kinerja bapak ibu semua akan dibaca generasi mendatang, 50 tahun mendatang, 100 tahun datang, mungkin beratus-ratus yang akan datang," ujar Imam.

Oleh karenanya, Imam Gunarto menekankan agar KPU memperhatikan dan memelihara serta mengelola pengarsipannya karena itu merekam seluruh kegiatan penyelenggaraan.

"Jangan lupa semua proses penyelenggara pemilu itu endingnya ada di arsip semua itu terekam dalam arsip jadi jangan sampai lupa, karena ini warisan yang tak lekang

oleh zaman, itu dibuktikan di Pemilu 1955 itu katanya pemilu paling luber, arsip lengkap dan baik sehingga kita perlu kasih applause pemilu 1955," ujar Imam.

Imam pun mendukung rencana KPU membuat tempat pengarsipan atau semacam museum pemilu karena arsip kepemiluan perlu disebarluaskan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk menangkal hoaks. "Wahana seperti museum, wahana baik secara langsung maupun secara digital agar masyarakat tidak selalu memandang negatif karena dari rumor, rumor bisa ditangkal dengan bukti otentik," ungkap Imam.

Turut hadir, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU RI Suryadi, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen KPU RI Nur Syarifah, jajaran Setjen KPU RI, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota. (ts)



Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dan Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto saat memukul gendang pertanda dibukanya SARBICA 2021 (23/11/21).

PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19 JADI PERHATIAN PERTEMUAN TAHUNAN LEMBAGA KEARSIPAN SE-ASIA TENGGARA TAHUN 2021

Jakarta (23/11) - Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tengah melangsungkan *Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives (SARBICA) International Seminar 22nd General Conference* dan *23rd Executive Board Meeting "Safeguarding the Archives: Memory, Pandemic, and Technology"* yang digelar secara daring dan luring.

Rangkaian kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Menurut Rini, tema seminar internasional dan pertemuan rutin tahunan Lembaga Kearsipan se-Asia Tenggara yang tergabung dalam SARBICA ini sangat berkorelasi dengan kondisi yang tengah dihadapi seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Rini menambahkan, ketiadaan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dan terobosan, terutama dalam penyusunan kebijakan

dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, Kementerian PANRB bersama-sama dengan ANRI berinisiatif untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dihasilkan dari segala kegiatan dalam penanganan COVID-19 dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, *President of International Council on Archives*, David Frickers menerangkan bahwa pertemuan ini akan membahas tentang bagaimana kita membangun dan mengelola inovasi baru, khususnya dengan adanya kondisi pandemi COVID-19.

"Semua sektor terpengaruh karena adanya kondisi ini, tidak terkecuali di bidang administrasi publik dan dunia kearsipan, sehingga menghasilkan berbagai perubahan termasuk di bidang

transparansi publik. Konsekuensinya, administrasi publik perlu juga diperkenalkan dengan teknologi baru agar lebih terjamin dan mampu mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi kasus serupa. Oleh karenanya, marilah kita jadikan ajang ini sebagai awal untuk pengelolaan arsip yang lebih transparan dan relevan dengan kolaborasi antarlembaga dan negara yang lebih baik," jelas David.

Sementara itu, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa penunjukkan Indonesia melalui ANRI sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional ini didasarkan atas hasil *General Conference SARBICA* tanggal 24 Oktober 2018 yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia. "Tema yang menjadi perhatian pada pertemuan ini *"Safeguarding the Archives": Memory, Pandemic, and Technology*". Tema tersebut memiliki filosofi dan makna yang sesuai dengan semangat penyelenggaraan kearsipan pada saat ini yang mana dalam konteks saat kontemporer kini dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif, yaitu berkaitan dengan peningkatan peran arsip sebagai warisan dokumenter dunia, respons terhadap pandemi, dan pemanfaatan teknologi," jelas Imam.

Selain seminar internasional, ANRI mewakili Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan *23rd Executive Board Meeting* dan *22nd General Conference SARBICA*. *Executive board meeting* merupakan pertemuan tahunan pimpinan lembaga kearsipan nasional di wilayah Asia Tenggara yang membahas perkembangan kearsipan di wilayah regional, sekaligus program-program kearsipan yang diselenggarakan oleh SARBICA termasuk keanggotaan. Adapun pada *general conference* kali ini fokus pada pemilihan anggota Dewan Eksekutif yang dengan rekomendasi Dewan akan menunjuk atau memilih *Chairman (Ketua)* dan *(Vice Chairman) Wakil Ketua SARBICA* periode 2021–2023. **(tk/nis/ke/tr)**

Jakarta (23/11) - Arsip, Memori dan Warisan Dokumenter Dunia menjadi topik utama dalam pembahasan SARBICA International Seminar 22nd General Conference pada hari pertama. Hadir sebagai pembicara kunci *Adviser* dan *Chief Communication and Information at UNESCO Bangkok*, Misako Ito dalam paparannya yang bertajuk *UNESCO Memory of the World: Safeguarding Documentary Heritage in Asia and the Pacific* menyatakan bahwa UNESCO Bangkok ingin membuka nasional *register* di masa mendatang. "Kami memiliki daftar *Memory of the World* (MoW) yang terdiri atas warisan dunia yang memiliki dampak terhadap dunia dan juga wilayah daerah. "Kami ada *register* secara regional. Kami ingin kedepannya membuka register nasional. *Register* nasional ini juga dibuka di beberapa negara, seperti Indonesia dan Selandia Baru," papar Misako.

Ditambahkan oleh narasumber seminar *Vice Chair MoW Committee for Asia and the Pacific*, Vu Thi Minh Huong, program MoW bertujuan melindungi dari ancaman dengan tindakan yang sesuai dan menyediakan akses terhadap warisan dokumenter. Warisan dokumenter yang diakui dunia harus dilestarikan dan dilindungi oleh semua orang, serta dapat diakses tanpa kendala oleh berbagai pihak.

Sementara itu, *ASEAN Cultural Heritage Digital Archives*, Gladys Respatih ACHDA mengungkapkan bahwa proses digitisasi atas kekayaan budaya dilakukan dalam rangka mendukung promosi publik akan adanya kebudayaan lokal yang memiliki potensi untuk menjadi kekayaan sejarah yang mendunia.

Publik dapat mengakses ACHDA pada tautan <https://heritage.asean>.



Arsip, Memori dan Warisan Dokumenter Dunia menjadi topik utama dalam pembahasan SARBICA International Seminar 22nd General Conference pada hari pertama (23/11/21).

ARSIP, MEMORI DAN WARISAN DOKUMENTER DUNIA

org di mana tersedia hasil digitisasi ratusan jenis arsip yang mengandung nilai kesejarahan yang tinggi. Beberapa kegiatan dilakukan secara berkesinambungan oleh ACHDA termasuk digitisasi, pembaruan protal dan promosi.

"Dalam proses digitisasi sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilakukan di antaranya menyeleksi lembaga dan item yang akan didigitisasi, kedua melakukan asesmen dan digitisasi, kemudian yang terakhir menghasilkan metada dan melakukan promosi atas hasil digitisasi. Beberapa syarat item yang akan masuk dalam proses seleksi digitisasi ini termasuk lokasi, ukuran dan karakteristik," terang Gladys.

ACHDA juga menyajikan pameran dalam bentuk *e-exhibitions* bertujuan untuk memberikan penampilan pameran yang menarik secara *online*, dengan menghadirkan cerita lokal dalam bentuk gambar/foto, suara, dan video.

Pada webinar ini pun menghadirkan Anthony Reid dari

Australian National University yang menyampaikan informasi mengenai *Shared History and Documentary Heritage in Southeast Asia*. Dalam paparannya, Anthony menyampaikan mengenai arsip-arsip yang ada di Asia Tenggara dan ia berharap bahwa Asia Tenggara dapat saling bekerja sama mengenai situasi serta sejarah.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan pada webinar hari pertama ialah bahwa organisasi kearsipan internasional memiliki kewajiban moral untuk mempublikasikan warisan dokumenter dunia kepada setiap orang dengan tetap melestarikan dan melindungi warisan tersebut dan menyediakan akses yang mudah bagi setiap orang; negara-negara di ASEAN harus membuka dan membagikan sejarah dan warisan dokumenter untuk diajukan sebagai MoW, sehingga dapat dijadikan sebagai sejarah bersama berdasarkan perspektif Asia Tenggara; negara-negara di Kawasan Asia Pasifik didorong untuk mengusulkan penominasian MoW kepada UNESCO. **(tk/tr/ke/nis)**



FOTO: ISTIMEWA

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pemerintah provinsi percontohan penanganan COVID-19 di Indonesia (24/11/21).

SARBICA International Seminar: ARCHIVES AND PANDEMIC RESPONSE

Jakarta (24/11) - Webinar bertema *Archives and Pandemic Response* menjadi pembahasan kedua pada kegiatan *SARBICA International Seminar 22nd General Conference* dan digelar setelah Pertemuan Dewan Eksekutif SARBICA ke-23. Webinar digelar secara daring dan diikuti oleh sekitar 700 peserta.

Multi Siswati menjelaskan, saat ini terdapat 2 (dua) lembaga negara yang telah menyerahkan arsip covid-19 ke ANRI. "Terdapat 2 lembaga negara yang telah menyelamatkan arsip penanganan COVID-19 tahun 2020,

yaitu Kementerian Kesehatan RI dan Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, ANRI telah melaksanakan 9 (sembilan) kali wawancara sejarah lisan dalam rangka melengkapi rekaman peristiwa terakit penanganan COVID-19," jelas Muti Siswati.

ANRI juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun pusat studi dan galeri arsip pandemi COVID-19. "Hal ini bertujuan untuk menyajikan dan menyediakan akses arsip pandemi COVID-19 sebagai sumber pengetahuan untuk masyarakat dan

menjadikan pengalaman berharga bagi daerah lain. Apalagi saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pemerintah provinsi percontohan penanganan COVID-19 di Indonesia," jelas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang hadir sebagai pembicara kunci.

Pada webinar ini turut hadir Direktur Eksekutif Arsip Nasional Filipina, Victorino M. Manalo, Presiden SEAPAAVA, Karen Chan, Direktur Departemen Pengawasan Lembaga dan Kantor Arsip SAAC, Liu Yun, dan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Eka Jusup Singka.

Adapun hasil rekomendasi pada kegiatan webinar *Archives and Pandemic Response* di antaranya: (1) Semua pihak baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, diharapkan membangun penanganan arsip pandemi sebagai warisan dokumenter, termasuk komunitas atau masyarakat; (2) mengoptimalkan peran *ASEAN Pandemic Response Archives* (APARA) sebagai pusat pengelolaan arsip penanganan pandemi di Asia Tenggara; (3) Mengadakan program pengumpulan, pengaturan, pelestarian, dan penyediaan akses terhadap penanganan arsip pandemi sebagai warisan dokumenter; (4) Organisasi kearsipan internasional harus mampu berkolaborasi untuk menentukan kriteria arsip pandemi yang akan disimpan oleh Arsip Nasional di setiap negara sesuai dengan standar internasional, termasuk dalam hal penggunaan teknologi untuk pengelolaan arsip pandemi. **(wsb/is)**

Jakarta (24/11) - Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives (SARBICA) menyelenggarakan *23rd Executive Board Meeting (EBM)* dan *22nd General Conference SARBICA* secara virtual, 24 November 2021.

Executive Board Meeting ini merupakan pertemuan tahunan pimpinan lembaga kearsipan di Asia Tenggara yang membahas perkembangan kearsipan di wilayah regional sekaligus program-program kearsipan yang diselenggarakan oleh SARBICA termasuk keanggotaan.

Sementara itu, *General Conference* adalah forum yang menentukan kebijakan dan prosedur operasional kegiatan SARBICA. *General Conference* SARBICA ini juga menentukan keputusan terkait program-program yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif.

Sidang Umum (*General Conference*) ke-22 dan Pertemuan Dewan Eksekutif (*Executive Board Meeting*) ke-23 SARBICA 2021 telah menghasilkan beberapa keputusan seperti terpilihnya dewan pengurus SARBICA periode 2021-2023 dan tuan rumah penyelenggara Pertemuan Dewan Eksekutif SARBICA 2022. Pertemuan tersebut juga mendiskusikan isu-isu penting seperti pendaftaran arsip-arsip negara yang tergabung dalam SARBICA sebagai *Memory of the World*, pendampingan teknis mengenai kebijakan dan prosedur penyusutan arsip untuk beberapa negara anggota, serta kelanjutan program APARA (*ASEAN Pandemic Response Archives Initiative*).

Julia Chee, Direktur Arsip Nasional Singapura, terpilih sebagai Ketua SARBICA Periode 2021-2023. Arsip



***Executive Board Meeting* merupakan pertemuan tahunan pimpinan lembaga kearsipan di Asia Tenggara yang membahas perkembangan kearsipan di wilayah regional sekaligus program-program kearsipan yang diselenggarakan oleh SARBICA termasuk keanggotaan (24/11/21).**

SARBICA GELAR EXECUTIVE BOARD MEETING

Nasional Singapura juga terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pertemuan Dewan Eksekutif SARBICA 2022.

Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Internasional SARBICA tentang bencana pada tahun 2022 di Aceh. Seminar ini akan menghadirkan berbagai pembicara di bidang kebencanaan, kearsipan, dan berbagai bidang keahlian terkait lainnya. Oleh karena itu, Indonesia dengan hormat mengundang semua negara anggota SARBICA untuk bergabung dan hadir di Aceh pada tahun depan dengan harapan pandemi COVID-19 sudah berakhir.

Adapun peserta 23rd Executive Board Meeting dan 22nd General Conference SARBICA terdiri dari :

- 1) Chairman SARBICA, Kepala Arsip Nasional Filipina
- 2) Vice Chairman SARBICA, Kepala

- Arsip Nasional Myanmar
- 3) Secretary General SARBICA, Hapiza Osman
- 4) Treasurer SARBICA, Amy Ngau

- 5) Executive Board/Dewan Eksekutif
- 6) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
- 7) Kepala Arsip Nasional Malaysia
- 8) Kepala Arsip Nasional Singapura
- 9) Kepala Arsip Nasional Thailand
- 10) Kepala Arsip Nasional Vietnam
- 11) Kepala Arsip Nasional Brunei Darussalam
- 12) Kepala Arsip Nasional Kamboja
- 13) Kepala Arsip Nasional Laos
- 14) Anggota Delegasi/Pejabat Tinggi Pendamping Kepala Arsip Nasional se-Asia Tenggara
- 15) Liaison Officers Arsip Nasional Anggota SARBICA
- 16) Anggota SARBICA Kategori B, C dan D. ***



FOTO: DOK. ANRI

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (kiri) menyerahkan secara simbolik arsip statis Kementerian Desa PDTT kepada Kepala ANRI Imam Gunarto (kanan) (24/11/21).

KEMENTERIAN DESA PDTT SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI

Jakarta (24/11) - Kepala ANRI Imam Gunarto menerima Penyerahan Arsip Statis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Serah terima arsip statis dan Peluncuran penggunaan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di lingkungan Kemendes PDTT secara simbolik dilaksanakan oleh kepala ANRI dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam acara Rapat Koordinasi Kearsipan di Gedung Makarti Kemendes PDTT Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, 24 November 2021.

Kepala ANRI Imam Gunarto dalam sambutannya mengapresiasi Kemendes PDTT yang dalam tiga tahun secara berturut-turut telah menyerahkan arsip kepada ANRI. Arsip tersebut nantinya menjadi

pembelajaran bagi generasi mendatang.

Imam Gunarto juga memuji pengelolaan kearsipan di Kemendes PDTT. Hasil pengawasan ANRI periode 2020 memberikan predikat 'Sangat Memuaskan' Pimpinan dan Jajaran Kemendes dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mengelola arsip hal tersebut penting bagi lembaga pemerintah untuk akuntabilitas dan pelayanan publik.

"Kami apresiasi dukungan yang kuat terhadap kearsipan. Perintah Pak Menteri (Mendes PDTT) sangat tegas sekali yaitu kita harus berkomitmen untuk mengelola arsip secara baik untuk kepentingan akuntabilitas dan pelayanan publik," kata Kepala ANRI Imam Gunarto dalam acara Rapat Koordinasi Kearsipan di Kemendes PDTT.

Imam berharap predikat

pengelolaan arsip Kemendes PDTT terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan. Ketertiban dan keteraturan menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian karena cakupan bidangnya yang sangat luas, dari desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menurut Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kemendes PDTT berkomitmen penuh mengingat begitu penting kearsipan dalam kehidupan berbangsa dan upaya menuju perubahan. Kondisi itu berkembang atau berubah jika memang ada tolak ukur, salah satunya adalah tolak ukur masa lalu. Hal ini menjadi sangat penting bagi perubahan dan kehidupan kita.

Sementara itu dalam keterangan kepada Wartawan, Kepala ANRI Imam Gunarto mengucapkan Selamat berdasarkan hasil pengawasan pengarsipan terhadap Kemendes PDTT dengan nilai Sangat Memuaskan.

"Kemendes PDTT merupakan salah satu kementerian terdepan dalam bidang kearsipan. Hal ini bisa tercapai berkat komitmen besar Menteri Desa PDTT dan jajaran," ujar Imam Gunarto

Imam Gunarto juga berharap agar ke depan ANRI dapat terus memberikan dukungan dan berpartisipasi kepada Kemendes PDTT dalam membantu penertiban arsip di desa dan kearifan local di desa.

"Dukungan penertiban arsip desa penting dilakukan untuk menyelamatkan kearifan lokal desa. Jadi, kami akan ikut berpartisipasi," ucap Imam Gunarto. (Ih)

Jakarta (25/11) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan *Webinar International* dengan tema: “*Digital Transformation for Records and Archives Management*”. Webinar diselenggarakan secara *online* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, 25 November 2021.

Webinar International Seminar Kearsipan hari ke-3 ini membahas mengenai transformasi digital di bidang kearsipan.

“Masa Pandemi Covid-19 ini juga membuat lembaga kearsipan harus melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan kearsipan. Semua kegiatan yang dilaksanakan secara konvensional dan klasikal berubah menjadi secara daring, dan peran infrastruktur teknologi dan kapasitas kompetensi SDM Kearsipan (Arsiparis) menjadi kunci utama di masa transisi teknologi ini”, terang Deputi bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman saat membuka acara webinar.

Andi Kasman menambahkan bahwa Penguatkan teknologi kearsipan dengan menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai titik bangkit (*driving force*) bagi penyelenggaraan kearsipan dan profesi Arsiparis untuk penggunaan teknologi dalam mendukung kemudahan Pengelolaan Arsip Negara dalam mengidentifikasi, menetapkan, dan melakukan preservasi arsip digital dan membuat Arsip Negara dapat diakses oleh Publik di era Keterbukaan Informasi ini.

Dengan *Artificial Intelligence (AI)* untuk pengelolaan Arsip Negara, maka menjadi alternatif solusi manajemen kearsipan, dalam pengelolaan informasi kearsipan



Webinar International Seminar ini diselenggarakan dalam rangkaian *SARBICA International Seminar, Executive Board Meeting and General Conference* pada tanggal 23 – 25 November 2021 dalam rangka membangun kapasitas dan kompetensi SDM Kearsipan dalam Transformasi Digital di era Revolusi Industri 4.0 (25/11/21).

DIGITAL TRANSFORMATION FOR RECORDS AND ARCHIVES MANAGEMENT

nasional. “Transformasi kearsipan digital juga harus didukung penguatan *e-Government* menuju era budaya digital dan kita membutuhkan *sharing* pengalaman dan contoh terkait beberapa riset keberhasilan implementasi *e-Government* dalam pengelolaan *record and archives* di berbagai negara”, terang Andi Kasman.

Andi Kasman menyampaikan bahwa suksesnya *e-government* dan *open-government* dalam transformasi kearsipan perlu memperhatikan tantangan dan riset-riset yang sudah ada untuk menjadi referensi kesuksesan transformasi digital kearsipan tersebut.

Pada kesempatan ini, Panitia webinar menghadirkan Dr. Anthea Seles, *Secretary General, ICA* sebagai *Keynote Speech* yang membahas mengenai *Digital Transformation: Artificial Intelligence and Archives*.

Pada sesi panel narasumber pertama Prof. Yudho Giri Suchyho, M.Kom, Ph.D, dari Universitas Indonesia membawakan materi *E-Government in Indonesia: Transformation for the Digital Age*. Selanjutnya Lee Gemma, *Secretary, National Archives of Korea, Digital Records Innovation Division* memaparkan materi NAK *Technology on Records and Archives Management*.

Berikutnya materi *Digitisation and Preservation of the National Archives at-Risk Collection* disampaikan oleh Steven Fox, *Assistant Director for Collection Management, National Archives of Australia*.

Terakhir, disampaikan paparan mengenai *Development of Technology on Records and Archives Management in Malaysia* oleh Hapiza Osman, *National Archives of Malaysia*. (is)



FOTO: DOK. ANRI

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Arie Sudihar menyerahkan arsip statis Komisi Yudisial (KY) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima langsung oleh Kepala ANRI Imam Gunarto (29/11/21).

KY SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI

Jakarta (29/11) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Arie Sudihar menyerahkan arsip statis Komisi Yudisial (KY) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima langsung oleh Kepala ANRI Imam Gunarto. Acara yang diselenggarakan di Auditorium lantai 4 Gedung Komisi Yudisial ini dilaksanakan dengan prosedur kesehatan yang ketat.

Dalam sambutannya, Arie Sudihar menuturkan bahwa arsip adalah aset bagi Lembaga yang harus dijaga dan dilestarikan, oleh karenanya KY selalu berupaya memperbaiki diri dalam melakukan pengelolaan arsip. Pada

ulang tahun KY tahun 2021, KY telah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sebagai komitmen dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib.

“Dokumen majelis kehormatan hakim dan penjatuhan sanksi merupakan dokumen yang mempunyai nilai kesejarahan karena isi dokumen tersebut terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan wewenang perilaku hakim. Arsip ini juga menjadi bukti kinerja akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

KY dalam menegakan kode etik dan wewenang perilaku hakim”, terang Arie.

Sementara itu, Imam Gunarto sangat mengapresiasi penyerahan arsip statis KY serta memuji capaian penyelenggaraan kearsipan KY. “Memperoleh nilai yang cukup tinggi dalam kinerja kearsipan bukan hal yang mudah, komitmen dari pimpinan dan *passion* dari para pengelola arsip perlu diapresiasi dan di tahun 2021 sistem penilaian pengawasan kearsipan telah bergeser, pengelolaan arsip menjadi tolak ukur utama sebuah kinerja lembaga”, ujar Imam Gunarto dalam sambutannya. **(hez)**

Jakarta (29/11) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto didampingi oleh Plt. Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani, dan Kepala Biro Perencanaan dan Humas, Widarno mengikuti secara virtual acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), 29 November 2021.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Istana Negara, Jakarta. Prosesi penyerahan DIPA tahun ini mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dan dilakukan secara hybrid, dimana penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD dilakukan secara simbolis kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir secara fisik maupun Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah yang hadir secara virtual.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN TA 2022 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, meskipun dilaksanakan di tengah meningkatnya kasus Covid-19.

Tahun 2022, pandemi Covid-19



KEPALA ANRI IKUTI PENYERAHAN DIPA K/L DAN DAFTAR ALOKASI TKDD TAHUN 2022

masih tetap menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. Mengingat hingga saat ini pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai *global pandemic*, belum juga berakhir. Oleh karenanya perlu terus menjaga kewaspadaan dan meningkatkan pencegahan penularan agar tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi.

“Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir, dan di tahun 2022 pandemi covid masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara kita Indonesia. Selain varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru, varian omicron yang harus menambah kewaspadaan kita, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita

lakukan serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan”, terang Presiden saat menyampaikan Pidatonya di Istana Negara Jakarta.

APBN tahun 2022 akan melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat tahun 2021”, ucap Menteri Keuangan dalam laporannya. (wsb/is)



FOTO: ISTIMEWA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh Kategori Baik dalam Ajang Anugerah Meritokrasi 2021 yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Surabaya, Selasa (07/12/2021).

Ajang Anugerah Meritokrasi 2021 ANRI PEROLEH KATEGORI BAIK

Jakarta (07/12) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh Kategori Baik dalam Ajang Anugerah Meritokrasi 2021 yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Surabaya, Selasa (7/12/2021). Turut hadir dan menerima penghargaan Plt. Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali menggelar Anugerah Meritokrasi untuk mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik dan sangat baik. Pada 2021 ini, KASN menetapkan 45 instansi memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik dan 77 instansi dengan predikat baik. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, di mana sebanyak 81 instansi ditetapkan mendapat kategori sangat baik dan baik.

Menurut Ketua KASN, Agus Pramusinto, keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai penerapan sistem merit kategori baik dan sangat baik merupakan buah kerja keras dan komitmen seluruh jajaran di instansi pemerintah dalam memperbaiki manajemen ASN.

“Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap seluruh instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk menerapkan sistem merit serta ikut dalam penilaian penerapan sistem merit dan kami berharap pula agar prestasi kali ini menjadi pemicu untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen ASN di instansi pemerintah,” terang Agus dalam sambutannya pada Anugerah Meritokrasi di Surabaya.

Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, dalam sambutannya menyebut

digelarnya Anugerah Meritokrasi menjadi bukti konsistensi penegakan atas pengawasan meritokrasi di instansi pemerintah sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Kembangkan dan perkuat implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Wakil Presiden.

Di samping itu, baik instansi pemerintah maupun sumber daya manusia perlu meningkatkan *agility* dan kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional. Wapres kemudian mengajak seluruh ASN di tanah air untuk mengerahkan profesionalitas dan tekad mereka untuk mewujudkan ASN berkelas dunia.

Sementara itu, dilaksanakannya Anugerah Meritokrasi di Kota Pahlawan turut disambut baik Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Hal itu menurutnya menjadi sebuah kebanggaan karena Jawa Timur menjadi salah satu instansi yang mendapatkan penghargaan sistem merit kategori sangat baik.

Sebagai informasi, sejak 2019 hingga penghujung 2021, KASN tercatat telah menilai 347 instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 instansi telah mendapatkan kategori baik dan 46 lainnya mendapatkan kategori sangat baik. Pada 2024 mendatang, KASN menargetkan 100 persen Kementerian/Lembaga, 85 persen Pemerintah Provinsi, dan 30 persen Kabupaten/Kota mendapatkan kategori minimal baik penerapan sistem merit. **(kp)**

Jakarta (07/12) - Dalam rangka menghimpun masukan dari peneliti, sejarawan dan pengguna arsip atas sarana temu balik arsip yang telah disusun, Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Ekspose Inventaris Arsip Departemen Perhubungan 1947-2011 secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui saluran akun youtube Arsip Nasional RI. Ekspose yang dibuka Direktur Pengolahan, Agus Santoso menghadirkan narasumber Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan I, Widhi Setyo Putro, Sekretaris Mahkamah Pelayaran, R.Totok M, dan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bondan Kanumoyoso.

Pada sambutannya, Agus Santoso menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2021, Direktorat Pengolahan telah menyusun Inventaris Arsip Departemen Perhubungan 1947-2011. "Inventaris arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Departemen Perhubungan yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis," jelas Agus.

Sementara itu, Widhi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi, arsip statis yang diciptakan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia kurun waktu tahun 1947 - 2011 yang disimpan di ANRI berjumlah 89 boks dan 27 bundel sampul besar. "Arsip Departemen Perhubungan yang telah diakuisisi ANRI pada tahun 2013, 2015, 2018, dan 2020 perlu diolah menjadi inventaris, dikarenakan terdapat beberapa alasan, antara lain

untuk meningkatkan kualitas *finding aids* dengan mendeskripsi sesuai standar dan kriteria yang berlaku, meningkatkan kecepatan akses bagi pengguna melalui penataan fisik dan penyusunan informasi arsip secara sistematis, serta menjaga keamanan fisik arsip dari kerusakan, seperti klip, staples dan sejenisnya," terang Widhi.

Lebih lanjut Bondan menyampaikan bahwa dalam khazanah arsip Departemen Perhubungan ini ada banyak tema dan peristiwa sejarah yang dapat ditulis dan dihasilkan melalui pemanfaatan khazanah arsip tersebut. "Contohnya riset tentang perkembangan transportasi darat, penerbangan perintis kebijakan tarif angkutan darat, laut, dan udara pada masa orde baru, dan lain-lain. Selain itu, khazanah arsip Departemen Perhubungan juga

dapat digunakan untuk melengkapi riset sejarah ekonomi, perkotaan, sejarah lokal, maritim dan lainnya," papar Bondan.

Selanjutnya, R. Totok juga turut menjelaskan perkembangan organisasi Mahkamah Pelayaran dari waktu ke waktu. Sebagai informasi, fungsi Departemen Perhubungan berdasarkan pada khazanah arsip periode 1947-2011, meliputi informasi antara lain tentang Kesekretariatan, Pengawasan, Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian, Investigasi dan Penelitian Kecelakaan, Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, Pos dan Telekomunikasi. Adapun prosedur pengolahan arsipnya mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. (tk)



Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Ekspose Inventaris Arsip Departemen Perhubungan 1947-2011 secara daring (07/12/21).

EKPOSE INVENTARIS ARSIP DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 1947-2011



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Penganugerahan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 dan memberikan kepada 5 (lima) Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan (10/12/21).

PENGANUGERAHAN SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL TAHUN 2021

Jakarta (10/12) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Penganugerahan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 kepada 5 (lima) peraih Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 berhak mendapatkan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto didampingi oleh Deputi bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman di Ruang Noerhadi Magetsari, ANRI, Jakarta, 10 Desember 2021.

“Kegiatan Penganugerahan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 dimulai dengan tahap “Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021”, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 353 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional, untuk memenuhi fungsi koordinasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN

bagi anggota simpul jaringan, serta menumbuhkan semangat dan motivasi simpul jaringan untuk meningkatkan keaktifan dalam melaksanakan SIKN dan JIKN di lingkungannya”, terang Andi Kasman dalam laporan.

Tahapan pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 ini yaitu tahap penilaian portofolio; presentasi dan wawancara; serta validasi atau kunjungan lapangan (virtual). Dari 307 anggota simpul jaringan yang terdaftar, per-Oktober 2021 terdapat 28 Simpul Jaringan yang memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan, terdiri dari 3 Lembaga Kearsipan Provinsi, 7 Lembaga Kearsipan Kota, dan 18 Lembaga Kearsipan Kabupaten.

Dari jumlah 28 Simpul Jaringan ini dipilih 10 nominator untuk selanjutnya mengikuti tahap penilaian oleh Dewan Juri, yaitu terdiri dari 2 profesional bidang kearsipan, 2 pejabat fungsional Arsiparis Utama

dan 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan poin penilaian terkait pemaparan perihal kebijakan, manajemen pengelolaan dan inovasi, serta penjelasan terkait subdomain masing-masing nominator. Tahap terakhir yaitu wawancara dan tanya-jawab. Kemudian sebagai hasil akhir ditetapkanlah 5 Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021 melalui Rapat Pimpinan ANRI.

Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan bahwa momen penyelenggaraan “Penganugerahan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2021” ini, secara khusus ditujukan sebagai prestasi terbaik bagi seluruh lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan badan usaha milik negara untuk berlomba-lomba menjadi semakin lebih baik dalam menyajikan informasi kearsipan dan akses publik melalui JIKN. Secara umum sebagai pengingat untuk semakin lebih baik lagi dalam menjalankan pengelolaan arsip, dengan memenuhi semua ketentuan kearsipan sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Simpul Jaringan yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, selamat kepada Simpul Jaringan yang telah terpilih sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2021. Bagi simpul jaringan yang belum terpilih, mari ke depan kita tingkatkan pengelolaan dan penyajian informasi kearsipan lebih baik lagi melalui SIKN/JIKN”, ungkap Imam Gunarto. **(hm)**

ARSIP
KE ANRI

OFFICE
V6.1

BER 20

FOTO: DOK. ANRI

Sekretaris Utama, LKPP Robin Asad Suryo (kiri) dan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Multi Siswati (kanan) saat memperlihatkan berita acara serah terima arsip statis di Gedung Serbaguna LKPP Kuningan, Jakarta (16/12/21).

LKPP SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI

Jakarta (16/12) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima arsip statis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertepatan pada acara Perayaan Hari Ulang Tahun ke-14 LKPP. Arsip Statis LKPP diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Utama, LKPP Robin Asad Suryo kepada Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Multi Siswati di Gedung Serbaguna LKPP Kuningan, Jakarta.

Dalam sambutannya Multi Siswati menyampaikan bahwa dengan diserahkannya arsip statis

LKPP ke ANRI, maka LKPP telah melaksanakan tiga hal penting, pertama, LKPP telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia khususnya bagi generasi mendatang. Kedua, LKPP telah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statisnya ke ANRI. Ketiga, LKPP telah mentaati dan melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyelamatan Arsip Negara periode 2014-2019.

Sementara itu, Robin Asad Suryo menyampaikan bahwa penyerahan arsip statis LKPP bertujuan untuk mempertahankan nilai guna pembuktian serta menjelaskan bukti sejarah kinerja sebuah organisasi seperti LKPP. Adapun arsip yang diserahkan berupa Laporan Keuangan kurun waktu 2016 dan Peraturan LKPP.

Pada kegiatan penyerahan Arsip statis LKPP juga turut dihadiri Koordinator Kelompok Substansi Akuisisi Arsip I Tato Pujiarto serta Arsiparis ANRI. (lh)



Plt. Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Arsip Statis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) (16/12/21).

DKPP RI SERAHKAN ARSIP PUTUSAN PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK KE ANRI

Jakarta (16/12) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip statis DKPP RI diserahkan Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani di Hotel Grand Mercure Harmoni (16/12). Adapun arsip statis yang diserahkan yaitu arsip putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik kurun waktu tahun 2020 sejumlah 181 berkas.

"Arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi

kita dan generasi mendatang, karena menggambarkan sejarah bangsa. Dengan diteruskannya arsip statis ini, berarti kita telah mewariskan informasi yang sangat berharga di Indonesia sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang, dan seterusnya," ungkap Rini Agustiani.

Dengan diteruskannya arsip statis DKPP RI ke ANRI, maka 3 (tiga) hikmah sekaligus yang diperoleh, yakni, pertama, DKPP RI telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi negara dan

bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang. Kedua, DKPP RI telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statisnya ke ANRI. Kemudian, DKPP RI juga telah mentaati dan melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Negara Negara Periode 2014-2019. **(hez/ls)**



FOTO: ISTIMEWA

Kepala Pusat Akreditasi ANRI, Zita Asih Suprastiwi saat menerima Piagam Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (20/12/21).

PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN RAIH PREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Jakarta (20/12) - Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021. Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Senin, 20 Desember 2021, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang

memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona

integritas menuju WBK dan WBBM 2021 antara lain untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit kerja yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas. **(Tim Pusakre ANRI)**



Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto beserta jajaran dan perwakilan pihak keluarga ataupun kerabat terdekat yang menyerahkan arsip statis empat tokoh nasional berfoto bersama di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari Gedung Arsip Nasional, Jakarta (22/12/21).

ARSIP B.J. HABIBIE, HUSEIN MUTAHAR, TEUKU MUHAMMAD HADI THAYEB, DAN ANDI MAKMUR MAKKA KINI TERSIMPAN DI ANRI

Jakarta (22/12) - Empat arsip perseorangan tokoh nasional diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang meliputi arsip Prof DR. Ing. B.J. Habibie, arsip Husein Mutahar, arsip Teuku Muhammad Hadi Thayeb, dan arsip Andi Makmur Makka. Arsip tokoh-tokoh tersebut diserahkan perwakilan pihak keluarga atau kerabat terdekat kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto di kantor ANRI, Ampera Raya, Jakarta, 22 Desember 2021.

Imam Gunarto sangat mengapresiasi penyerahan arsip statis para tokoh nasional tersebut dan memberikan piagam penghargaan kepada keluarga atau kerabat dekat atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Meluap-luap di dada saya, kami mengucapkan terima kasih

kepada seluruh tokoh yang hadir di sini, dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyimpan arsipnya di Arsip Nasional RI,” ungkap Imam Gunarto. Imam Gunarto menambahkan bahwa penyerahan arsip tokoh nasional ini juga merupakan bentuk ketaatan terhadap negara serta peran serta masyarakat dalam menyelamatkan arsip bernilai guna sejarah.

Pada kesempatan ini, perwakilan pihak keluarga ataupun kerabat terdekat yang menyerahkan arsip statis empat tokoh nasional tersebut berkesempatan untuk memberikan testimoni di antaranya, Latifa R. Thayeb, Makmur Makka, Nurman Atmosulistya, dr. Desak Made, M.Kes. serta perwakilan dari PT. Wiratman. Masing-masing perwakilan mengucapkan terima kasih kepada ANRI karena telah memberikan tempat untuk menyimpan dan melestarikan arsip para tokoh nasional yang telah

diserahkan.

Penyelamatan arsip statis yang berasal dari perseorangan adalah hal yang harus terus diupayakan karena masih banyak tokoh-tokoh nasional Indonesia yang memiliki arsip yang bernilai historis, namun belum tersimpan di ANRI. “Hal ini mungkin karena mereka tidak mengetahui ada lembaga negara seperti ANRI yang memiliki tugas penyelamatan arsip arsip bernilai historis yang tercipta dari dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” ujar Pelaksana Deputi Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati.

Lebih lanjut Multi Siswati menambahkan bahwa arsip statis yang diserahkan ke ANRI sangatlah berarti untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga masyarakat dapat belajar tentang perjalanan sejarah bangsa dan dapat memanfaatkannya untuk Ilmu Pengetahuan. **(hez/md/is)**

SELAMAT BERTUGAS



DRA. DESI PRATIWI, MIM
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN
KEARSIPAN ANRI



DR. KANDAR, MAP
DEPUTI BIDANG
KONSERVASI ARSIP ANRI



RINI AGUSTIANI, SH, MAP
SEKRETARIS UTAMA ANRI

Mari Dukung Kami Wujudkan

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

YANG BERSIH MELAYANI DALAM

Direktorat Layanan & Pemanfaatan | Pusdiklat Kearsipan
Pusat Jasa Kearsipan | Direktorat SDM Kearsipan & Sertifikasi
Pusat Akreditasi

 www.anri.go.id  [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)  [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)  [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)  [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI)

Cara unduh Majalah ARSIP dalam format digital

1. Masuk ke www.anri.go.id
2. Klik menu “Publikasi Kami”
3. Pilih “Majalah ARSIP”
4. Unduh “Majalah ARSIP”
5. Majalah ARSIP tersedia dalam Portable Document Format (PDF) dapat dibaca menggunakan Adobe Acrobat

